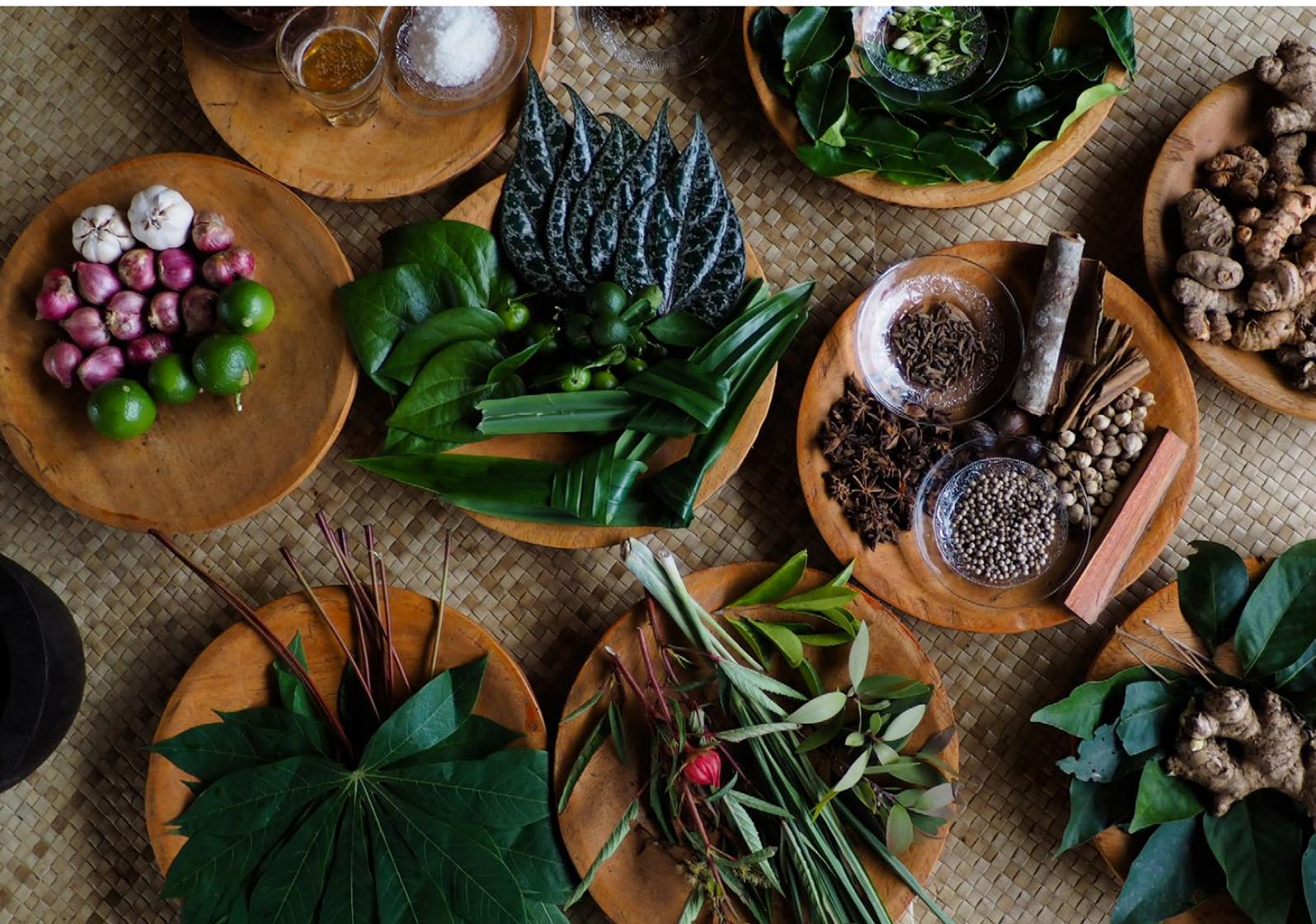


LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Agustus 2024





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Agustus 2024

Tim Penyusun

PENANGGUNG JAWAB

Rommy S. Tamawiyw

KOORDINATOR PENYUSUN

Beny Okta Tutuarima

TIM PENULIS

Arief Setyowidodo

Adinda Shafira

Imam Zulfian

Febiola Napitupulu

Gemma Giacinta Nugroho

Melly Anggraini

Edisi Agustus 2024

Buku Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diterbitkan oleh

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No. Telp: 0717 – 422411. Fax: 0717 – 422311

Gambar cover depan:

Rempah-rempah khas Belitung

Gambar cover belakang:

Lada putih yang baru dipanen

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya "Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus 2024" dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan berbagai informasi mengenai perkembangan perekonomian daerah khususnya bidang moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan keuangan daerah, yang selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal Bank Indonesia juga sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyusunan buku ini. Harapan kami, hubungan kerja sama yang baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku kajian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat serta dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya serta kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Pangkalpinang, Agustus 2024
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ttd.

Rommy S. Tamawiyu
Kepala Perwakilan

Daftar Isi

Tim Penyusun	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Tabel Indikator	XII
Ringkasan Eksekutif	XIV
Daftar Istilah	89



Bab I	
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	2
1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha	4
1.2 PDRB Menurut Pengeluaran	10
BOKS 1	
Explore Babel 2024: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui UMKM dan Pariwisata	17

Bab II	
KEUANGAN PEMERINTAH	20
2.1 Gambaran Umum	21
2.2 APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23
2.3 APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2024	27
2.4 Belanja APBN Kementerian/Lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	29

Bab III	
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	34
3.1 Inflasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35
3.2 Inflasi Kelompok Pengeluaran	36
3.3 Inflasi Spasial	40
3.4 <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan III 2024	41
3.5 Upaya Pengendalian Inflasi Daerah	42

BOKS 2	
Capacity Building dan Evaluasi Tengah Tahun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	45

Bab IV	
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	48
4.1 Kinerja Perbankan	49
4.2 Pembiayaan Daerah	52
4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	55



Bab V	PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH	58	Bab VII	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	80
5.1	Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai	59	7.1	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024	82
5.2	Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	62	7.2	Prospek Inflasi Tahun 2024	84
5.3	Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	62	7.3	Rekomendasi Kebijakan	85
5.4	Penyediaan Uang Layak Edar	63			
5.5	Upaya Bank Indonesia dalam Meningkatkan Kelancaran Transaksi Sistem Pembayaran Nontunai	63			
	BOKS 3				
	Pertahankan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Tahap Digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gelar Kegiatan <i>Capacity Building</i> dan Pendampingan Pelaporan ETPD Semester I 2024	65			
Bab VI	KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	68			
6.1	Kondisi Ketenagakerjaan	69			
6.2	Kondisi Kesejahteraan Petani	71			
6.3	Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan	72			
6.4	Indikator Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Survei Konsumen	72			
6.5	Indeks Pembangunan Manusia	74			
6.6	Tingkat Kemiskinan	75			

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan Tahunan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%yoy)	5
Tabel 1.2	Perkembangan Nilai dan Volume Komoditas Ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6
Tabel 1.3	Pertumbuhan Tahunan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (% yoy)	11
Tabel 2.1	Ringkasan Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024	22
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024	25
Tabel 2.3	Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024	26
Tabel 2.4	Ringkasan Pagu dan Realisasi APBD Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024	28
Tabel 4.1	Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha	52
Tabel 5.1	Perputaran Kliring dan Cek/Bilyet Giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	59
Tabel 5.2	<i>Inflow – Outflow</i> Uang Kartal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62
Tabel 6.1	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak, Feb 2020 - Feb 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
Tabel 6.2	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Feb 2020 – Feb 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70
Tabel 6.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Feb 2020 – Feb 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71
Tabel 6.4	Perbandingan NTP Berdasarkan Subsektor Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71
Tabel 6.5	Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72
Tabel 6.6	Pendapat Konsumen Terhadap Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dan Enam Bulan YAD (2019 – 2024)	73
Tabel 6.7	Pendapat Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini dan Penghasilan Enam Bulan YAD (2019 – 2024)	74
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75
Tabel 6.9	Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maret 2024	77
Tabel 7.1	<i>Outlook</i> Perekonomian Global	81

Daftar Gambar

Gambar B1.1	<i>Opening Ceremony</i> Explore Babel, Juni 2024	17
Gambar B2.1	<i>Capacity Building</i> dan Evaluasi Tengah Tahun TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung, Juni 2024	45
Gambar B2.2	Studi Banding TPID se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke TPID Kabupaten Banyuwangi, Juni 2024	46
Gambar B3.1	Kegiatan <i>Capacity Building</i> dan Pendampingan Pelaporan ETPD Semester I 2024, Juni 2024	65

Daftar Grafik

Grafik 1.1	PDRB Nominal dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3	Grafik 1.27	Perkembangan Nilai Ekspor Timah	14
Grafik 1.2	Struktur PDRB Triwulan II 2024	4	Grafik 1.28	Perkembangan Volume Ekspor CPO	15
Grafik 1.3	Distribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB tahun 2018 – Triwulan II 2024	4	Grafik 1.29	Perkembangan Nilai Ekspor CPO	15
Grafik 1.4	Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2024	5	Grafik 1.30	Perkembangan Volume Ekspor Lada	15
Grafik 1.5	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6	Grafik 1.31	Perkembangan Nilai Ekspor Lada	15
Grafik 1.6	Perkembangan Curah Hujan	6	Grafik 1.32	Perkembangan Volume Ekspor Perikanan	15
Grafik 1.7	Perkembangan Harga Lada Internasional	7	Grafik 1.33	Perkembangan Nilai Ekspor Perikanan	15
Grafik 1.8	Perkembangan Harga CPO Internasional	7	Grafik 1.34	Perkembangan Volume Ekspor Karet	16
Grafik 1.9	Perkembangan Harga Karet Internasional	7	Grafik 1.35	Perkembangan Nilai Ekspor Karet	16
Grafik 1.10	Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian	7	Grafik 1.36	Perkembangan Impor Barang dan Jasa	16
Grafik 1.11	Perkembangan Harga Timah Internasional	8	Grafik 1.37	Perkembangan Nilai Impor	16
Grafik 1.12	Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8	Grafik 1.38	Pangsa Barang Impor	16
Grafik 1.13	Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9	Grafik 2.1	Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kab/Kota di Bangka Belitung Triwulan II 2024	21
Grafik 1.14	Perkembangan Jumlah Pendaftaran Kendaraan Baru	9	Grafik 2.2	Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kab/Kota di Bangka Belitung Triwulan II 2024	21
Grafik 1.15	Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (RT) Kendaraan Bermotor	9	Grafik 2.3	Pangsa Sumber Pagu Pendapatan Daerah Tahun 2024	23
Grafik 1.16	Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi	10	Grafik 2.4	Pangsa Sumber Pagu Belanja Daerah Tahun 2024	23
Grafik 1.17	Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen	10	Grafik 2.5	Perkembangan Pagu APBD Provinsi 2020-2024	23
Grafik 1.18	Pertumbuhan Kredit Kepemilikan Tempat Tinggal	10	Grafik 2.6	Perkembangan Realisasi APBD Provinsi 2020 – Triwulan II 2024	23
Grafik 1.19	Andil Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran	11	Grafik 2.7	Pangsa Pagu Pendapatan APBD Provinsi Tahun 2024	24
Grafik 1.20	Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga	11	Grafik 2.8	Pangsa Pagu PAD APBD Provinsi Tahun 2024	24
Grafik 1.21	Pertumbuhan DPK, Kredit dan NPL Rumah Tangga (RT)	12	Grafik 2.9	Pangsa Pagu Belanja APBD Provinsi Tahun 2024	24
Grafik 1.22	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Saat Ini (IKE)	12	Grafik 2.10	Pangsa Pagu Belanja Operasi APBD Provinsi Tahun 2024	24
Grafik 1.23	Perkembangan Konsumsi Pemerintah	13	Grafik 2.11	Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Triwulan II Tahun 2024	25
Grafik 1.24	Perkembangan PMTB	13	Grafik 2.12	Pangsa Realisasi PAD APBD Provinsi Triwulan II Tahun 2024	25
Grafik 1.25	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	14	Grafik 2.13	Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan II 2024	27
Grafik 1.26	Perkembangan Volume Ekspor Timah	14	Grafik 2.14	Pangsa Realisasi Belanja Operasi APBD Provinsi Triwulan II 2024	27
			Grafik 2.15	Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024	27
			Grafik 2.16	Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024	27

Daftar Grafik

Grafik 2.17	Pangsa Total Pendapatan Kabupaten/Kota Triwulan II 2024	28	Grafik 3.11	Perkembangan Inflasi Subkelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Grafik 2.18	Realisasi PAD Kabupaten/Kota Triwulan II 2024	28	Grafik 3.12	Perkembangan Inflasi Subkelompok Pendidikan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
Grafik 2.19	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Triwulan II 2024	29	Grafik 3.13	Perkembangan Inflasi Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40
Grafik 2.20	Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Triwulan II 2024	29	Grafik 3.14	Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota IHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2024	40
Grafik 2.21	Pangsa Total Belanja Kabupaten/Kota Triwulan II 2024	29	Grafik 3.15	Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kota Pangkalpinang	40
Grafik 2.22	Realisasi Belanja APBN Triwulan II 2024 Menurut Jenis Belanja	30	Grafik 3.16	Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kota Tanjungpandan	41
Grafik 2.23	Pangsa Realisasi Belanja APBN Triwulan II 2024 Menurut Jenis Belanja	30	Grafik 3.17	Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kabupaten Bangka Barat	41
Grafik 2.24	Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II 2024	31	Grafik 3.18	Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kabupaten Belitung Timur	41
Grafik 2.25	Pangsa Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II 2024	31	Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	49
Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	35	Grafik 4.2	Indeks Orientasi Bisnis Perbankan	49
Grafik 3.2	Inflasi Kawasan Sumatera Triwulan II 2024	35	Grafik 4.3	Perkembangan Penghimpunan DPK	49
Grafik 3.3	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	36	Grafik 4.4	Perkembangan DPK Berdasarkan Komponen	50
Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	36	Grafik 4.5	Pangsa DPK Perbankan	50
Grafik 3.5	Perkembangan Inflasi Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37	Grafik 4.6	Pangsa DPK Menurut Kabupaten/Kota	50
Grafik 3.6	Perkembangan Inflasi Subkelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	37	Grafik 4.7	Perkembangan Kredit Perbankan	50
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Subkelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38	Grafik 4.8	Pertumbuhan Jenis Kredit Perbankan	50
Grafik 3.8	Perkembangan Inflasi Subkelompok Kesehatan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38	Grafik 4.9	Pangsa Kredit Perbankan	51
Grafik 3.9	Perkembangan Inflasi Subkelompok Transportasi Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38	Grafik 4.10	Perkembangan Pangsa Jenis Kredit Perbankan	51
Grafik 3.10	Perkembangan Inflasi Subkelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39	Grafik 4.11	<i>Non-Performing Loan (NPL)</i>	51
			Grafik 4.12	<i>Loan to Deposit (LDR)</i>	52
			Grafik 4.13	Pertumbuhan Total Kredit Korporasi	53
			Grafik 4.14	Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Jenis Kredit	53
			Grafik 4.15	Pertumbuhan Total Kredit Korporasi	53
			Grafik 4.16	Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Jenis Kredit	53
			Grafik 4.17	Pangsa Kredit Konsumsi Rumah Tangga	54
			Grafik 4.18	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	54
			Grafik 4.19	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini	54

Daftar Grafik

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit	55	Grafik 5.13 Jumlah Transaksi Uang Elektronik	61
Grafik 4.21 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	55	Grafik 5.14 Perkembangan Aliran Uang Kartal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	62
Grafik 4.22 Perkembangan Kredit UMKM	55	Grafik 5.15 Penemuan Jumlah Lembar Uang Palsu (UPAL) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	63
Grafik 4.23 Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Kredit	55	Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran, Feb 2017 – Feb 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
Grafik 4.24 Pangsa Kredit UMKM Secara Sektoral	56	Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Harga Timah	69
Grafik 4.25 NPL Kredit UMKM	56	Grafik 6.3 Persentase Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja Periode Februari 2024 (%)	70
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi RTGS	59	Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani	71
Grafik 5.2 Pertumbuhan Nominal Transaksi BI-RTGS	59	Grafik 6.5 Nilai Tukar Petani dan <i>Growth</i>	71
Grafik 5.3 Pertumbuhan Frekuensi Transaksi BI-RTGS	60	Grafik 6.6 Indeks Penghasilan	73
Grafik 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring	60	Grafik 6.7 Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan	73
Grafik 5.5 Perkembangan Jumlah <i>Merchant</i> QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60	Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	76
Grafik 5.6 Persebaran Jumlah <i>Merchant</i> QRIS per wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60	Grafik 6.10 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan	76
Grafik 5.7 Perkembangan <i>User</i> Baru QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60	Grafik 6.11 Perkembangan <i>Gini Ratio</i>	76
Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60		
Grafik 5.9 Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Rp Juta)	61		
Grafik 5.10 Jumlah Transaksi Kartu Debit (Rp Miliar)	61		
Grafik 5.11 Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Volume)	61		
Grafik 5.12 Jumlah Transaksi Kartu Debit (Volume)	61		



Tabel Indikator

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI												
INDIKATOR	2022				2022	2023				2023	2024	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
PDRB ADHB (Rp Triliun)	22,82	24,11	23,78	24,59	95,30	24,24	25,81	26,14	26,45	102,64	25,17	27,06
PDRB ADHK (Rp Triliun)	13,73	14,46	14,62	15,00	57,81	14,33	15,20	15,20	15,61	60,34	14,48	15,35
PDRB (%yoy)	3,29	5,27	4,54	4,45	4,40	4,40	5,13	4,01	4,00	4,38	1,01	1,03
Lapangan Usaha (%yoy)												
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,40	0,45	-1,72	7,60	0,99	8,87	5,01	3,18	-1,28	3,76	4,91	4,04
2. Pertambangan dan Penggalian	-1,24	6,00	-0,03	-2,30	0,51	-2,27	-0,76	-0,50	-1,34	-1,20	-9,08	-7,49
3. Industri Pengolahan	-1,36	6,25	5,54	10,25	5,14	2,31	0,91	1,44	3,08	1,92	-5,12	-5,89
4. Pengadaan Listrik, Gas	6,15	0,02	-4,74	-14,27	-3,39	-14,89	-2,14	7,80	21,63	2,40	17,45	0,97
5. Pengadaan Air	-0,01	2,20	5,83	8,04	4,05	-0,03	-0,23	0,90	1,83	0,65	7,91	5,32
6. Konstruksi	1,99	-3,90	-2,19	-0,16	-1,06	2,19	7,95	14,20	11,47	8,94	-1,86	-0,01
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,51	15,06	10,36	2,18	10,77	-0,94	-1,32	1,22	10,51	2,34	0,20	0,61
8. Transportasi dan Pergudangan	23,69	22,11	32,52	8,65	20,96	9,85	14,26	7,37	6,39	9,44	6,96	5,06
9. Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	14,77	13,25	6,87	7,36	10,39	13,00	9,45	15,76	2,48	9,92	5,23	8,60
10. Informasi dan Komunikasi	8,83	9,52	12,48	8,66	9,86	10,84	13,60	15,05	15,59	13,82	17,50	12,49
11. Jasa Keuangan	-4,57	4,02	10,54	12,47	5,57	22,75	14,12	13,86	6,13	13,90	6,81	3,23
12. Real Estate	4,28	6,15	5,40	4,64	5,11	5,20	3,83	3,76	3,78	4,14	2,37	4,99
13. Jasa Perusahaan	6,24	11,31	11,57	14,71	10,99	7,93	5,02	10,00	12,23	8,86	17,41	14,57
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,91	-4,70	9,17	-5,51	-1,37	6,30	23,15	-1,14	-1,24	6,63	11,54	8,79
15. Jasa Pendidikan	16,40	-1,06	-0,84	0,77	3,13	15,85	22,49	4,07	2,42	10,74	4,42	17,96
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,15	1,79	1,39	8,53	2,16	9,32	9,83	6,34	9,87	8,82	8,60	-1,01
17. Jasa lainnya	13,38	9,31	9,36	0,55	7,88	1,28	11,77	18,70	13,39	10,97	11,97	7,98
Permintaan (%yoy)												
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,85	4,92	5,65	3,60	4,99	3,01	1,87	3,75	4,35	3,25	4,37	2,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,92	4,63	5,58	4,31	4,61	3,81	5,05	1,04	12,16	5,54	17,00	7,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-3,16	-0,97	2,87	8,76	2,53	8,33	3,18	0,08	11,07	5,67	17,32	3,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,54	0,56	2,89	3,39	3,32	1,91	5,35	8,01	4,17	4,85	-0,35	0,12
5. Ekspor Barang dan Jasa	10,38	24,20	-13,57	-18,26	-1,32	-30,79	-18,48	-14,99	-8,19	-17,74	-37,84	-34,52
6. Impor Barang dan Jasa	16,13	23,36	-19,30	-24,65	-4,43	-48,30	-28,10	-21,20	-10,00	-26,21	-57,48	-47,26
Ekspor												
Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	680,92	896,04	575,58	483,02	2.635,57	312,16	627,75	533,11	525,30	1.998,32	164,86	387,45
Volume Ekspor Non Migas (Juta Ton)	80,33	128,45	115,51	108,47	466,60	75,98	138,80	153,34	166,22	592,70	132,57	140,56
Indeks Harga Konsumen												
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	109,62	113,25	113,78	114,33	114,33	115,10	116,43	117,82	117,36	117,36	104,04*	103,95*
Pangkalpinang	109,08	111,75	112,68	115,54	115,54	113,49	114,62	115,72	115,94	115,94	104,46*	104,90*
Tanjungpandan	110,61	115,97	115,80	113,66	113,66	118,03	119,72	121,63	119,93	119,93	105,00*	104,76*
Bangka Barat											102,97*	102,25*
Belitung Timur											103,81*	103,64*
Laju Inflasi (%yoy)												
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,92	6,52	6,67	5,38	5,38	5,00	2,81	3,55	2,65	2,65	1,80*	1,08*
Pangkalpinang	4,70	6,46	7,33	6,07	6,07	4,04	2,57	2,70	2,01	2,01	2,24*	1,77*
Tanjungpandan	2,56	6,61	5,52	4,17	4,17	6,71	3,23	5,03	3,80	3,80	1,80*	0,05*
Bangka Barat											1,78*	0,27*
Belitung Timur											0,88*	1,75*

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah
*Menggunakan SBH 2022

Tabel Indikator

PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN												
INDIKATOR	2022				2022	2023				2023	2024	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
ASET												
Aset Perbankan (Rp Triliun)	27,48	28,95	28,21	27,51	27,51	26,45	27,11	28,47	27,42	27,42	25,93	26,96
Pertumbuhan (%yoy)	25,33	20,48	9,61	6,33	6,33	-3,74	-6,36	0,92	-0,34	-0,34	-1,99	-0,54
DPK												
Dana Pihak Ketiga Lokasi KC/KCP (Rp Triliun)	26,62	28,07	27,09	26,42	26,42	25,23	25,68	26,42	25,44	25,44	23,79	23,78
Giro (Rp Triliun)	5,25	5,49	4,80	5,20	5,20	4,60	4,72	4,57	4,50	4,50	3,95	4,11
Tabungan (Rp Triliun)	13,73	14,34	13,78	13,98	13,98	12,79	13,20	13,16	13,31	13,31	12,59	12,77
Deposito (Rp Triliun)	7,64	8,24	8,51	7,24	7,24	7,84	7,77	8,69	7,63	7,63	7,24	6,90
Pertumbuhan												
Dana Pihak Ketiga (%yoy)	26,46	21,11	2,95	6,79	6,79	-5,25	-8,52	-2,49	-3,72	-3,72	-5,71	-7,39
Giro (%yoy)	70,35	42,90	0,05	25,79	25,79	-12,45	-14,14	-4,89	-13,54	-13,54	-14,09	-12,83
Tabungan (%yoy)	26,91	20,90	5,88	4,10	4,10	-6,85	-8,00	-4,52	-4,78	-4,78	-1,54	-3,24
Deposito (%yoy)	6,86	10,23	0,09	0,87	0,87	2,59	-5,68	2,16	5,40	5,40	-7,61	-11,15
KREDIT												
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek (Rp Triliun)	17,16	17,63	18,18	18,62	18,62	19,28	20,11	21,44	23,89	23,89	22,94	23,64
Modal Kerja (Rp Triliun)	6,42	6,43	6,76	6,90	6,90	7,33	7,86	9,01	10,64	10,64	9,37	9,59
Investasi (Rp Triliun)	3,29	3,62	3,62	3,74	3,74	3,83	3,96	3,98	4,42	4,42	4,60	4,96
Konsumsi (Rp Triliun)	7,45	7,58	7,80	7,98	7,98	8,12	8,31	8,44	8,82	8,82	8,97	9,08
Pertumbuhan												
Kredit Berdasarkan Lokasi Proyek (%yoy)	-21,91	-17,14	-4,23	5,89	5,98	12,36	14,07	17,96	28,30	28,30	19,01	17,57
Modal Kerja (%yoy)	-45,86	-41,58	-21,03	-4,72	-4,72	14,11	22,24	33,31	54,09	54,09	27,91	20,70
Investasi (%yoy)	17,03	24,96	24,55	25,79	25,79	16,41	9,55	10,06	18,42	18,42	19,96	26,80
Konsumsi (%yoy)	2,01	2,84	3,77	8,52	8,52	9,05	9,64	8,31	10,60	10,60	10,53	10,17
LDR Lokasi Proyek (%)	64,45	62,80	67,09	70,46	70,46	76,42	78,30	81,16	93,88	93,88	96,45	99,40
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	3,21	3,17	3,06	2,74	2,74	2,80	4,49	4,20	2,93	2,93	3,18	3,09

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN												
INDIKATOR	2022				2022	2023				2023	2024	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
BI-RTGS												
Volume (Lembar)	3.134	3.262	3.054	2.978	12.428	2.446	3.030	2.783	2.708	10.967	1.813	1.997
Nilai (Rp Miliar)	7.600	7.191	7.654	10.839	33.284	7.280	9.472	8.598	11.036	36.386	5.852	7.335
Pertumbuhan												
Volume (%yoy)	15,73	2,02	-12,49	-20,12	-5,30	-21,95	-7,13	-8,87	-9,07	-11,76	-25,88	-0,34
Nilai (% yoy)	30,73	3,53	-10,6	33,42	16,30	-4,20	31,71	12,33	1,82	9,32	-19,61	-0,23
SKNBI												
Perputaran Kliring												
a. Nominal (Rp Miliar)	1.643,18	1.604,55	1.329,02	1.518,78	6.095,53	1.144,81	1.095,73	1.350,53	1.617,76	5.208,84	978,11	959,48
Pertumbuhan (%yoy)	21,90	1,36	-2,36	-2,36	-11,53	-30,33	-31,71	1,62	6,52	-14,55	-14,56	-0,12
b. Warkat (lembar)	47.297	47.059	43.747	45.201	183.304	35.962	36.924	39.815	43.720	156.421	32.020	35.054
Pertumbuhan (%yoy)	1,65	-8,02	-13,41	-20,07	15,14	-23,97	-21,54	-8,99	-3,28	-14,67	-10,96	-0,05
Perputaran Per Hari												
a. Nominal (Rp Juta)	26.937	29.174	20.137	110.730	186.978	87.394	99.775	100.496	115.923	403.588	82.690	89.452
b. Warkat (lembar)	775	856	663	2.290	4.584	1.739	2.141	1.925	2.233	8.038	1.667	2.022
Inflow - Outflow												
Inflow (Rp miliar)	1.271,84	1.370,79	1.082,18	396,39	4.121,20	1.494,61	713,99	671,55	358,08	3.238,24	1.627,50	1.183,57
Pertumbuhan (% yoy)	90,69	-24,09	-20,88	-79,05	-28,12	17,52	-47,91	-37,94	-9,67	-21,42	8,89	65,77
Outflow (Rp miliar)	1.273,20	1.761,87	483,37	1.722,27	5.240,71	517,78	1.575,10	794,07	1.915,22	4.802,78	772,83	1.165,15
Pertumbuhan (% yoy)	128,36	227,03	99,86	47,50	109,14	-59,33	-10,60	64,28	11,20	-8,36	49,26	-26,06
Inflow + Outflow (Rp miliar)	2.545,04	3.132,66	1.565,55	2.118,67	9.361,91	2.012,39	2.289,70	1.465,62	2.273,30	8.041,01	2.400,33	2.348,72
Pertumbuhan (% yoy)	107,84	33,61	-2,74	-30,76	13,63	-20,93	-26,91	-6,38	7,30	-14,11	19,28	2,58
Netflow (Rp miliar)	-1,36	-391,08	598,81	-1.325,88	-1.119,51	976,83	-861,11	-122,51	-1.557,14	-1.564,54	854,67	18,42
Pertumbuhan (% yoy)	-101,25	-130,86	-46,82	-282,94	-134,69	-717,72	120,19	-120,46	17,44	39,75	-12,51	-1,02

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Ringkasan Eksekutif

I. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI DAERAH

Pada triwulan II 2024, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,03% (yoy), relatif tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2024 utamanya ditopang oleh lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan didorong oleh subkategori perikanan dan perkebunan tahunan seperti lada, kelapa sawit, dan karet. Sementara itu, momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, libur sekolah, pencairan gaji ke-13 PNS/ASN serta berbagai *event* besar pada triwulan II 2024 mendorong pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, Ekspor dan Impor Barang dan Jasa masih melanjutkan kontraksi yang utamanya diindikasikan terdampak oleh penurunan kinerja logam dasar timah.

Pada triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi dari sisi Lapangan Usaha (LU) utamanya bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara itu dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditopang oleh permintaan domestik, khususnya Konsumsi Rumah Tangga.

Pada triwulan II 2024, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,03% (yoy), didorong pertumbuhan pada lapangan usaha (LU) utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU lainnya yaitu LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Transportasi dan Pergudangan; LU Jasa Pendidikan; serta LU Informasi dan Komunikasi. Tumbuhnya LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan utamanya didorong oleh subkategori perikanan, seiring dengan peningkatan jumlah produksi perikanan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga didorong oleh subkategori perkebunan tahunan seperti produksi lada, kelapa sawit, dan karet. Selain itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh lebih tinggi seiring meningkatnya volume barang yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar LU tumbuh positif, kecuali LU Industri Pengolahan; LU Pertambangan dan Penggalian; LU Konstruksi; serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kondisi ini turut dipengaruhi aktivitas produksi logam timah yang masih belum normal.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian tumbuh positif, ditopang oleh permintaan domestik, khususnya Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Penurunan tersebut diindikasikan terdampak oleh penurunan kinerja ekspor komoditas timah. Meskipun demikian, momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, libur sekolah tengah tahun, serta berbagai *event* besar pada triwulan II 2024 menjadi pendorong tumbuhnya konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pencairan THR dan gaji ke-13 disertai dengan penambahan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024.

Ringkasan Eksekutif

II. KEUANGAN PEMERINTAH

Pada triwulan II 2024, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp4,42 triliun atau tumbuh 6,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut setara dengan 46,95% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp3,95 triliun atau setara dengan 36,98% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja daerah tersebut tumbuh 3,97% (yoy). Sementara realisasi belanja APBN kementerian/lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,52 triliun atau setara dengan 45,50% dari pagu.

Realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi pada triwulan II 2024 mencapai Rp1,24 triliun atau 48,45% dari pagu atau alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi pada triwulan II 2023 yang mencapai 46,35% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja tingkat provinsi pada triwulan II 2024 mencapai Rp1,14 triliun atau setara dengan 37,97% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja tingkat provinsi pada triwulan II 2023 yang mencapai 30,94% dari pagu.

Hingga triwulan II 2024, realisasi pendapatan daerah (APBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 46,95% dari pagu, sementara realisasi belanja (APBD dan APBN) mencapai 45,50% dari pagu.

Di tingkat kabupaten/kota, realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2024 mencapai Rp3,18 triliun atau setara dengan 46,40% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota pada triwulan II 2023 yang mencapai 39,57% dari pagu. Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar Rp2,81 triliun atau setara dengan 36,59% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja daerah tingkat kabupaten/kota pada triwulan II 2023 yang mencapai 32,34% dari pagu. Meningkatnya realisasi belanja APBD kabupaten/kota didorong oleh kenaikan belanja operasi.

Realisasi belanja APBN kementerian/lembaga (K/L) pada triwulan II tahun 2024 sebesar 45,50% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja APBN K/L pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu mencapai 40,81% dari pagu.

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan II 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi 1,08% (yoy), berada di bawah rentang sasaran 2,5±1%. Nilai ini lebih rendah apabila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,80% (yoy). Turunnya laju inflasi triwulan II 2024 dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi beberapa komoditas utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan jumlah pasokan yang relatif lebih terjaga. Sementara itu, dari sisi permintaan, daya beli masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terindikasi mengalami penurunan akibat melambatnya kinerja sektor utama logam dasar timah. Secara spasial, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,78% (yoy), Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0,05% (yoy), Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,27% (yoy), serta Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,75% (yoy).

Ringkasan Eksekutif

Dari sisi komoditas, andil inflasi tahunan (yoy) terbesar pada triwulan II 2024 berasal dari komoditas beras sebesar 0,78%. Andil terbesar selanjutnya berasal dari komoditas sigaret kretek mesin (SKM) 0,24%, angkutan udara 0,16%, cabai merah 0,13%, serta emas perhiasan 0,12%. Sementara itu, andil deflasi tahunan (yoy) terbesar berasal dari daging ayam ras 0,28%, ikan kerisi 0,24%, ikan tongkol 0,16%, ikan kembung 0,16%, serta ikan selar 0,12%.

Sebagian besar kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi pada triwulan II 2024, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi tahunan tertinggi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,48%, serta kelompok transportasi dengan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,24%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi tertinggi adalah kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,04% (yoy) dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,03% (yoy).

Pada periode laporan, kelompok makanan, minuman dan tembakau pada triwulan II 2024 mengalami inflasi sebesar 1,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,96% (yoy). Menurunnya laju inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau didorong oleh normalisasi permintaan pasca HBKN Ramadhan/Idul Fitri dan pasokan bahan pokok strategis yang lebih terjaga.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengendalikan inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka kebijakan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

IV. PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode triwulan II 2024 tetap resilien, tecermin dari peningkatan kualitas kredit di tengah kinerja intermediasi perbankan yang tetap tumbuh. Hal ini sejalan dengan *Non-Performing Loan (NPL)* pada periode berjalan yang tercatat semakin rendah, diiringi dengan penyaluran kredit yang tumbuh meskipun melambat dibandingkan sebelumnya.

Kinerja pembiayaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat tumbuh melambat, yang tecermin dari penyaluran kredit yang tetap tumbuh pada triwulan II 2024 namun lebih lambat dari triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, tingkat perbankan juga tetap baik yang diiringi dengan peningkatan kualitas kredit sejalan dengan risiko kredit yang semakin mereda.

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 cukup baik, tecermin dari penyaluran kredit yang tetap tumbuh tinggi. Pada triwulan II 2024, kredit perbankan yang telah tersalurkan sebesar Rp23,64 triliun, tumbuh sebesar 17,54% (yoy) meskipun tercatat melambat dari periode sebelumnya sebesar 19,01% (yoy).

Kualitas penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 juga terpantau semakin berkualitas, seiring dengan risiko kredit yang semakin terjaga. Hal tersebut tecermin dari *Non-Performing Loan (NPL)* pada periode berjalan tercatat sebesar 3,09%, lebih rendah dari periode sebelumnya 3,18% dan di bawah batas *threshold* sebesar 5%.

Namun demikian, kinerja Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp23,79 Triliun, atau terkontraksi sebesar 7,39% (yoy), lebih dalam dari kontraksi periode sebelumnya sebesar 5,71%

Ringkasan Eksekutif

(yoy). Capaian tersebut turut memberikan andil pada realisasi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercatat sebesar 99,40%, meningkat dari periode sebelumnya sebesar 96,45%. Sejak 2023 sampai dengan periode laporan, jumlah DPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kontraksi setiap triwulan dengan rata-rata penurunan sebesar 5,51% (yoy).

V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2024, transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tercatat tumbuh. Pertumbuhan transaksi nontunai tercatat pada transaksi QRIS, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan Uang Elektronik, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Terjadi penurunan transaksi RTGS dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, transaksi tunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net inflow*, imbas aktivitas produksi dan ekspor timah yang belum normal.

Transaksi nontunai yang tecermin dari nilai transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 mencapai Rp7,33 triliun atau terkontraksi sebesar 22,56% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 19,61% (yoy). Demikian pula dengan transaksi kliring yang nilainya mencapai Rp0,986 triliun atau terkontraksi sebesar 12,44% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 14,56% (yoy).

Selama triwulan II 2024, volume transaksi QRIS, dan Uang Elektronik tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi tunai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net inflow* selama triwulan II 2024.

Dari sisi sistem pembayaran tunai, pengedaran uang dari Bank Indonesia pada triwulan II 2024 yang didistribusikan melalui perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net inflow* sebesar Rp18,42 miliar. Kondisi *net inflow* pada triwulan II 2024 terjadi karena aktivitas produksi dan ekspor timah yang belum normal.

VI. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan. Hal ini tecermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat disertai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Disamping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun demikian, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 mengalami peningkatan 0,03% menjadi 4,55%. Hal ini juga tecermin dari penurunan hasil Survei Konsumen pada indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan lalu dan indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan lalu dibandingkan triwulan I 2024.

Nilai TPAK meningkat dari 70,33% pada Februari 2023 menjadi 70,66% pada Februari 2024. Sementara itu angka TPT menurun dari 3,89% pada Februari 2023 menjadi 3,85% pada Februari 2024. Sejalan dengan peningkatan TPAK, jumlah tenaga kerja pada Februari 2024 mencapai 787.140 orang atau meningkat sebesar 1,70 % dibandingkan Februari 2023 sebesar 774.010 orang. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei kondisi dunia usaha yang menunjukkan perkembangan penggunaan tenaga kerja pada triwulan I 2024 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Distribusi tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pangsa 26,50% atau sebanyak 208.561 tenaga kerja.

Indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu pada triwulan II 2024 mengalami penurunan menjadi 117,33 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 118,00. Sejalan dengan hal itu, indeks penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan lalu

Ringkasan Eksekutif

pada triwulan II 2024 sebesar 119,83, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 126,43.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2024 sebesar 131,18 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 124,80. Kondisi ini dipengaruhi oleh mayoritas subsektor yakni perkebunan rakyat dan peternakan yang mengalami peningkatan indeks NTP.

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Sementara dari komponen pengeluaran, penurunan kinerja net ekspor dan investasi menahan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh positif pada kisaran 0,91 – 1,71% (yoy), meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 4,38% (yoy).

Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan terkendali, namun berada di bawah rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan, utamanya seiring belum normalnya aktivitas produksi logam timah sebagai komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu dari komponen pengeluaran, perlambatan perekonomian dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi serta perlambatan konsumsi rumah tangga. Meskipun demikian, perekonomian diperkirakan tetap tumbuh positif seiring pelaksanaan Pemilu, Pilkada, serta penyelenggaraan berbagai event besar yang didukung penambahan rute dan frekuensi penerbangan ke dan/atau dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar 4,04%, kenaikan gaji ASN/TNI/Polri sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12% menahan perlambatan lebih lanjut.

Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan terkendali, meskipun berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Rendahnya capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terindikasi akibat turunnya daya beli masyarakat seiring dengan melambatnya kinerja sektor utama logam dasar timah. Dari sisi perkembangan harga, tekanan inflasi pada tahun 2024 diperkirakan terutama bersumber dari peningkatan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Ke depan, pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.





Foto : Bandara Depati Amir, Kota Pangkalpinang

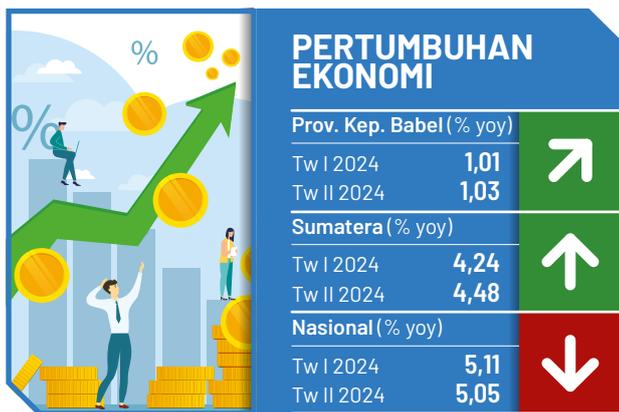
BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pada triwulan II 2024, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 1,03% (yoy), relatif tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,01% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2024 utamanya ditopang oleh lapangan usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan didorong oleh subkategori perikanan dan perkebunan tahunan seperti lada, kelapa sawit, dan karet. Sementara itu, momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, libur sekolah, pencairan gaji ke-13 PNS/ASN serta berbagai event besar pada triwulan II 2024 mendorong pertumbuhan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, Ekspor dan Impor Barang dan Jasa masih melanjutkan kontraksi yang utamanya diindikasikan terdampak oleh penurunan kinerja logam dasar timah.



Satuan dalam % YOY

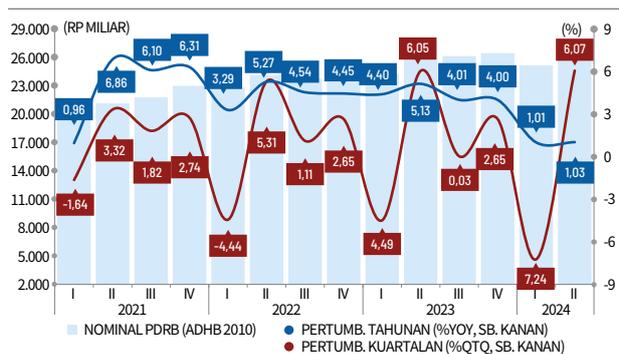


Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 tumbuh 1,03% (yoy), relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 1,01% (yoy) (Grafik 1.1).

(Grafik 1.1). Secara triwulanan, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh lebih tinggi sebesar 6,07% (qtq) meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 7,24% (qtq). Adapun perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp27.060 miliar. Kinerja LU utama, yaitu LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024. Selain itu, LU lainnya seperti LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Transportasi dan Pergudangan; LU Jasa Pendidikan; serta LU Informasi dan Komunikasi juga turut menopang perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih lanjut.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh positif utamanya didorong oleh subkategori Perikanan, seiring meningkatnya jumlah produksi perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga didorong oleh subkategori Perkebunan Tahunan seperti produksi lada, kepala sawit, dan karet yang turut mengalami pertumbuhan positif sehingga mendorong kinerja LU lebih lanjut.

Sementara itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, dan momentum libur sekolah tengah tahun turut mendorong konsumsi masyarakat yang tinggi pada triwulan laporan. Lebih lanjut, volume barang



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

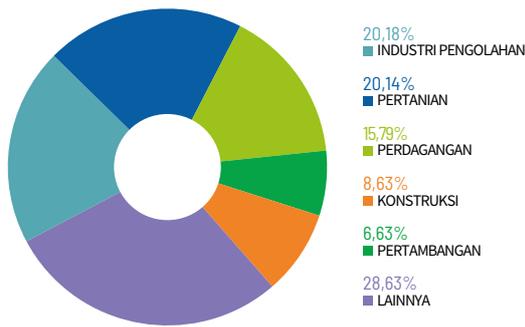
Grafik 1.1 PDRB Nominal dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melanjutkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari maraknya keberadaan ritel modern dan lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, impor barang modal (*capital goods*) dan impor barang antara (*intermediary goods*) juga relatif mengalami perbaikan pada triwulan II 2024 jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan II 2024, LU Pertambangan dan Penggalian melanjutkan kontraksi, namun tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya. Aktivitas produksi yang masih belum normal berdampak pada terkontraksinya LU Pertambangan dan Penggalian. Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah smelter swasta yang memperoleh persetujuan RKAB dan melakukan kegiatan penambangan.

Selain itu, kinerja LU Industri Pengolahan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Subkategori industri logam dasar memiliki pangsa terbesar dalam LU Industri Pengolahan. Pada triwulan laporan, subkategori industri logam dasar yang ditopang oleh logam timah mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Proses hukum tata kelola dan tata niaga timah yang masih berlangsung serta masih berjalannya proses persetujuan RKAB beberapa smelter swasta pada triwulan II 2024 menjadi salah satu penyebab tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan.

Pada triwulan laporan LU Konstruksi juga terkontraksi, meskipun tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya. Relatif lebih baiknya kinerja LU Konstruksi dipengaruhi oleh berlanjutnya perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan alun-alun di Kabupaten



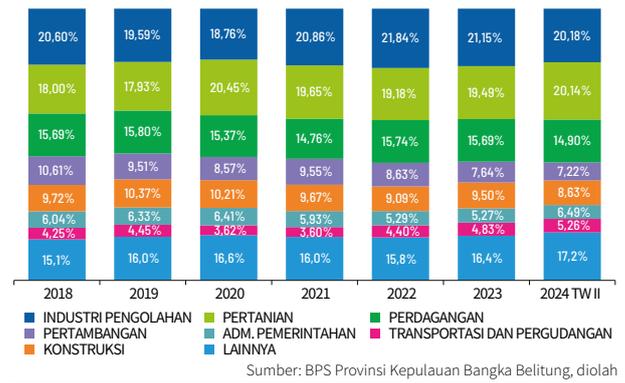
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.2 Struktur PDRB Triwulan II 2024

Bangka Barat, serta pembangunan gedung perkuliahan di Universitas Bangka Belitung. Selain itu, terkontraksinya kinerja LU Konstruksi juga tecermin dari realisasi pengadaan semen yang masih melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran, perekonomian tumbuh positif, terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya Konsumsi Rumah Tangga. Sementara itu, komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Penurunan tersebut diindikasikan terdampak oleh penurunan kinerja ekspor komoditas timah.

Momentum HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, libur sekolah tengah tahun, serta berbagai *event* besar pada triwulan II 2024 menjadi pendorong tumbuhnya konsumsi rumah tangga. Sementara itu, pencairan THR dan gaji ke-13 disertai dengan penambahan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024. Selain itu, berlanjutnya realisasi investasi turut mendorong kinerja PMTB pada triwulan II 2024. Realisasi tersebut telah mencapai 30% dari target investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024. Namun demikian, kinerja Ekspor Barang dan Jasa masih terkontraksi dipengaruhi aktivitas produksi logam timah yang masih belum normal. Meskipun demikian kinerja Ekspor Barang dan Jasa relatif lebih baik seiring bertambahnya jumlah smelter swasta yang melakukan ekspor pada triwulan II 2024. Sementara itu, kinerja Impor Barang dan Jasa masih terkontraksi namun relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.3 Distribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB tahun 2018 – Triwulan II 2024

bertambahnya impor komoditas bahan bakar mineral sebagai bahan baku untuk pengolahan logam timah.

1.1 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 didominasi oleh 5 lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Industri Pengolahan (20,18%); LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,14%); LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,90%); LU Konstruksi (8,63%); serta LU Pertambangan dan Penggalian (7,22%) (Grafik 1.2). Kelima LU tersebut memiliki pangsa 71,37% terhadap total PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selama 5 tahun terakhir, LU utama tersebut mengalami perubahan komposisi (Grafik 1.3). Industri Pengolahan menjadi sumber pertumbuhan utama seiring dengan tumbuhnya industri pengolahan logam dasar timah dan CPO sebagai komoditas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, sejak tahun 2018 tren distribusi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan harga CPO serta potensi perikanan tangkap dan budidaya yang semakin besar. Sebaliknya, tren porsi LU Pertambangan dan Penggalian cenderung menurun. Sementara itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi yang relatif stabil sejalan dengan dukungan Pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang baik, termasuk terhadap sektor UMKM. LU Konstruksi juga memberikan kontribusi yang relatif stabil, seiring dengan berlanjutnya investasi untuk pembangunan infrastruktur dan kawasan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

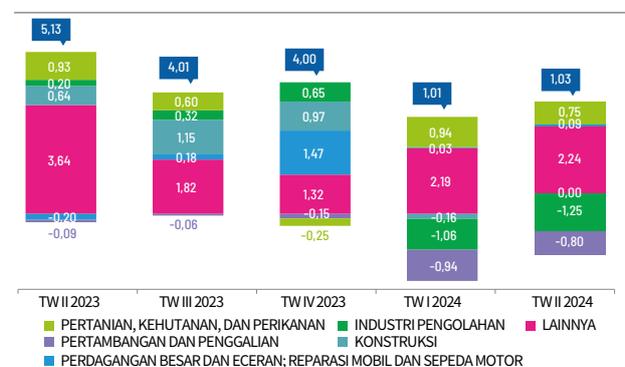
Tabel 1.1 Pertumbuhan Tahunan PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%yoy)

NO	KOMODITAS	2021				2022				2023				2024	
		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	0,81	0,62	-1,24	-2,40	0,45	-1,72	7,60	8,87	5,01	3,18	-1,28	4,91	4,04
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,58	4,19	9,01	16,21	-1,24	6,00	-0,03	-2,30	-2,27	-0,76	-0,50	-1,34	-9,08	-7,49
3	Industri Pengolahan	5,20	7,22	11,15	-1,40	-1,36	6,25	5,54	10,25	2,31	0,91	1,44	3,08	-5,12	-5,89
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,40	11,29	11,10	9,89	6,15	0,02	-4,74	-14,27	-14,89	-2,14	7,80	21,63	17,45	0,97
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	8,12	6,05	3,08	-0,01	2,20	5,83	8,04	-0,03	-0,23	0,90	1,83	7,91	5,32
6	Konstruksi	0,43	7,71	5,07	4,26	1,99	-3,90	-2,19	-0,16	2,19	7,95	14,20	11,47	-1,86	-0,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,14	6,73	6,79	9,80	16,51	15,06	10,36	2,18	-0,94	-1,32	1,22	10,51	0,20	0,61
8	Transportasi dan Pergudangan	-13,98	32,95	8,94	15,06	23,69	22,11	32,52	8,65	9,85	14,26	7,37	6,39	6,96	5,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,99	14,71	9,19	19,72	14,77	13,25	6,87	7,36	13,00	9,45	15,76	2,48	5,23	8,60
10	Informasi dan Komunikasi	13,36	8,39	4,43	9,22	8,83	9,52	12,48	8,66	10,84	13,60	15,05	15,59	17,50	12,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,36	11,17	3,37	2,73	-4,57	4,02	10,54	12,47	22,75	14,12	13,86	6,13	6,81	3,23
12	Real Estate	5,50	9,90	6,60	5,10	4,28	6,15	5,40	4,64	5,20	3,83	3,76	3,78	2,37	4,99
13	Jasa Perusahaan	-0,45	17,04	8,65	-0,25	6,24	11,31	11,57	14,71	7,93	5,02	10,00	12,23	17,41	14,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,17	9,32	-0,03	18,43	-2,91	-4,70	9,17	-5,51	6,30	23,15	-1,14	-1,24	11,54	8,79
15	Jasa Pendidikan	-16,02	0,03	0,46	29,34	16,40	-1,06	-0,84	0,77	15,85	22,49	4,07	2,42	4,42	17,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,89	25,54	25,43	5,06	-3,15	1,79	1,39	8,53	9,32	9,83	6,34	9,87	8,60	-1,01
17	Jasa lainnya	-5,20	18,39	-5,04	8,58	13,38	9,31	9,36	0,55	1,28	11,77	18,70	13,39	11,97	7,98
Pertumbuhan PDRB		0,96	6,86	6,10	6,31	3,29	5,27	4,54	4,45	4,40	5,13	4,01	4,00	1,01	1,03

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

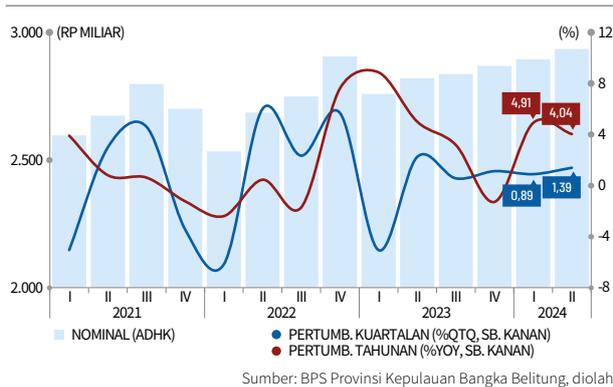
Pada triwulan laporan, sebagian besar LU tumbuh positif kecuali LU Industri Pengolahan; LU Pertambangan dan Penggalian; LU Konstruksi; serta LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Tabel 1.1). Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 didukung oleh pertumbuhan LU utamaya yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU lainnya yaitu LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Pendidikan; serta LU Informasi dan Komunikasi (Grafik 1.4). Secara tahunan, LU Pertanian memberikan andil pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2024, yaitu sebesar 0,75%, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,94%. LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan andil 0,03%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,03%. Sementara itu, LU pendukung seperti LU Administrasi Pemerintahan memberikan andil pertumbuhan

0,56%, stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Jasa Pendidikan memberikan andil 0,49% terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,12%. Adapun LU Informasi dan Komunikasi memberikan andil pertumbuhan 0,40%, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,57%.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.4 Andil Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2024



Grafik 1.5 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sementara itu, 3 LU utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan andil negatif terhadap PDRB triwulan II 2024. LU Industri Pengolahan memberikan andil pertumbuhan -1,25%, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi 1,06%. LU Pertambangan dan Penggalan memberikan andil pertumbuhan -0,80%, relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya dengan andil -0,94%. Sementara itu, LU Konstruksi relatif tidak memberikan andil pertumbuhan (0,00%), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,16%.



Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kontributor utama yang menyumbang andil pertumbuhan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 4,04% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,91% (yoy) (Grafik 1.5). Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan utamanya didorong oleh subkategori perikanan, seiring dengan peningkatan jumlah produksi perikanan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga didorong oleh subkategori perkebunan tahunan seperti produksi lada, kelapa sawit, dan karet yang turut mengalami pertumbuhan positif sehingga mendorong kinerja lebih lanjut.

Subsektor perikanan menjadi salah satu kontributor utama kinerja pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Produksi perikanan meningkat pada

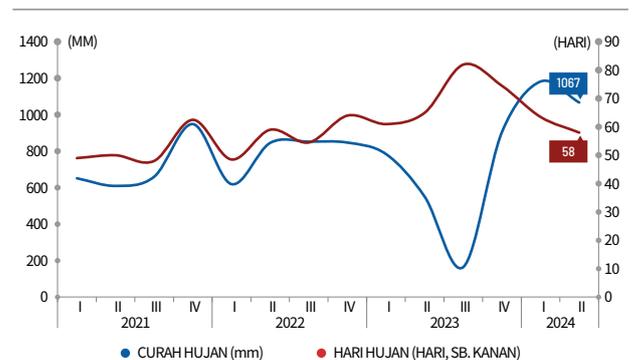
Tabel 1.2 Perkembangan Nilai dan Volume Komoditas Ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KOMODITAS	NILAI (RIBU USD)				VOLUME (TON)			
	Tw I 2024	% YOY	Tw II 2024	% YOY	Tw I 2024	% YOY	Tw II 2024	% YOY
Karet	4.506	23,83	4.151	(9,62)	2.938	9,79	2.475	(25,27)
CPO	52.149	(16,29)	47.624	11,17	62.298	(7,52)	53.178	7,00
Lada	8.050	19,30	7.607	38,24	1.316	23,19	1.174	18,86
Ikan	5.745	(8,12)	5.587	(13,57)	2.535	3,31	2.557	5,78

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

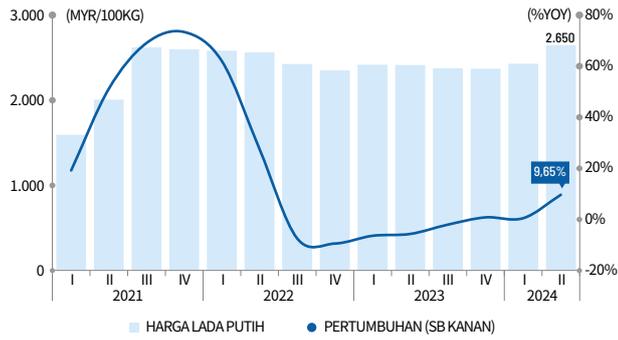
triwulan II 2024, tecermin dari volume ekspor perikanan yang meningkat 5,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 3,31% (yoy) (Tabel 1.2). Sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan potensi sumber daya perikanan, masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki preferensi terhadap ikan tangkapan laut. Selain masyarakat lokal, permintaan perikanan tangkap juga berasal dari pasar luar negeri. Malaysia menjadi negara tujuan ekspor utama komoditas perikanan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 dengan pangsa mencapai 78,51%. Selain Malaysia, terdapat beberapa negara tujuan Asia lainnya, antara lain Singapura dengan pangsa 11,68%, Vietnam dengan pangsa 8,40%, dan Hongkong dengan pangsa 1,41%. Secara umum, jenis perikanan tangkap unggulan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain cumi-cumi, rajungan, ikan selar, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Meskipun curah hujan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih cukup tinggi, namun jumlah hari hujan pada triwulan II 2024 terus melanjutkan tren penurunan sehingga mendorong potensi hasil tangkapan ikan laut nelayan lebih lanjut (Grafik 1.6).

Selain perikanan, subkategori perkebunan tahunan komoditas lada juga mendorong kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih lanjut. Hal ini tecermin dari volume ekspor lada yang tumbuh positif sebesar 18,86% (yoy) pada triwulan II 2024. Pertumbuhan tersebut



Sumber: BMKG Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan, diolah

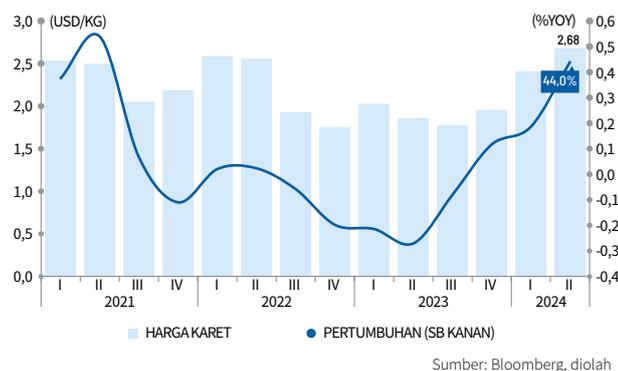
Grafik 1.6 Perkembangan Curah Hujan



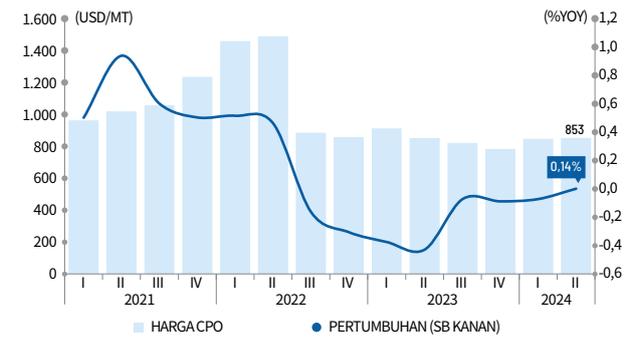
Grafik 1.7 Perkembangan Harga Lada Internasional

sejalan dengan peningkatan kinerja nilai ekspor lada yang mencapai 38,24% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,30% (yoy). Di samping itu, kenaikan harga lada pada triwulan laporan sebesar 9,65% (yoy) (Grafik 1.7), bahkan mencapai Rp140.000/kg pada bulan Juni 2024, menjadi salah satu penyebab kenaikan ekspor. Sebagai komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kenaikan harga lada tersebut menjadi angin segar bagi para petani lada untuk terus memperkuat produksi lada.

Lebih lanjut, subsektor perkebunan tahunan komoditas kelapa sawit dan *Crude Palm Oil* (CPO) juga menunjukkan perbaikan kinerja, baik volume maupun nilai ekspor tumbuh positif pada triwulan II 2024. Dari sisi volume, terdapat peningkatan ekspor CPO sebesar 7,00% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,52% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekspor CPO juga tumbuh 11,17% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,29% (yoy). Peningkatan tersebut juga didukung harga CPO internasional dengan rata-rata sebesar 853 USD/MT atau tumbuh 0,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,18% (yoy) (Grafik 1.8).



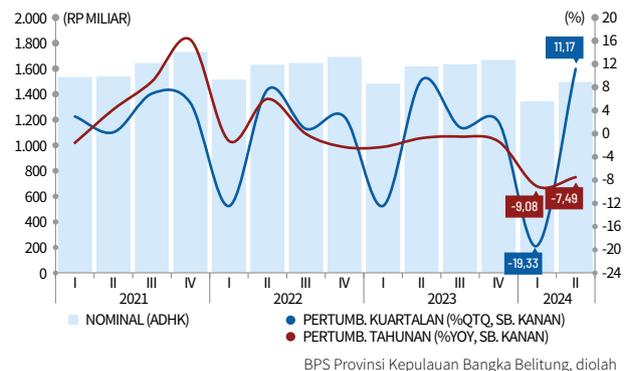
Grafik 1.9 Perkembangan Harga Karet Internasional



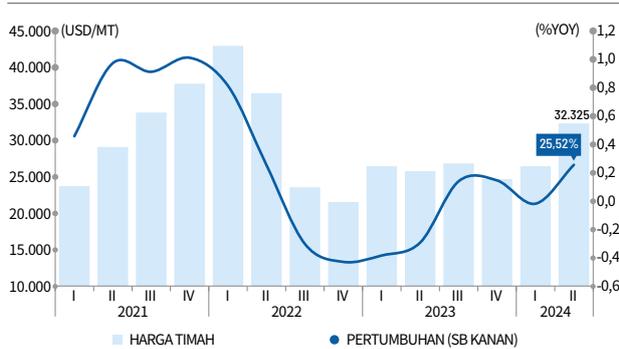
Grafik 1.8 Perkembangan Harga CPO Internasional

Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tertahan oleh kinerja komoditas karet yang belum optimal. Hal tersebut seiring dengan penurunan luas lahan produktif dampak alih fungsi lahan karet menjadi kelapa sawit. Selain itu, pada kondisi iklim basah terjadi penyakit gugur daun tanaman karet yang menahan produktivitas karet lebih lanjut. Indikasi tersebut tecermin dari kinerja ekspor komoditas karet baik secara volume maupun nilai yang tercatat kontraksi. Pada triwulan II 2024, volume ekspor karet mengalami kontraksi 25,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,79% (yoy). Secara nilai, ekspor karet juga terkontraksi 9,62% (yoy), meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,83% (yoy). Hal ini seiring dengan kenaikan harga karet internasional sebesar 44,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,59% (yoy) (Grafik 1.9). Kenaikan tersebut seiring dengan berkurangnya ketersediaan bahan baku di sejumlah negara penghasil produk karet dan turunannya.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalan terkontraksi 7,49% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 9,08% (yoy) (Grafik 1.10). Perbaikan kinerja

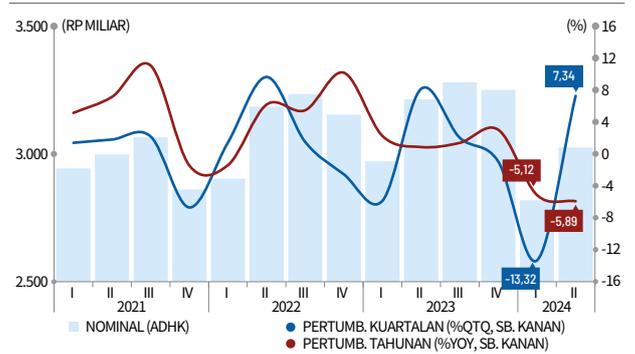


Grafik 1.10 Kinerja LU Pertambangan dan Penggalan



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.11 Perkembangan Harga Timah Internasional



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.12 Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan



LU Pertambangan dan Penggalian tersebut utamanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah smelter swasta yang memperoleh persetujuan RKAB dan melakukan kegiatan penambangan pada triwulan II 2024. Meskipun demikian, terkontraksinya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian turut dipengaruhi oleh aktivitas produksi yang masih belum normal dampak praktik tambang inkonvensional (TI). Kedepannya, Pemerintah Daerah dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penurunan kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian secara tidak langsung mempengaruhi harga timah internasional. Sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok pada tahun 2023, Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pasokan timah global, yang didominasi bersumber dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terbatasnya pasokan timah dunia dari Indonesia pada semester I 2024 mendorong kenaikan harga timah internasional. Pada triwulan II 2024, rata-rata harga timah internasional sebesar 32.325 USD/MT atau meningkat 25,52% (yoy) (Grafik 1.11).

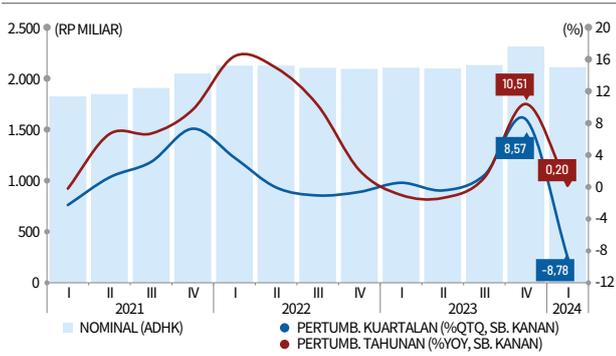
Ke depan, komoditas logam timah memiliki prospek yang baik seiring dengan tren penggunaan kendaraan listrik yang terus meningkat. Kesadaran akan penggunaan *renewable energy* untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan

pada 8 Agustus 2019 diperkirakan akan membutuhkan sumber daya timah yang cukup tinggi. Hal ini seiring dengan kebutuhan timah hingga 2 kg sebagai salah satu komponen penting dalam mobil listrik. Selain itu, permintaan timah dunia sebagai logam *solder* juga terus tumbuh, seiring dengan meningkatnya prospek usaha produk *chip* di pasar global.



Kinerja LU Industri Pengolahan masih melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2024, kinerja LU Industri Pengolahan terkontraksi 5,89% (yoy), melanjutkan tren sejak triwulan sebelumnya yang juga terkontraksi 5,12% (yoy) (Grafik 1.12). Subkategori industri logam dasar memiliki pangsa terbesar dalam LU Industri Pengolahan. Pada triwulan laporan, subkategori industri logam dasar yang ditopang oleh logam timah mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komoditas timah mengalami penurunan volume dan nilai ekspor pada triwulan II 2024. Secara tahunan, volume ekspor timah terkontraksi 54,96% (yoy) (Grafik 1.26), dengan nilai ekspor yang juga terkontraksi 43,72% (yoy) (Grafik 1.27). Kondisi ini turut dipengaruhi aktivitas produksi logam timah yang masih belum normal. Proses hukum tata kelola dan tata niaga timah yang masih berlangsung serta masih berjalannya proses persetujuan RKAB milik beberapa smelter swasta pada triwulan II 2024 menjadi beberapa penyebab tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan. Meskipun demikian kinerja



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

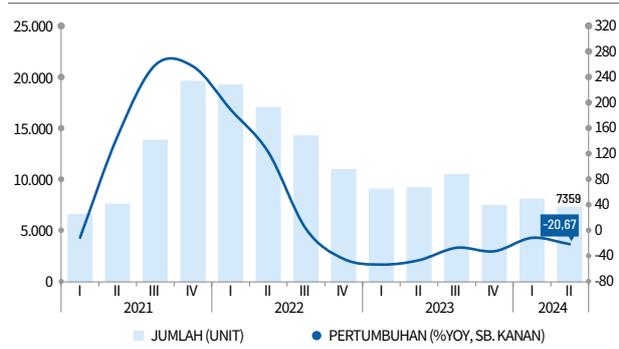
Grafik 1.13 Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

LU Industri Pengolahan mengalami perbaikan secara triwulanan. Bertambahnya jumlah smelter swasta yang melakukan ekspor pada triwulan II 2024 mendorong kinerja volume ekspor yang lebih tinggi secara triwulanan, yaitu sebesar 206,03% (qtq).



Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan II 2024, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 0,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,20% (yoy) (Grafik 1.13). Perayaan HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, serta momentum libur sekolah tengah tahun turut mendorong konsumsi masyarakat yang tinggi pada triwulan laporan. Disamping itu, berbagai event besar, baik skala nasional maupun lokal, juga dilaksanakan selama triwulan II 2024 turut mendukung kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, antara lain Belitong Chinese International Festival (BCIF), Begagil Bangka Festival, MADAFEST 2024, Festival Tujuh Likur, Bangka Belitong International Marathon, dan berbagai event besar lainnya. Lebih lanjut, volume barang yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melanjutkan peningkatan. Hal tersebut terindikasi dari maraknya keberadaan ritel modern dan lokal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, impor barang modal (*capital goods*) dan impor barang antara (*intermediary goods*) juga relatif mengalami perbaikan pada triwulan II 2024 jika dibandingkan triwulan

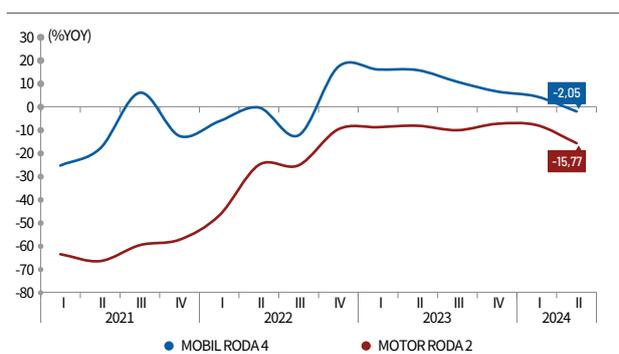


Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.14 Perkembangan Jumlah Pendaftaran Kendaraan Baru

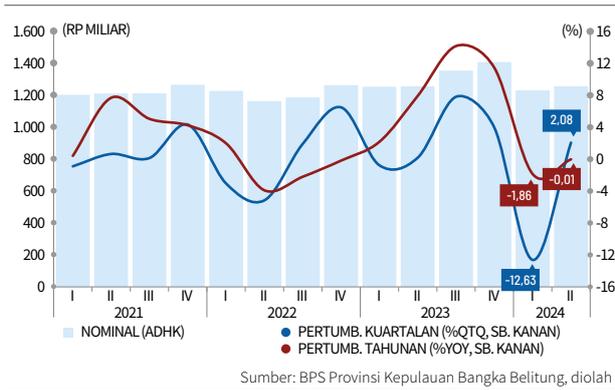
sebelumnya. Pada triwulan laporan, impor barang modal masih terkontraksi 54,80% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 85,99% (yoy). Hal ini seiring dengan bertambahnya barang impor untuk mesin pembangkit listrik. Sementara itu, impor barang antara masih terkontraksi 76,96% (yoy), namun relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 89,95% (yoy). Hal ini seiring dengan bertambahnya barang impor jenis batu bara sebagai bahan baku industri pengolahan.

Namun demikian, kinerja pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tertahan seiring penurunan jumlah pendaftaran kendaraan baru. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah pendaftaran kendaraan baru untuk roda 2 dan roda 4 pada triwulan II 2024 sebanyak 7.359 atau terkontraksi 20,67% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 10,82% (yoy) (Grafik 1.14). Hal ini juga tecermin dari pertumbuhan kredit kendaraan bermotor baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang masing-masing terkontraksi 2,05% (yoy) dan 15,77% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Grafik 1.15).



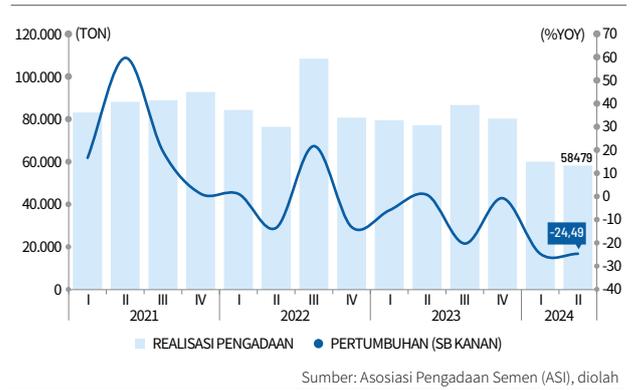
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.15 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga (RT) Kendaraan Bermotor



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.16 Pertumbuhan Lapangan Usaha Konstruksi



Sumber: Asosiasi Pengadaan Semen (ASI), diolah

Grafik 1.17 Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen



LU Konstruksi pada triwulan II 2024 terkontraksi 0,01% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 1,86% (yoy) (Grafik 1.16). Membaiknya kinerja LU Konstruksi dipengaruhi oleh berlanjutnya perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan alun-alun di Kabupaten Bangka Barat, serta pembangunan gedung perkuliahan di Universitas Bangka Belitung. Berdasarkan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa perbaikan jalan dilaksanakan pada triwulan II 2024 antara lain pelebaran jalan Simpang Empat (Sijuk) – Buding dan pelebaran Jalan Parit Tiga – Tanjung Ru. Selain itu, berbagai program pengelolaan sumber daya air (SDA) juga dilaksanakan, antara lain operasi dan pemeliharaan sungai, pembangunan embung dan penampung air lainnya, pembangunan tanggul sungai, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.

Secara umum kinerja LU Konstruksi mengalami kontraksi pada tahun 2024 seiring dengan alokasi anggaran yang lebih tinggi pada tahun 2023 melalui Instruksi

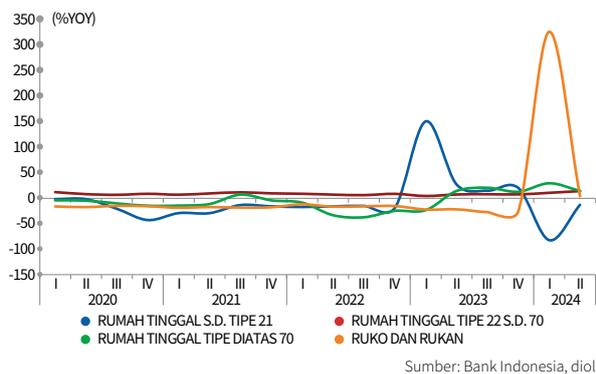
Presiden (Inpres) untuk pembangunan jalan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, terkontraksinya kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari realisasi pengadaan semen yang masih melanjutkan kontraksi dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, realisasi pengadaan semen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 58.479 ton atau terkontraksi 24,49% (yoy), stabil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 60.235 ton atau terkontraksi 24,48% (yoy) (Grafik 1.17).

Penurunan kinerja LU Konstruksi juga tercermin dari tingkat pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan untuk rumah tangga (RT), yaitu kredit kepemilikan rumah. Kredit RT untuk kepemilikan rumah tinggal tipe 21 terkontraksi sebesar 12,80% (yoy), meskipun tidak sedalam kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 82,13% (yoy) (Grafik 1.18). Meskipun demikian, kredit RT untuk rumah tinggal tipe 22 s.d. 70, rumah tinggal tipe diatas 70, dan kepemilikan rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) tumbuh positif.

1.2 PDRB MENURUT PENGELUARAN

Pada triwulan laporan, perekonomian tumbuh positif pada komponen pengeluaran, terutama ditopang oleh permintaan domestik, khususnya Konsumsi Rumah Tangga (Tabel 1.3). Sementara itu, komponen Ekspor Barang dan Jasa, serta komponen Impor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pada triwulan laporan. Penurunan tersebut diindikasikan terdampak oleh penurunan kinerja ekspor komoditas timah.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.18 Pertumbuhan Kredit Kepemilikan Tempat Tinggal

Tabel 1.3 Pertumbuhan Tahunan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (% yoy)

KOMPONEN	2021				2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw I	Tw II
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,21	4,68	3,69	4,78	5,85	4,92	5,65	3,60	3,01	1,87	3,75	4,35	4,37	2,98
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,02	2,26	2,08	-0,41	3,92	4,63	5,58	4,31	3,81	5,05	1,04	12,16	17,00	7,49
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-6,85	7,28	0,87	4,27	-3,16	-0,97	2,87	8,76	8,33	3,18	0,08	11,07	17,32	3,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,83	6,24	2,63	7,26	6,54	0,56	2,89	3,39	1,91	5,35	8,01	4,17	-0,35	0,12
5. Ekspor Barang dan Jasa	0,96	67,63	58,16	59,92	10,38	24,20	-13,57	-18,26	-30,79	-18,48	-14,99	-8,19	-37,84	-34,52
6. Impor Barang dan Jasa	-3,92	88,39	76,72	74,52	16,13	23,36	-19,30	-24,65	-48,30	-28,10	-21,20	-10,00	-57,48	-47,26
Produk Domestik Regional Bruto	0,96	6,86	6,10	6,31	3,29	5,27	4,54	4,45	4,40	5,13	4,01	4,00	1,01	1,03

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

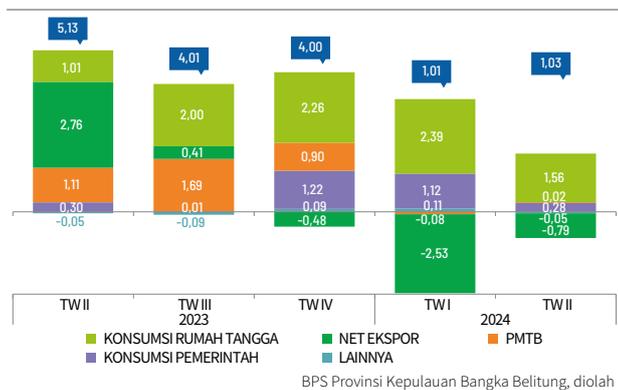
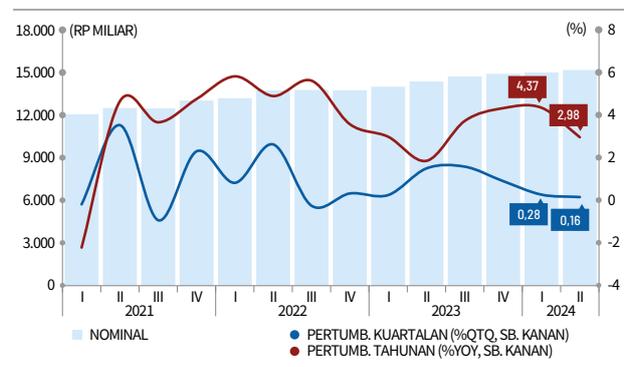
Berdasarkan pengeluaran, komponen Konsumsi Rumah Tangga memiliki porsi terbesar dalam PDRB yaitu 56,21% dan memberikan andil 1,56% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dengan andil 2,39% (yoy) (Grafik 1.19). Komponen Konsumsi Pemerintah memberikan andil 0,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,12% (yoy). Lebih lanjut, PMTB memberikan andil positif terhadap perekonomian triwulan II 2024 sebesar 0,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,08%. Sementara itu, komponen Net Ekspor mencatatkan andil -0,79% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar -2,53% (yoy).

Bangka Belitung. Kinerja Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 2,98% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,37% (yoy) (Grafik 1.20). Tetap tumbuhnya Konsumsi Rumah Tangga ditopang oleh konsumsi dan mobilitas masyarakat serta lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri dan Idul Adha 1445 H, serta momen libur sekolah tengah tahun. Disamping itu, pertumbuhan positif kinerja Konsumsi Rumah Tangga turut didorong oleh adanya pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 PNS/ASN pada triwulan II 2024.

Berbagai *event* besar, baik skala nasional maupun lokal, juga dilaksanakan selama triwulan II 2024 turut mendukung pertumbuhan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Beberapa *event* sepanjang triwulan laporan antara lain: Belitong Chinese International Festival (BCIF) (1 – 4 April 2024) di Kabupaten Belitong bertepatan dengan perayaan Ceng Beng yang merupakan tradisi ziarah makam leluhur warga Tionghoa; Begagil Bangka Festival (10 – 12 Mei 2024) di Kota Pangkalpinang mencakup pertunjukan musik, kegiatan olahraga, dan pameran produk kreatif; MADAFEST 2024 (29 – 30 Juni

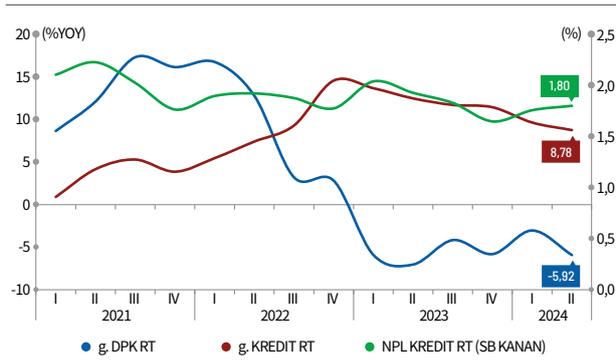


Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan II 2024 tetap tumbuh positif dan memberikan andil tertinggi terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan


Grafik 1.19 Andil Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.20 Perkembangan Konsumsi Rumah Tangga



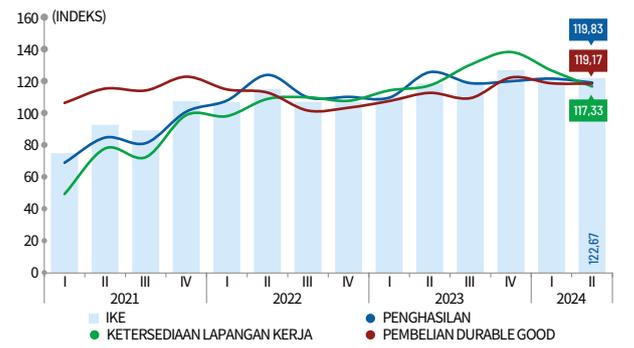
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.21 Pertumbuhan DPK, Kredit dan NPL Rumah Tangga (RT)

2024) yang merupakan festival tahunan di Kabupaten Bangka menampilkan pertunjukan musik dan seni; Festival Tujuh Likur (7 April 2024) di Kabupaten Bangka Barat untuk merayakan tradisi menyambut Idul Fitri; Bangka Belitung International marathon (17 Juni 2024) di Kabupaten Belitung; dan berbagai *event* besar lainnya.

Meskipun tumbuh positif, kinerja Konsumsi Rumah Tangga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan kepada rumah tangga yang juga melambat. Pada triwulan II 2024, kredit/pembiayaan rumah tangga tumbuh 8,78% (yoy) pada triwulan II 2024, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,67% (yoy) (Grafik 1.21). Namun demikian, risiko kredit/*Non Performing Loan* (NPL) kredit rumah tangga pada triwulan II 2024 masih terjaga sebesar 1,80%. Sejalan dengan penurunan kredit rumah tangga, penghimpunan DPK rumah tangga pada triwulan II 2024 berkontraksi 5,92% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,03% (yoy).

Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, ekspektasi konsumen pada triwulan II 2024 tetap berada pada level optimis (lebih dari 100) namun termoderasi sebesar 122,67, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 123,00 (Grafik 1.22). Penurunan tersebut utamanya bersumber dari penurunan komponen ketersediaan lapangan kerja dari 127,33 pada triwulan I 2024 menjadi 117,33 pada triwulan II 2024. Kondisi ini sejalan dengan penutupan smelter timah swasta dan pabrik kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdampak pada dirumahnya sejumlah pekerja sektor tambang dan industri pengolahan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

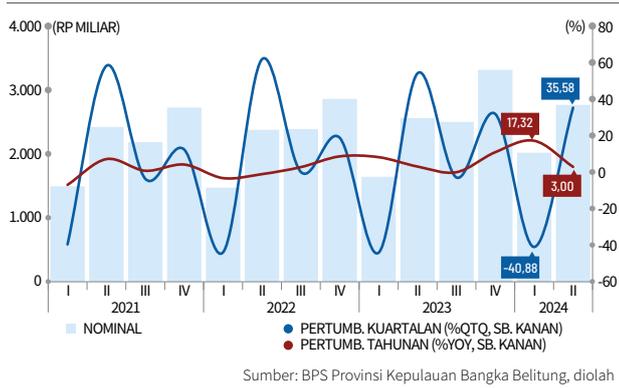
Grafik 1.22 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Saat Ini (IKE)



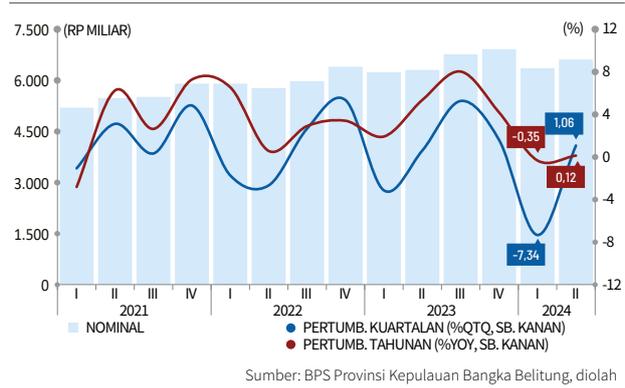
Kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2024 tetap tumbuh positif 3,00% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,32% (yoy) (Grafik 1.23). Tetap tumbuhnya kinerja Konsumsi Pemerintah didorong oleh meningkatnya realisasi anggaran pemerintah untuk belanja pegawai, yaitu pencairan THR dan gaji ke-13 PNS/ASN. Peningkatan realisasi belanja pegawai tersebut juga diikuti dengan penambahan pegawai baru pada PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) baru di lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga pembayaran gaji dan tunjangan meningkat signifikan.

Disamping itu, belanja barang tetap tumbuh untuk mendukung penyelenggaraan persiapan Pilkada pada akhir tahun 2024. Adapun belanja modal disumbang utamanya oleh Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) dalam rangka preservasi jalan dan jembatan serta pembangunan gedung perkuliahan di Universitas Bangka Belitung. Lebih lanjut, realisasi belanja bansos juga masih berlanjut utamanya untuk pembayaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Meskipun demikian, melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah dipengaruhi penurunan penerimaan pajak seiring terbatasnya aktivitas beberapa perusahaan sektor timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, pendapatan asli daerah juga belum mencapai target hingga semester I 2024. Kondisi ini disebabkan



Grafik 1.23 Perkembangan Konsumsi Pemerintah



Grafik 1.24 Perkembangan PMTB

keterbatasan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), penurunan jumlah kendaraan baru, pajak BBM, dan pajak air permukaan (PAP). Terkontraksinya jumlah kendaraan baru menyebabkan pajak kendaraan baru tidak terpungut. Untuk mengantisipasi defisit anggaran, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan prioritas belanja.

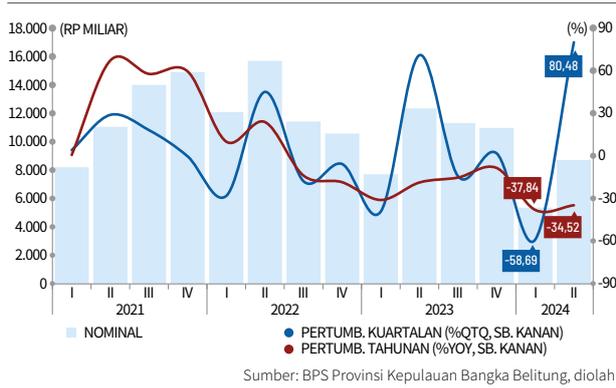


Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan II 2024 tumbuh 0,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 0,35% (yoy) (Grafik 1.24). Pertumbuhan PMTB pada triwulan II 2024 sejalan dengan berlanjutnya realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, realisasi investasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang triwulan II 2024 mencapai Rp7,6 triliun, meningkat di triwulan yang sama pada tahun 2023 yang mencapai Rp6,3 Triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 30% dari target investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024, yaitu Rp25,06 triliun. Adapun 3 sektor penyumbang investasi terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sektor pertambangan; sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; serta sektor industri makanan. Berdasarkan lokasi, Kota Pangkalpinang menjadi wilayah dengan sebaran investasi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipengaruhi kinerja PT Timah yang kantor pusatnya

berlokasi di Kota Pangkalpinang. Berlanjutnya investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga didukung oleh pertumbuhan kredit, khususnya dari komponen kredit investasi. Pada triwulan II 2024, kredit investasi tumbuh 26,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 24,47% (yoy). Selain itu, pangsa kredit investasi juga semakin bertambah jika dibandingkan dengan pangsa kredit investasi dan kredit konsumsi.

DPMPSTP senantiasa berupaya mendorong investasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui program strategis Ngobrol Perihal Perizinan (Ngopi), DPMPSTP memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memperoleh perizinan investasi atau penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Jangka waktu proses pengurusan perizinan menjadi lebih terukur karena dilakukan berbasis digital dan terintegrasi. Adapun salah satu sasaran utama program Ngopi adalah UMKM yang belum mengetahui cara mendaftar NIB melalui sistem *online*.

Ke depan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular. Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melakukan pembangunan proyek Pelabuhan Mantung Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka dan Pelabuhan Bakit Kecamatan Parittiga di Kabupaten Bangka Barat yang berpotensi mendorong kinerja LU PMTB lebih lanjut. Disamping itu, sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang

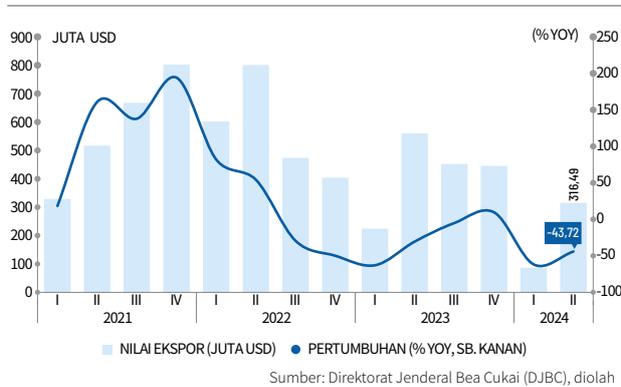


Grafik 1.25 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

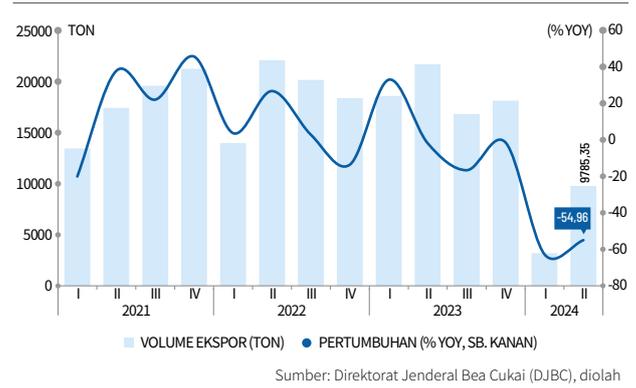
Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044, diharapkan dapat mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bangka Belitung yang mempunyai peran strategis dalam pengembangan pariwisata nasional. Melalui Perpres ini, akan dilakukan pembangunan dan pengembangan investasi pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga berpotensi mendorong kinerja PMTB lebih lanjut.



Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 terkontraksi 34,52% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 37,84% (yoy) (Grafik 1.25). Perbaikan kinerja ekspor tersebut utamanya disebabkan oleh bertambahnya volume ekspor timah dari 3.198 MT pada triwulan I 2024 menjadi 9.785 MT pada triwulan II 2024. Hal ini didorong bertambahnya



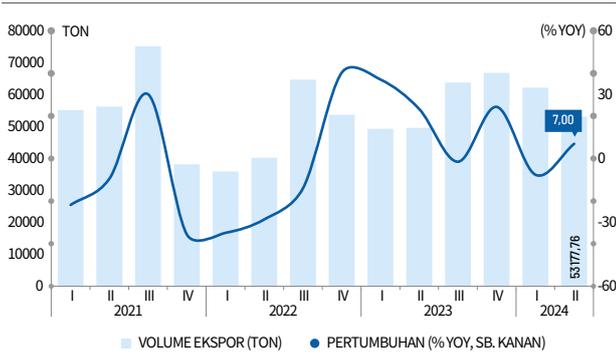
Grafik 1.27 Perkembangan Nilai Ekspor Timah



Grafik 1.26 Perkembangan Volume Ekspor Timah

jumlah smelter swasta yang melakukan ekspor pada triwulan II 2024. Dengan demikian, total volume ekspor timah selama semester I 2024 sebesar 12.983 MT. Adapun logam timah sepanjang triwulan II 2024 utamanya diekspor ke India dengan pangsa 36,92%, diikuti Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, dan Taiwan. Meskipun demikian, kinerja volume ekspor timah secara tahunan masih mengalami kontraksi sebesar 54,96% (yoy) (Grafik 1.26). Kondisi ini turut dipengaruhi aktivitas produksi logam timah yang masih belum normal. Proses hukum tata kelola dan tata niaga timah yang masih berlangsung serta masih berjalannya proses persetujuan RKAB milik beberapa smelter swasta pada triwulan II 2024 menjadi penyebab tertahannya Ekspor Barang dan Jasa. Nilai ekspor timah juga masih terkontraksi 43,72% (yoy), meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 61,57% (yoy) (Grafik 1.27). Perbaikan nilai ekspor timah pada triwulan II 2024 juga didukung tumbuhnya kinerja harga timah yang mencapai 25,52% (yoy) atau 32.325 USD/MT. Rendahnya pasokan timah global, termasuk dari Indonesia dan Tiongkok, berdampak pada kenaikan harga timah global.

Selain timah, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan laporan didorong oleh kinerja ekspor beberapa jenis komoditas perkebunan serta perikanan. Ekspor komoditas CPO tumbuh positif pada triwulan laporan. Dari sisi volume, terdapat peningkatan ekspor CPO sebesar 7% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,52% (yoy) (Grafik 1.28). Sejalan dengan hal tersebut, nilai ekspor CPO juga tumbuh 11,17% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 16,29% (yoy) (Grafik 1.29). Negara

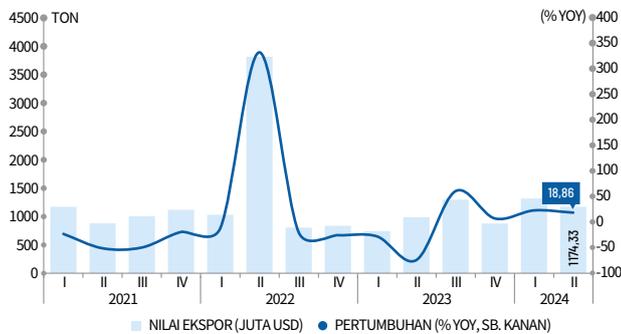


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.28 Perkembangan Volume Ekspor CPO

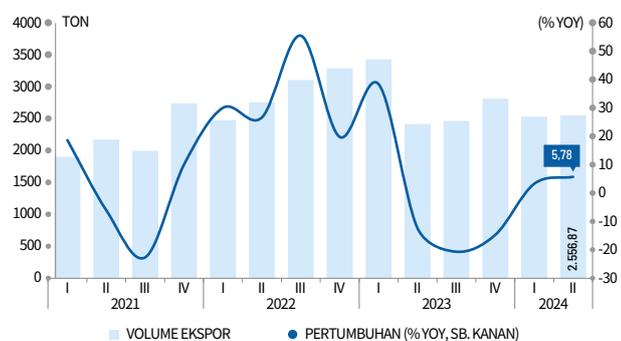
tujuan ekspor komoditas CPO yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi Tiongkok dengan pangsa 73,53%, India dengan pangsa 17,41%, serta Myanmar dan Vietnam dengan pangsa yang sama yaitu masing-masing 4,53%.

Disamping itu, volume ekspor lada juga masih tumbuh positif sebesar 18,86% (yoy) pada triwulan II 2024 (Grafik 1.30). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja nilai ekspor lada yang mencapai 38,24% (yoy) pada triwulan laporan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,30% (yoy) (Grafik 1.31).



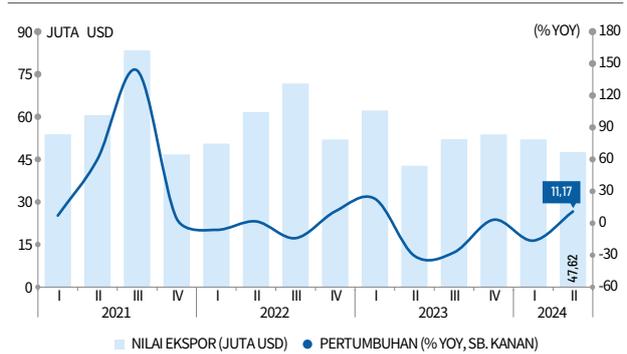
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.30 Perkembangan Volume Ekspor Lada



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.32 Perkembangan Volume Ekspor Perikanan

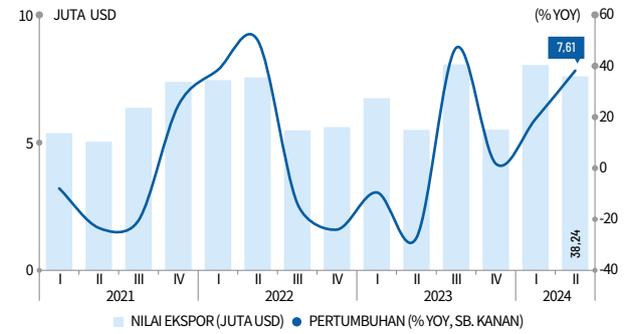


Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.29 Perkembangan Nilai Ekspor CPO

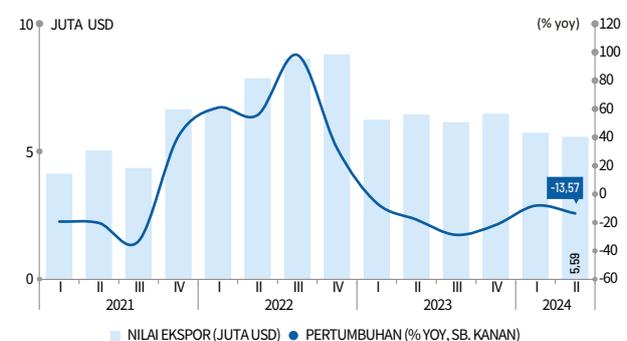
Komoditas perikanan turut mencatatkan kinerja ekspor yang positif. Dari sisi volume ekspor terdapat peningkatan pertumbuhan sebesar 5,78% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 sebesar 3,31% (yoy) (Grafik 1.32). Secara umum, komoditas perikanan pada triwulan II 2024 utamanya diekspor ke Malaysia dengan pangsa 78,51%, diikuti Singapura dan Vietnam dengan pangsa berturut-turut sebesar 11,68% dan 8,40%.

Meskipun demikian, kinerja Ekspor Barang dan Jasa tertahan seiring dengan terkontraksinya ekspor komoditas karet, baik secara volume maupun nilai.



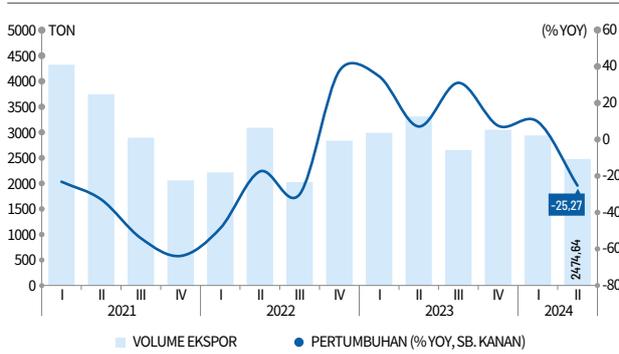
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.31 Perkembangan Nilai Ekspor Lada



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.33 Perkembangan Nilai Ekspor Perikanan



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.34 Perkembangan Volume Ekspor Karet

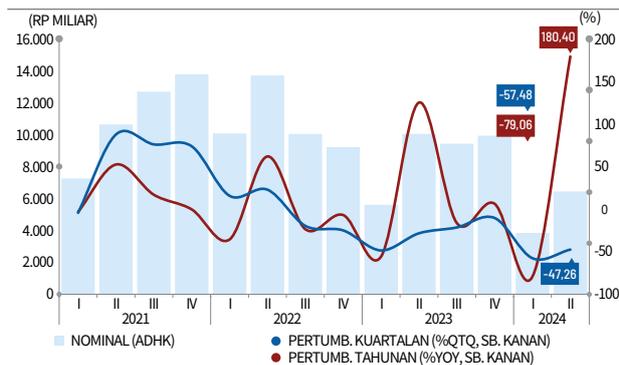
Pada triwulan II 2024, volume ekspor karet mengalami kontraksi 25,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,79% (yoy) (Grafik 1.34). Secara nilai, ekspor karet juga berkontraksi 9,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,83% (yoy) (Grafik 1.35).



Impor Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 berkontraksi 47,26% (yoy), relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 57,48% (yoy) (Grafik 1.36). Pada triwulan laporan, impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya merupakan impor komoditas nonmigas senilai 1,45 juta USD (Grafik 1.37). Adapun sebagian besar komoditas yang diimpor adalah bahan bakar mineral dengan pangsa 60,73% serta mesin/pesawat mekanik dengan pangsa 39,23% (Grafik 1.38).

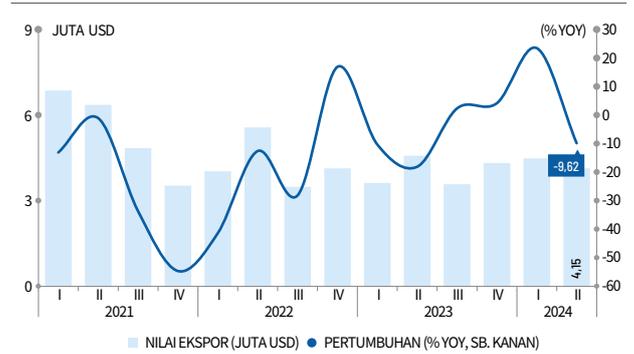
Sejalan dengan berlanjutnya proses pengolahan logam timah pada triwulan II 2024, kinerja impor mengalami perbaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh

bertambahnya impor komoditas bahan bakar mineral sebagai bahan baku untuk pengolahan logam timah. Meskipun demikian, secara tahunan kinerja Impor Barang dan Jasa masih mengalami kontraksi seiring dengan turunnya impor komoditas barang modal seperti bahan bakar mineral, mesin-mesin/pesawat mekanik, serta mesin/peralatan lisrik. Penurunan Impor Barang dan Jasa tersebut dipengaruhi oleh Ekspor Barang dan Jasa yang juga masih berkontraksi, seiring tertahannya ekspor komoditas timah dampak produksi logam timah yang masih belum normal. Secara umum, neraca ekspor impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu positif karena nilai impor barang dan jasa lebih rendah dibandingkan ekspor barang dan jasa.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

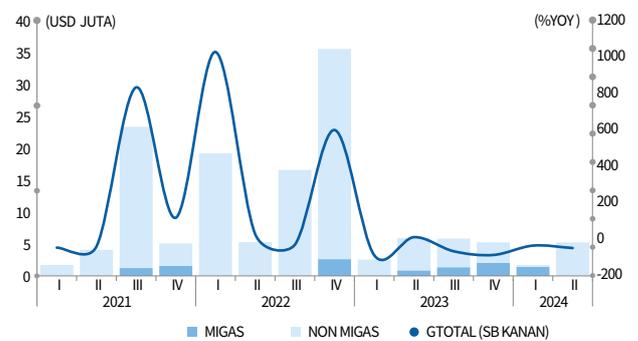
Grafik 1.36 Perkembangan Impor Barang dan Jasa



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

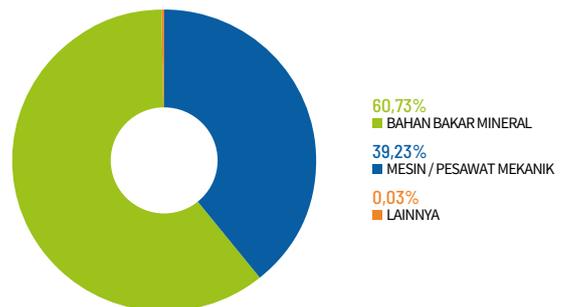
Grafik 1.35 Perkembangan Nilai Ekspor Karet

bertambahnya impor komoditas bahan bakar mineral sebagai bahan baku untuk pengolahan logam timah. Meskipun demikian, secara tahunan kinerja Impor Barang dan Jasa masih mengalami kontraksi seiring dengan turunnya impor komoditas barang modal seperti bahan bakar mineral, mesin-mesin/pesawat mekanik, serta mesin/peralatan lisrik. Penurunan Impor Barang dan Jasa tersebut dipengaruhi oleh Ekspor Barang dan Jasa yang juga masih berkontraksi, seiring tertahannya ekspor komoditas timah dampak produksi logam timah yang masih belum normal. Secara umum, neraca ekspor impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu positif karena nilai impor barang dan jasa lebih rendah dibandingkan ekspor barang dan jasa.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 1.37 Perkembangan Nilai Impor



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), diolah

Grafik 1.38 Pangsa Barang Impor

BOKS 1

Explore Babel 2024: Dorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Melalui UMKM dan Pariwisata



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B1.1 Opening Ceremony Explore Babel, Juni 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Explore Babel 2024. Kegiatan ini hadir sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), Karya Kreatif Indonesia (KKI), dan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI). Explore Babel 2024 merupakan wadah untuk mengeksplorasi pariwisata, UMKM, dan kuliner dalam rangka meningkatkan peran UMKM dan pariwisata serta mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi keuangan digital di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di tengah berbagai tantangan dan dinamika komoditas

timah, Negeri Serumpun Sebalai memiliki anugerah keindahan alam dan keunikan budaya, didukung kekuatan toleransi dan persatuan sebagai potensi unggulan Bangka Belitung yang dapat dikelola dengan kekuatan sinergi kolaborasi. Mengusung tema “BESAOH Wujudkan Negeri Serumpun Sebalai yang BERTUAH”, Explore Babel 2024 diharapkan mampu mendorong semangat sinergi dan gotong royong dalam membangun perekonomian untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berkelanjutan, Transformatif, Unggul, Maju, dan Harmonis. Rangkaian Explore Babel 2024 dilaksanakan pada 27 Mei – 2 Juni 2024 di Pangkalpinang yang meliputi kegiatan *Side Event* berupa 101 Workshop Series (27 Mei – 1 Juni 2024), *Opening Ceremony*, *Exhibition* UMKM, *Penyediaan Layanan Publik*

berupa Konsultasi HAKI, UMKM, QRIS, Perbankan dan Penukaran Uang, serta Operasi Pasar Murah.

Kegiatan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A. dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta dihadiri oleh Pj. Gubernur Bangka Belitung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pimpinan FORKOPIMDA, beserta instansi terkait lainnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu kawasan wisata di Indonesia yang memiliki magnet tersendiri dan pesona yang memukau bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Potensi unggul tersebut diperkuat dengan percepatan dan perluasan digitalisasi yang terus dipacu. Transaksi non tunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus tumbuh signifikan, khususnya QRIS dengan nominal transaksi yang tumbuh 100,22% (yoy) pada Maret 2024. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh jumlah *merchant* QRIS sebesar 153.459 dan pengguna QRIS sebesar 184.449. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangkitkan akselerasi digital dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, salah satunya melalui Explore Babel 2024 yang menjadi simbol optimisme dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam pembukaan Explore Babel turut dilaksanakan beberapa seremoni, yaitu penyerahan pembiayaan kepada UMKM sebagai dukungan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; *launching* Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan QRIS Dinamis untuk pembayaran pajak/retribusi daerah yang merupakan perwujudan kerjasama dan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Perbankan yang tergabung di dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD); serta penyerahan Beasiswa Bank Indonesia kepada Perguruan Tinggi Universitas Bangka Belitung dan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sebagai wujud

komitmen Bank Indonesia dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dan indeks pembangunan manusia di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Explore Babel 2024 menghadirkan beberapa rangkaian kegiatan, antara lain 101 *Workshop Series* yang terdiri dari 43 sesi, diikuti oleh 783 peserta dengan sesi meliputi monetisasi media sosial, penguatan kelembagaan koperasi, pelatihan barista, pelatihan *hospitality* pariwisata, pelatihan hilirisasi cabai olahan, *training of trainers* sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan (SIAPIK), sosialisasi HAKI, *onboarding* QRIS bagi UMKM, bimbingan teknis *digital farming* budidaya air tawar, seminar kewirausahaan mahasiswa, pelatihan pengolahan coklat, dan *onboarding* UMKM mitra Bank Indonesia yang dilaksanakan pada 27 Mei - 2 Juni 2024. Puncak kegiatan Explore Babel 2024 berlangsung di Alun-Alun Taman Merdeka pada 2 Juni 2024 yang turut diramaikan 150 pameran UMKM serta rangkaian layanan publik untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, layanan konsultasi UMKM, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), layanan perbankan, penukaran uang, dan QRIS *experience*.



Foto : Jembatan Emas, Bangka.

BAB 2

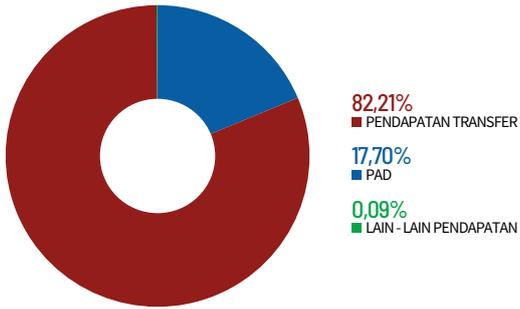
KEUANGAN PEMERINTAH

Pada triwulan II 2024, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp4,42 triliun atau tumbuh 6,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi tersebut setara dengan 46,95% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp3,95 triliun atau setara dengan 36,98% dari pagu. Secara tahunan, realisasi belanja daerah tersebut tumbuh 3,97% (yoy). Sementara realisasi belanja APBN kementerian/lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,52 triliun atau setara dengan 45,50% dari pagu.



*terhadap Pagu 2023

**terhadap Pagu 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

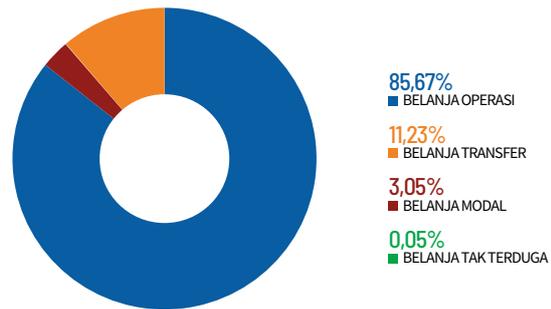
Grafik 2.1 Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kab/ Kota di Bangka Belitung Triwulan II 2024

2.1 GAMBARAN UMUM

Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 mencapai Rp4,42 triliun atau setara dengan 46,95% dari pagu atau alokasi anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut tumbuh 6,80% (yoy) dibandingkan realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2023 yang mencapai Rp4,14 triliun. Realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi pada triwulan II 2024 tumbuh 2,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan kabupaten/kota yang tumbuh 8,69% (yoy) pengaruh perbaikan kinerja realisasi pendapatan transfer di semua kabupaten/kota.

Realisasi belanja fiskal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 mencapai Rp5,47 triliun atau setara dengan 39,01% dari pagu. Realisasi tersebut tumbuh 8,32% (yoy) dibandingkan realisasi belanja daerah pada triwulan II 2023 yang mencapai Rp5,05 triliun. Realisasi belanja daerah pada triwulan II 2024 meliputi Rp1,14 miliar APBD provinsi, Rp2,81 triliun APBD kabupaten/kota, dan Rp1,52 triliun APBN K/L. Realisasi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada triwulan laporan masing-masing tumbuh 5,76% (yoy) dan 43,26% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja APBN K/L pada triwulan laporan tumbuh 21,47% (yoy).

Berdasarkan pangsa, total realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada triwulan II 2024 masih didominasi oleh komponen pendapatan transfer sebesar 82,21%, disusul pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 17,70%, dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,09% (Grafik 2.1). Total realisasi komponen pendapatan transfer tingkat provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp3,63 triliun pada triwulan II 2024. Adapun total



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kab/Kota di Bangka Belitung Triwulan II 2024

realisasi komponen PAD tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada triwulan II 2024 sebesar Rp782,35 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan baik di tingkat provinsi sebesar 13,48% (yoy), serta menurun di tingkat kabupaten/kota yang tumbuh 0,63% (yoy). Sementara itu, realisasi lain-lain pendapatan daerah pada triwulan II 2024 mencapai Rp3,83 miliar atau setara dengan 0,09% dari pagu. Namun demikian, Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan PAD, antara lain mengajukan kenaikan royalti timah kepada pemerintah pusat dan memaksimalkan pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan inovasi Program Samsat Keliling dan Samsat Setempoh (*door to door*) di berbagai kabupaten/kota.

Dari sisi belanja daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pangsa realisasi belanja daerah pada triwulan II 2024 didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar 85,67%, disusul belanja transfer sebesar 11,23%, belanja modal sebesar 3,05%, dan belanja tak terduga sebesar 0,05% (Grafik 2.2). Pada triwulan II 2024, total realisasi komponen belanja operasi sebesar Rp3,38 triliun, belanja transfer sebesar Rp443,32 miliar, belanja modal sebesar Rp120,28 miliar, dan belanja tak terduga sebesar Rp2,07 miliar. Lebih lanjut ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah triwulan II 2024 tertera pada Tabel 2.1.

Pagu pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp9,41 triliun, meliputi pendapatan APBD provinsi sebesar Rp2,56 triliun dan pendapatan APBD kabupaten/kota

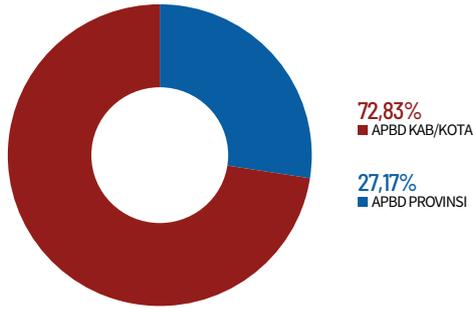
Tabel 2.1 Ringkasan Pagu dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024

NO	KOMODITAS	ANGGARAN 2023 (RP MILIAR)	TW II 2023		PERTUMBUHAN (YOY)	ANGGARAN 2024 (RP MILIAR)	TW II 2024		PERTUMBUHAN (YOY)
			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
Pendapatan Daerah									
A. APBD Provinsi Kep Babel									
I	PAD	1.039,33	469,02	45,13%	-14%	1.096,47	405,81	37,01%	-13,48%
II	Pendapatan Transfer	1.574,25	742,49	47,16%	13,38%	1.460,63	833,04	57,03%	12,20%
III	Lain-Lain Pendapatan	-	-	-		-	-	-	0,00%
Total A		2.613,58	1.211,51	46,35%	1,12%	2.557,10	1.238,85	48,45%	2,26%
B. APBD Kabupaten/Kota di Babel									
I	PAD	820,25	378,92	46,20%	-13,66%	985,22	376,54	38,22%	-0,63%
II	Pendapatan Transfer	6.502,98	2.534,78	38,98%	-0,36%	5.823,23	2.799,82	48,08%	10,46%
III	Lain-Lain Pendapatan	70,37	12,29	17,47%	-42,15%	45,69	3,83	8,38%	-68,84%
Total B		7.393,60	2.926,00	39,57%	-2,60%	6.854,13	3.180,20	46,40%	8,69%
Total Pendapatan		10.007,18	4.137,51	41,35%	-1,54%	9.411,23	4.419,04	46,95%	6,80%
Belanja Daerah									
A. Belanja APBD Provinsi Kep Babel									
I	Belanja Operasi	2.181,22	802,67	36,80%	30%	2.082,68	922,93	44,31%	14,98%
II	Belanja Modal	635,73	79,75	12,55%	2477%	351,76	33,95	9,65%	-57,43%
III	Belanja Tak Terduga	33,95	0,22	0,65%	44%	33,70	0,33	0,99%	0,00%
IV	Belanja Transfer	638,79	197,01	30,84%	69%	539,42	184,66	34,23%	-6,27%
Total A		3.489,69	1.079,66	30,94%	46%	3.007,55	1.141,87	37,97%	5,76%
B. Belanja APBD Kab/Kota di Babel									
I	Belanja Operasi	6.202,28	2.191,94	35,34%	14%	6.031,11	2.459,07	40,77%	12,19%
II	Belanja Modal	1.454,75	206,70	14,21%	196%	926,25	86,33	9,32%	-58,23%
III	Belanja Tak Terduga	33,20	2,85	8,59%	20%	32,20	1,73	5,39%	-39,20%
IV	Transfer	711,60	315,71	44,37%	29%	679,48	258,67	38,07%	-18,07%
Total B		8.401,83	2.717,20	32,34%	21%	7.669,04	2.805,80	36,59%	3,26%
Total Belanja APBD		11.891,52	3.796,86	31,93%	27%	10.676,59	3.947,67	36,98%	3,97%
Surplus/Defisit APBD		-1884,34	340,64	-18,08%		-1265,36	471,37		
C. Realisasi Belanja APBN Kementerian / Lembaga									
I	Belanja Pegawai	1.175,64	606,11	51,56%	16%	1.221,04	702,08	57,50%	15,83%
II	Belanja Barang	1.641,69	522,04	31,80%	28%	1.526,48	666,60	43,67%	27,69%
III	Belanja Modal	542,49	123,52	22,77%	-14%	594,62	151,25	25,44%	22,45%
IV	Belanja Bansos	6,40	2,67	41,71%	8%	6,53	3,73	57,12%	39,70%
Total C		3.366,23	1.254,34	37,26%	16%	3.348,67	1.523,66	45,50%	21,47%
Total Belanja		15.257,75	5.051,20	36,80%	25%	14.025,26	5.471,33	39,01%	8,32%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

sebesar Rp6,85 triliun. Berdasarkan pangsa, pagu pendapatan daerah pada triwulan II 2024 bersumber dari APBD kabupaten/kota sebesar 77,03% dan APBD provinsi sebesar 22,97% (Grafik 2.3). Pagu pendapatan daerah tahun 2024 tersebut lebih rendah 5,96% (yoy) dibandingkan pagu pendapatan daerah tahun 2023. Penurunan pagu pendapatan pada tahun 2024 bersumber dari turunnya pagu komponen pendapatan transfer, baik pada APBD provinsi yang turun 7,22% (yoy) dan APDB kabupaten/kota yang turun 11,42% (yoy).

Total pagu anggaran belanja fiskal Bangka Belitung tahun 2024 mencapai Rp14,02 triliun, meliputi Rp3,01 triliun belanja APBD provinsi, Rp7,67 triliun belanja APBD kabupaten/kota, dan Rp3,35 triliun belanja APBN K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pangsa, pagu belanja daerah pada triwulan II 2024 bersumber dari APBD kabupaten/kota sebesar 54,68%, APBD provinsi sebesar 21,44%, dan APBN K/L sebesar 23,88% (Grafik 2.4). Secara keseluruhan, terjadi penurunan anggaran belanja fiskal daerah sebesar 8,08% (yoy) dibandingkan pagu tahun 2023. Hal tersebut utamanya disebabkan



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

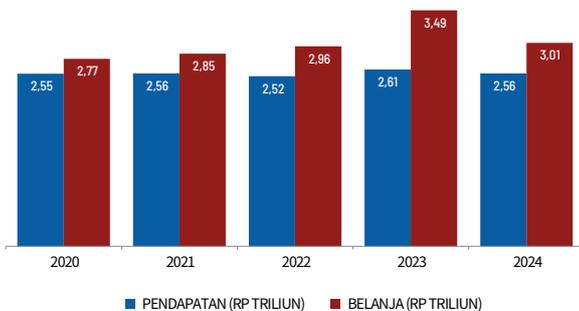
Grafik 2.3 Pangsa Sumber Pagu Pendapatan Daerah Tahun 2024

oleh turunnya anggaran pada komponen belanja modal dan belanja operasi pada pagu APBD provinsi dan kabupaten/kota. Pada pagu APBD provinsi, belanja modal dan belanja operasi turun berturut-turut 44,67% (yoy) dan 4,52% (yoy). Pada pagu APBD kabupaten/kota, belanja modal dan belanja operasi turun berturut-turut 36,33% (yoy) dan 2,76% (yoy). Sementara itu, pada pagu APBN K/L penurunan terjadi pada pagu belanja barang sebesar 7,02% (yoy).

2.2 APBD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

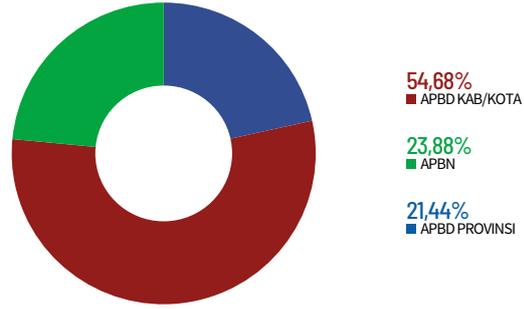
2.2.1 Pagu APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada tahun 2024, pagu anggaran pendapatan daerah tingkat provinsi tercatat Rp2,56 triliun (Grafik 2.5). Pagu pendapatan tersebut lebih rendah 2,16% (yoy) dibandingkan anggaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp2,61 triliun. Hal ini seiring dengan penurunan pagu pendapatan transfer sebesar 7,22% (yoy) menjadi Rp1,46 triliun, lebih rendah dibandingkan pagu tahun sebelumnya sebesar Rp1,57 triliun. Namun demikian, anggaran PAD tahun 2024 sebesar Rp1,10 triliun atau



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.5 Perkembangan Pagu APBD Provinsi 2020-2024

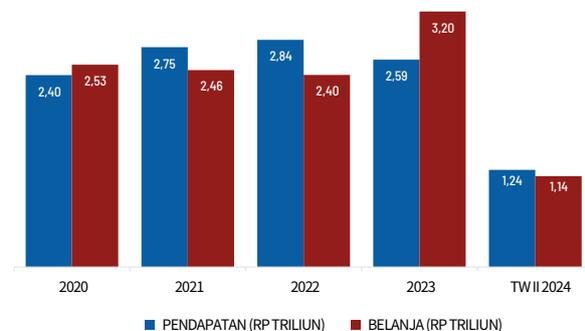


Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.4 Pangsa Sumber Pagu Belanja Daerah Tahun 2024

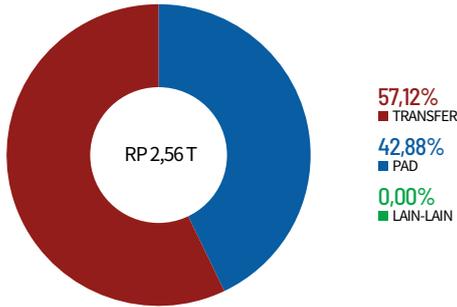
naik 5,50% (yoy) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,04 triliun. Sementara itu, komponen pendapatan lainnya belum dianggarkan pada APBD provinsi tahun 2024. Berdasarkan strukturnya, komponen pendapatan transfer masih menjadi alokasi pendapatan terbesar APBD provinsi pada tahun 2024 dengan pangsa mencapai 57,12% (Grafik 2.7). Sementara itu, pangsa pagu PAD pada tahun 2024 mencapai 42,88%, yang utamanya bersumber dari komponen pajak daerah dengan pangsa 86,98% (Grafik 2.8).

Pagu belanja daerah tingkat provinsi pada tahun 2024 sebesar Rp3,01 triliun atau turun 13,82% (yoy) dibandingkan anggaran perubahan tahun 2023. Penurunan pagu belanja daerah tersebut terjadi pada seluruh komponen belanja daerah. Pagu belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp2,08 triliun, turun 4,52% (yoy) dibandingkan pagu tahun lalu sebesar Rp2,18 triliun. Pagu belanja modal tahun 2024 mencapai Rp351,76 miliar atau turun 44,67% (yoy) dibandingkan pagu tahun 2023 sebesar Rp635,73 miliar. Pagu belanja tak terduga tahun 2024 mencapai Rp33,70 miliar atau turun 0,75%



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi APBD Provinsi 2020 – Triwulan II 2024



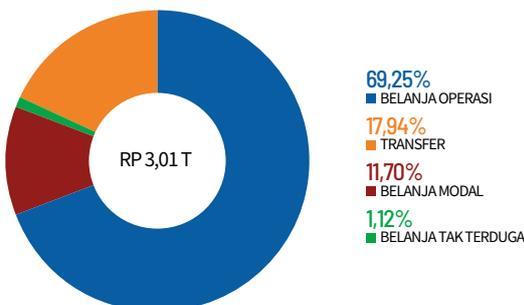
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.7 Pangsa Pagu Pendapatan APBD Provinsi Tahun 2024

(yoy) dibandingkan pagu tahun sebelumnya sebesar Rp33,95 miliar. Pagu belanja transfer tahun 2024 Rp539,42 miliar atau turun 15,56% dibandingkan pagu tahun 2023 sebesar Rp638,79 miliar. Berdasarkan strukturnya, komponen belanja operasi masih mendominasi alokasi belanja APBD provinsi pada tahun 2024 dengan pangsa mencapai 69,25% (Grafik 2.9). Pagu belanja operasi tersebut utamanya bersumber dari komponen belanja barang dan belanja pegawai dengan pangsa berturut-turut sebesar 46,58% dan 45,96%.

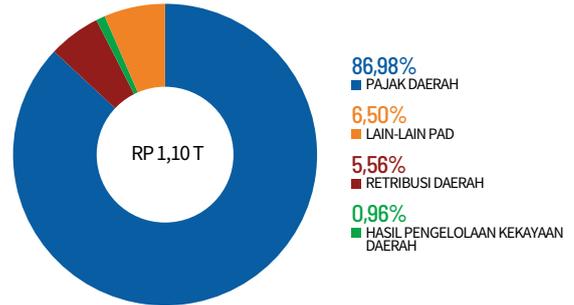
2.2.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2024

Realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi pada triwulan II 2024 mencapai Rp1,24 triliun (Tabel 2.2). Realisasi tersebut lebih tinggi 2,26% (yoy) dibandingkan triwulan II 2023 sebesar Rp1,21 triliun. Jika dibandingkan dengan pagu, realisasi pendapatan daerah tingkat provinsi mencapai 48,45% atau lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 18,05%.



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.9 Pangsa Pagu Belanja APBD Provinsi Tahun 2024



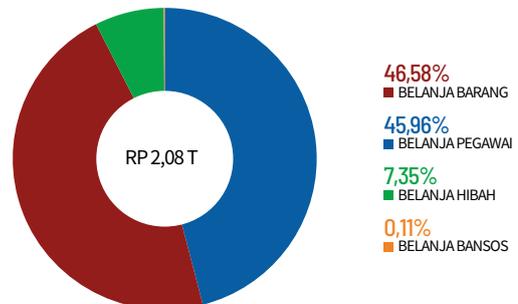
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.8 Pangsa Pagu PAD APBD Provinsi Tahun 2024

Peningkatan realisasi pendapatan daerah tersebut utamanya didorong oleh capaian realisasi pendapatan transfer Rp833,04 miliar, lebih tinggi 12,20% (yoy) dari realisasi pendapatan transfer pada triwulan II 2023 sebesar Rp742,49 miliar. Namun demikian, peningkatan realisasi pendapatan daerah tersebut tertahan seiring dengan penurunan realisasi PAD pada periode laporan. Pada triwulan II 2024, realisasi PAD sebesar Rp405,81 miliar, lebih rendah 13,48% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp469,02 miliar.

2.2.2.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi PAD pada triwulan II 2024 sebesar Rp405,81 miliar atau mencapai 37,01% dari pagu. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi PAD pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 45,13% atau Rp469,02 miliar. Penurunan realisasi PAD pada triwulan II 2024 disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 13,37% (yoy). Realisasi penerimaan pajak daerah pada triwulan laporan sebesar Rp358,44 miliar, lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan II 2023 sebesar Rp413,78 miliar (Grafik 2.12). Pendapatan pajak daerah memiliki pangsa 86,98% dari



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.10 Pangsa Pagu Belanja Operasi APBD Provinsi Tahun 2024

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024

NO	URAIAN	APBD PERUBAHAN 2023	S.D TW II 2023		PERTUMBUHAN % (YOY)	APBD 2024	S.D TW II 2024		PERTUMBUHAN % (YOY)
			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
I	PAD	1.039,33	469,02	45,13%	-13,66%	1.096,47	405,81	37,01%	-13,48%
	a. Pajak Daerah	856,53	413,78	48,31%	-15,72%	953,69	358,44	37,58%	-13,37%
	b. Retribusi Daerah	16,32	4,18	25,63%	142,96%	60,93	22,15	36,35%	429,36%
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,03	10,03	100,00%	60,58%	10,53	8,74	83,02%	0,00%
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156,44	41,04	26,23%	-7,42%	71,32	16,48	23,11%	-59,84%
II	Pendapatan Transfer	1.574,25	742,49	47,16%	13,38%	1.460,63	833,04	57,03%	12,20%
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	240,25	113,55	47,27%	74,91%	163,46	135,27	82,75%	19,12%
	b. Dana Alokasi Umum	973,79	501,30	51,48%	-8,66%	1.011,57	599,42	59,26%	19,57%
	c. Dana Alokasi Khusus	326,30	110,68	33,92%	190,77%	285,60	98,35	34,44%	-11,14%
	d. Dana Insentif Daerah	33,91	16,954284	50,00%	447,44%	-	-	-	-
III	Lain-Lain Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan	2.613,58	1.211,51	46,35%	1,12%	2.557,10	1.238,85	48,45%	2,26%

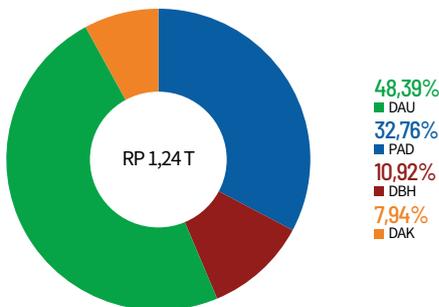
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

total PAD. Penerimaan pajak daerah ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak rokok. Dari sektor pajak kendaraan, penurunan PAD sejalan dengan tidak adanya program pemutihan kendaraan pada tahun 2024. Namun demikian, kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi untuk melakukan pembayaran pajaknya.

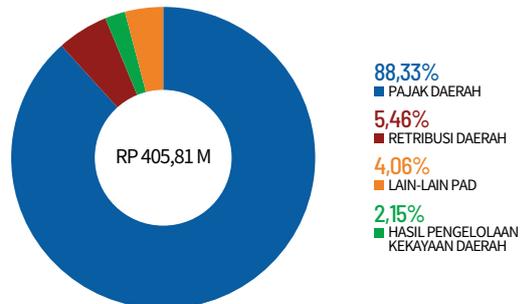
Salah satu penyebab realisasi yang lebih rendah adalah menurunnya penerimaan pajak daerah karena terjadinya perlambatan pada sektor perdagangan dan pertambangan yang mendorong kontraksi pada penerimaan pajak. Selain itu, penurunan penerimaan

pajak juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berulang dan penurunan setoran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) atas dampak kebijakan penetapan bijih timah sebagai barang strategis yang dibebaskan dari PPN pada Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2022.

Untuk meningkatkan PAD ke depan, Pemerintah Provinsi tetap konsisten menjalankan berbagai program kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dengan menambah PKB yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti Samsat Setempoh, Samsat Keliling, Gerai Samsat, serta penyuluhan pajak melalui berbagai media. Di sisi lain, pemerintah juga memaksimalkan pungutan pajak bahan bakar kendaraan



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.11 Pangsa Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Triwulan II Tahun 2024


Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.12 Pangsa Realisasi PAD APBD Provinsi Triwulan II Tahun 2024

Tabel 2.3 Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024

NO	URAIAN	APBDP 2023 (RP MILIAR)	S.D TW II 2023		REALISASI (YOY)	APBDP 2024 (RP MILIAR)	S.D TW II 2024		REALISASI (YOY)
			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
1	Belanja Operasi	2.181,22	802,67	36,80%	29,84%	2.082,68	922,93	44,31%	14,98%
	a. Belanja Pegawai	929,27	488,74	52,59%	21,88%	957,27	553,45	57,81%	13,24%
	b. Belanja Barang	1.050,26	251,09	23,91%	42,85%	970,12	262,66	27,07%	4,61%
	c. Belanja Hibah	165,84	62,49	37,68%	51,95%	153,06	106,17	69,37%	69,89%
	d. Belanja Bansos	19,07	0,35	1,82%	0,00%	2,23	0,66	29,54%	0,00%
	e. Belanja Subsidi	16,78	-	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal	635,73	79,75	12,55%	2476,90%	351,76	33,95	9,65%	-57,43%
3	Belanja Tak Terduga	33,95	0,22	0,65%	0,00%	33,70	0,33	0,99%	0,00%
4	Transfer	638,79	197,01	30,84%	68,56%	539,42	184,66	34,23%	-6,27%
	Total Belanja	3.489,69	1.079,66	30,94%	46,23%	3.007,55	1.141,87	37,97%	5,76%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

bermotor dan pajak air permukaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.2.2.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer masih menjadi kontributor utama pada realisasi pendapatan daerah Provinsi dengan pangsa 57,12% yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) 48,396%, Dana Bagi Hasil (DBH) 10,92%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 7,94%, terhadap total realisasi pendapatan daerah triwulan II 2024 (Grafik 2.11). Realisasi pendapatan transfer pada triwulan II 2024 sebesar Rp833,04 miliar atau setara dengan 57,03% dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 47,16%. Berdasarkan sumbernya, komponen pendapatan transfer sebagian besar disumbang dari DAU dengan pangsa mencapai 71,96%, disusul DBH 16,24%, dan DAK 11,81%.

DAU merupakan komponen dana perimbangan yang bersumber dari APBN sebagai bagian dari perwujudan desentralisasi dan dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (*horizontal*) dalam rangka mendanai kebutuhan daerah. Pengalokasian DAU tersebut berdasarkan *fiscal gap*¹ dan alokasi dasar². DAK ditujukan untuk mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik (DAK fisik) serta mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik (DAK non-fisik). Sebagian dana DAK tersebut ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah sesuai prioritas nasional dan berkaitan dengan infrastruktur. Dana Bagi Hasil (DBH) ditujukan untuk mengatasi ketimpangan

fiscal vertical (antara pemerintah pusat dan daerah), dengan fokus alokasi kepada daerah penghasil.

2.2.3 Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Realisasi belanja daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 mencapai Rp1,14 triliun atau setara dengan 37,97% dari total belanja yang direncanakan sebesar Rp3,01 triliun (Tabel 2.3). Secara nominal, realisasi belanja daerah pada triwulan II 2024 tumbuh 5,76% (yoy) dibandingkan capaian periode sama tahun lalu yaitu Rp1,08 triliun, dengan komponen terbesar berupa belanja operasi, belanja transfer, dan belanja modal.

2.2.3.1 BELANJA OPERASI

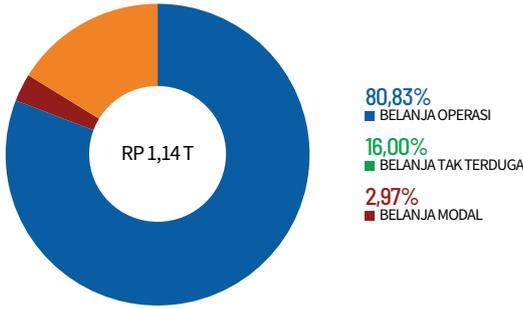
Realisasi belanja operasi mendominasi pada triwulan II 2024 sebesar Rp922,93 miliar dengan pangsa 80,83% terhadap total realisasi belanja APBD Provinsi pada triwulan II 2024 (Grafik 2.13). Realisasi belanja operasi tersebut tumbuh 14,98% (yoy). Kontributor utama realisasi belanja operasi didominasi oleh komponen belanja pegawai dengan pangsa 59,97% dari total belanja operasi triwulan II 2024 (Grafik 2.14). Pertumbuhan realisasi belanja operasi triwulan II 2024 didorong oleh peningkatan realisasi belanja pada semua komponen yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja hibah.

2.2.3.2 BELANJA MODAL

Realisasi belanja modal pada triwulan II 2024 sebesar Rp33,95 miliar atau setara dengan 9,65% dari pagu. Secara nominal, realisasi belanja modal turun 57,43% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh masih rendahnya

¹ *Fiscal gap* adalah kebutuhan fiskal meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikurangi dengan fiskal daerah (terdiri dari PAD dan DBH).

² Alokasi dasar dihitung berdasarkan atas jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.13 Pangsa Realisasi Belanja APBD Provinsi Triwulan II 2024

realisasi belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi serta modal peralatan dan mesin. Selain itu, pada belanja modal tanah, modal aset tetap dan modal aset lainnya juga belum terdapat realisasi.

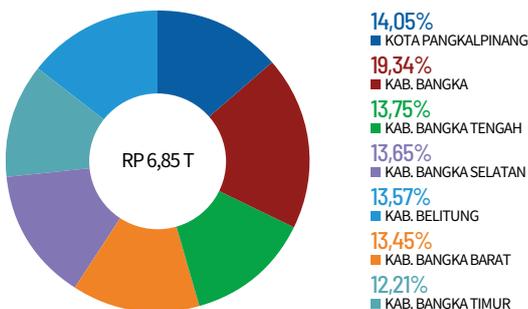
2.2.3.3 BELANJA TRANSFER

Realisasi belanja transfer pada triwulan II 2024 sebesar Rp184,66 miliar dengan realisasi 34,23% dari pagu tahun 2024. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi pada triwulan II 2023 sebesar Rp197,01 miliar atau setara dengan 30,84% dari pagu. Realisasi belanja transfer terdiri atas komponen belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota.

2.3 APBD KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN II 2024

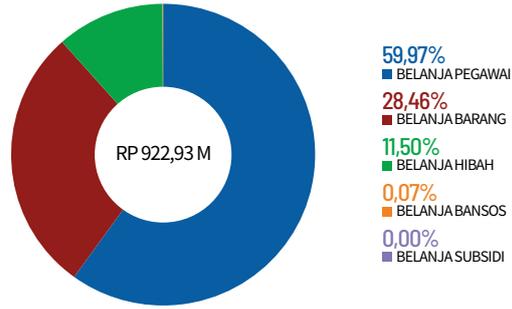
2.3.1 Pagu APBD Kabupaten/Kota

Pagu pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebesar Rp6,85 triliun, lebih rendah 7,30% (yoy) dibandingkan pagu tahun 2023. Kabupaten Bangka



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.15 Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

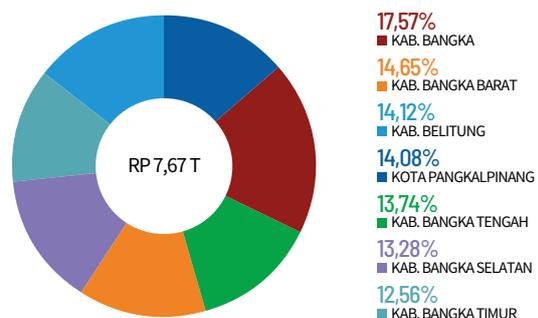
Grafik 2.14 Pangsa Realisasi Belanja Operasi APBD Provinsi Triwulan II 2024

merupakan wilayah dengan pangsa pagu pendapatan terbesar pada tahun 2024 (Grafik 2.15). Pagu anggaran pendapatan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Pagu belanja seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 turun 8,72% (yoy), dari Rp8,40 triliun di tahun 2023 menjadi Rp7,67 triliun pada tahun 2024. Penurunan pagu belanja daerah terbesar terjadi di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Bangka merupakan wilayah dengan pangsa pagu belanja terbesar pada tahun 2024 (Grafik 2.16).

2.3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Triwulan II 2024

Secara umum, realisasi pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota pada triwulan II 2024 sebesar Rp3,18 triliun atau setara dengan 46,40% dari keseluruhan pagu. Realisasi tersebut tumbuh 8,69% (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,93 triliun. Persentase realisasi pendapatan tertinggi triwulan II 2024 dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.16 Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024

Tabel 2.4 Ringkasan Pagu dan Realisasi APBD Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2023 dan Triwulan II 2024

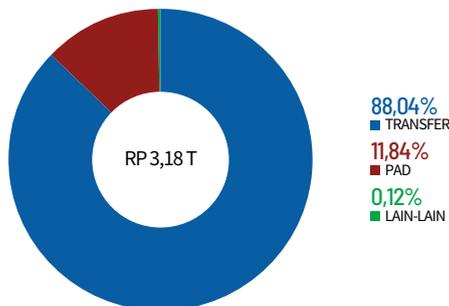
KAB/KOTA	APBD 2023 (RP MILIAR)	TRIWULAN II 2023		PERTUMBUHAN REALISASI (% YOY)	APBD 2024 (RP MILIAR)	TRIWULAN II 2024		PERTUMBUHAN REALISASI (% YOY)
		REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI			REALISASI (RP MILIAR)	% REALISASI	
Pendapatan Daerah								
Kota Pangkalpinang	1.022,20	468,38	45,82%	17,86%	962,80	488,76	50,76%	4,35%
Kab. Bangka	1.363,91	536,89	39,36%	-5,02%	1.325,30	597,80	45,11%	11,35%
Kab. Bangka Tengah	990,64	420,28	42,43%	0,77%	942,21	413,62	43,90%	-1,59%
Kab. Bangka Barat	999,27	322,16	32,24%	-11,02%	921,86	415,25	45,04%	28,90%
Kab. Bangka Selatan	1.064,92	337,15	31,66%	-16,25%	935,27	401,63	42,94%	19,13%
Kab. Belitung Timur	896,81	413,83	46,14%	2,38%	836,67	433,62	51,83%	4,78%
Kab. Belitung	1.055,85	427,30	40,47%	-6,19%	930,03	429,51	46,18%	0,52%
Total Pendapatan	7.393,60	2.926,00	39,57%	-2,60%	6.854,13	3.180,20	46,40%	8,69%
Belanja Daerah								
Kota Pangkalpinang	1.173,44	368,70	31,42%	38,49%	1.079,93	389,23	36,04%	5,57%
Kab. Bangka	1.512,85	540,97	35,76%	20,74%	1.347,66	514,88	38,21%	-4,82%
Kab. Bangka Tengah	1.102,90	377,26	34,21%	14,09%	1.053,62	389,79	37,00%	3,32%
Kab. Bangka Barat	1.106,56	386,72	34,95%	23,05%	1.123,22	373,94	33,29%	-3,31%
Kab. Bangka Selatan	1.223,22	322,46	26,36%	53,66%	1.018,32	358,00	35,16%	11,02%
Kab. Belitung Timur	1.050,35	336,40	32,03%	15,21%	963,30	351,95	36,54%	4,62%
Kab. Belitung	1.232,51	384,71	31,21%	1,26%	1.082,98	428,00	39,52%	11,25%
Total Belanja	8.401,83	2.717,20	32,34%	21,25%	7.669,04	2.805,80	36,59%	3,26%
Surplus/Defisit	-1008,23	208,79			-814,91	374,40		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

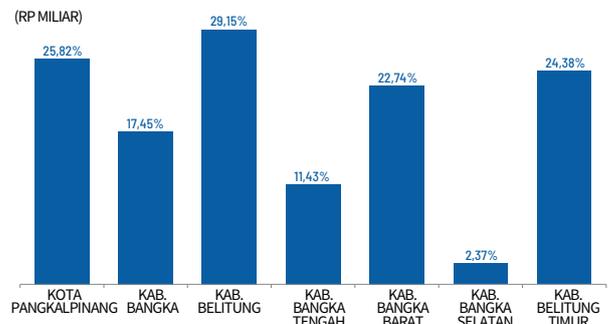
51,83% atau setara dengan Rp433,62 miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan sebesar 42,94% dari pagu.

Ketergantungan pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap transfer dana dari pusat masih relatif tinggi. Dana transfer masih menjadi kontributor utama realisasi pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota dengan pangsa 88,04% pada triwulan II 2024 atau sebesar Rp2,80 triliun (Grafik 2.17). Sementara itu, pangsa realisasi PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah mencapai 11,84% atau sebesar Rp376,54 miliar (Grafik

2.17). Terdapat empat kabupaten yang pada triwulan II 2024 memiliki rasio realisasi PAD terhadap pendapatan daerah yang kurang dari 10%, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur (Grafik 2.18). Adapun pangsa pendapatan lain-lain tercatat Rp3,83 miliar atau 0,12% dari total pendapatan daerah tingkat kabupaten/kota. Secara nominal, realisasi PAD tertinggi pada triwulan II 2024 dicapai oleh Kota Pangkalpinang dengan capaian Rp87,36 miliar atau sebesar 48,95% dari pagu PAD tahun 2024. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan komponen pendapatan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran seiring

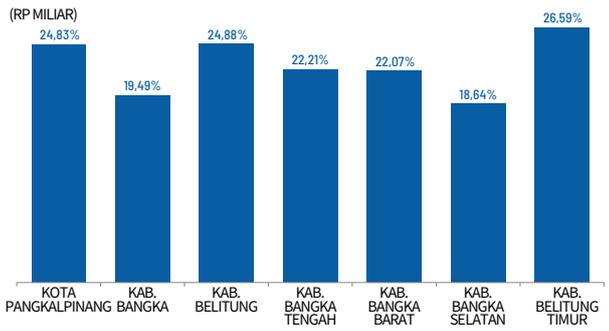


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.17 Pangsa Total Pendapatan Kabupaten/Kota Triwulan II 2024


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.18 Realisasi PAD Kabupaten/Kota Triwulan II 2024



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

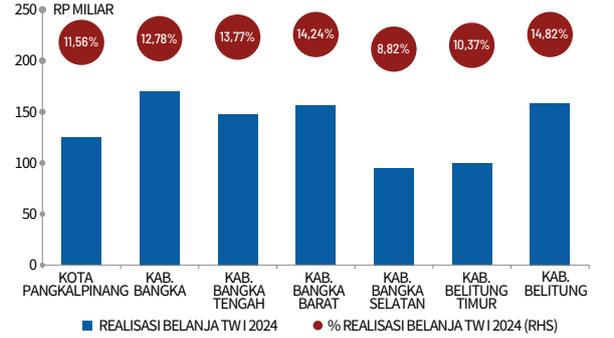
Grafik 2.19 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota Triwulan II 2024

dengan adanya pembukaan gerai makanan ataupun restoran baru di Kota Pangkalpinang. Secara total, realisasi PAD Kabupaten/Kota pada triwulan II 2024 tumbuh 8,69% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu dari sisi pendapatan transfer, seluruh kabupaten/kota memiliki realisasi lebih dari 40%. Adapun Kabupaten Belitung Timur memiliki realisasi tertinggi sebesar 53,48% (Grafik 2.19).

2.3.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum, realisasi belanja daerah seluruh kabupaten/kota pada triwulan II 2024 mencapai Rp2,81 triliun atau 36,59% dari total pagu belanja tahun 2024. Realisasi belanja tersebut tumbuh 3,26% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp2,72 triliun. Secara persentase, realisasi belanja tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 dicapai oleh Kabupaten Belitung yang tercatat Rp428 miliar atau 39,52% dari pagu anggaran (Grafik 2.20). Sementara itu, persentase realisasi belanja terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat dengan realisasi sebesar Rp373,94 miliar atau 33,29% dari pagu anggaran (Grafik 2.20).

Belanja operasi mendominasi dengan pangsa 87,64% dari total belanja kabupaten/kota pada triwulan II 2024 atau Rp2,46 triliun (Grafik 2.21). Belanja modal mencapai Rp 86,33miliar dengan pangsa 3,08% dari total belanja (Grafik 2.21). Sementara realisasi belanja transfer dan belanja tak terduga masing-masing 9,22% dan 0,06% dari total pagu atau Rp258,67 miliar dan Rp1,73 miliar (Grafik 2.21).



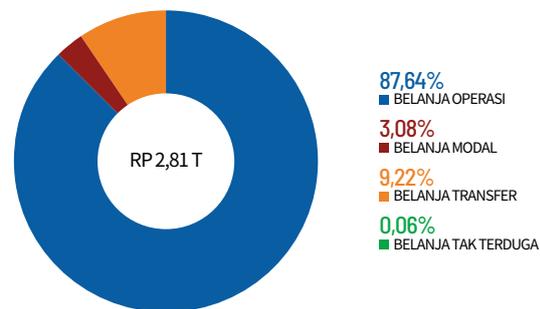
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.20 Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Triwulan II 2024

2.4 BELANJA APBN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.4.1 Pagu Anggaran Belanja APBN Kementerian/Lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendanaan pembangunan di daerah juga bersumber dari dana APBN dalam bentuk Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk membayar gaji pegawai kementerian atau instansi pemerintah pusat yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, belanja pemerintah pusat di daerah juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat di daerah juga digunakan untuk kegiatan pembangunan yang disalurkan melalui Dana Dekonsentrasi³ dan Tugas Pembantuan (TP)⁴.

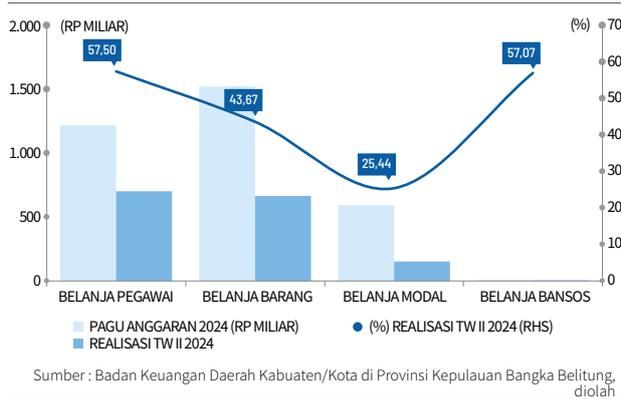


Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.21 Pangsa Total Belanja Kabupaten/Kota Triwulan II 2024

³ Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah/

⁴ TP merupakan penugasan-penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.



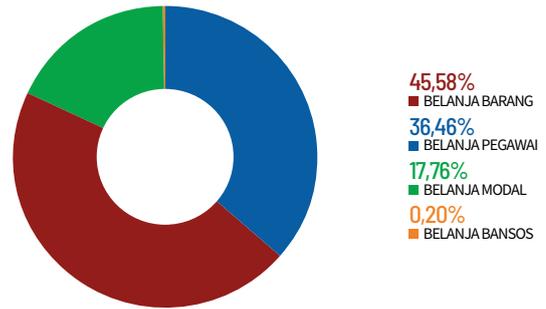
Grafik 2.22 Realisasi Belanja APBN Triwulan II 2024 Menurut Jenis Belanja

Pada tahun 2024, pagu anggaran belanja APBN K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun 0,25% (yoy) dari Rp3,37 triliun pada tahun lalu menjadi Rp3,35 triliun. Penurunan pagu anggaran tersebut disebabkan oleh pagu anggaran belanja barang yang lebih rendah 7,02% (yoy), dari Rp1,64 triliun pada 2023 menjadi Rp1,53 triliun pada tahun 2024. Meskipun demikian, pagu belanja pegawai mengalami peningkatan 3,86 (yoy) menjadi Rp1,22 triliun pada tahun 2024. Selain itu, pagu anggaran belanja modal juga meningkat 9,61% (yoy) menjadi Rp594,62 miliar. Pagu anggaran belanja bansos juga meningkat 2,00% (yoy) menjadi Rp6,53 miliar pada tahun 2024.

2.4.2 Realisasi Belanja APBN

Realisasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 sebesar Rp1,52 triliun atau mencapai 45,50% dari pagu tahun 2024. Secara tahunan, realisasi belanja APBN tersebut meningkat 21,47% (yoy). Berdasarkan jenis belanja, belanja pemerintah pusat di daerah digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Kenaikan realisasi belanja tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjaga momentum percepatan realisasi belanja untuk menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan realisasi tersebut didorong realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos seiring dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada sebagian besar instansi, pembayaran penyelenggaraan pemilu, rehabilitasi prasarana sekolah, dan penyaluran beasiswa KIP.

Pada triwulan II 2024, realisasi belanja terbesar pemerintah pusat di daerah adalah belanja pegawai yaitu



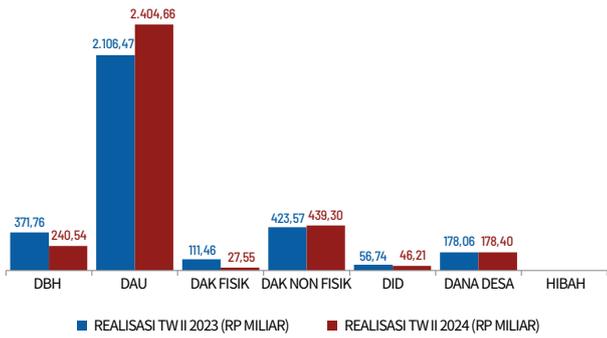
Grafik 2.23 Pangsa Realisasi Belanja APBN Triwulan II 2024 Menurut Jenis Belanja

Rp702,08 miliar atau 57,50% dari pagu belanja pegawai tahun 2024 (Grafik 2.22). Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp666,60 miliar atau 43,67% dari pagu belanja barang tahun 2024. Adapun realisasi belanja modal dan belanja bansos masing-masing sebesar 22,45% dan 39,70% dari pagu belanja atau Rp151,25 miliar dan Rp3,73 miliar. Berdasarkan pangsa, realisasi belanja APBN K/L di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar merupakan belanja barang sebesar 45,58%, disusul belanja pegawai 36,46%, belanja modal 17,76%, dan belanja bansos 0,20% (Grafik 2.23).

2.4.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Dana transfer dari pusat ke daerah terbagi menjadi beberapa komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, Insentif Fiskal, serta Dana Desa. Dana transfer dari pemerintah pusat tersebut masuk ke dalam komponen penerimaan APBD daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang tercatat juga sebagai penerimaan pendapatan transfer. Secara nominal, total realisasi dana transfer dari pemerintah pusat triwulan II 2024 mencapai Rp3,34 triliun atau tumbuh 2,73% (yoy) dibandingkan realisasi triwulan II 2023 sebesar Rp3,25 triliun.

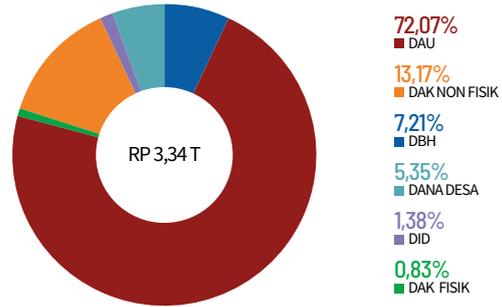
Secara nominal, realisasi TKDD tertinggi pada triwulan II 2024 merupakan DAU yang mencapai Rp2,40 triliun atau mencapai 55,04% dari pagu, dengan pangsa 72,07% dari total realisasi TKDD triwulan II 2024 (Grafik 2.24 dan Grafik 2.25). Realisasi DAU tersebut naik 14,16% (yoy) dibandingkan realisasi triwulan II 2023 sebesar Rp2,11 triliun. Realisasi terbesar selanjutnya ada pada DAK Non Fisik yang mencapai Rp439,30 miliar atau mencapai



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.24 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II 2024

50,91%, dengan pangsa 13,17% dari total realisasi TKDD triwulan II 2024. Realisasi tersebut tumbuh 3,71% (yoy) dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp423,57 miliar. Realisasi TKDD tercatat meningkat seiring dengan penyaluran DAU pada hampir seluruh kabupaten/kota dan realisasi insentif fiskal di Kota Pangkalpinang. Di sisi lain, realisasi DBH berkontraksi seiring dengan penurunan DBH Sumber Daya Alam, utamanya komoditas timah. Hal ini sejalan dengan terhambatnya ekspor timah pada tahun 2024 seiring dengan berjalannya proses hukum tata kelola dan niaga timah.



Sumber : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 2.25 Pangsa Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan II 2024

Pendapatan negara (yang masuk ke Pemerintah Pusat) pada triwulan II 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,57 triliun atau 42,09% dari pagu sebesar Rp3,73 triliun. Jumlah tersebut turun 1,64% dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp1,60 triliun. Penerimaan perpajakan mendominasi pendapatan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 dengan pangsa 92,35%. Kontribusi penerimaan perpajakan terbesar bersumber dari pajak dalam negeri, terutama PPN dan PPh.



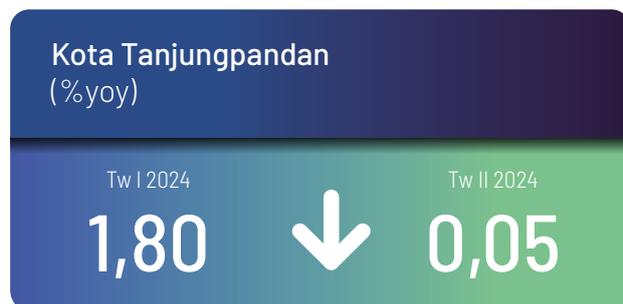
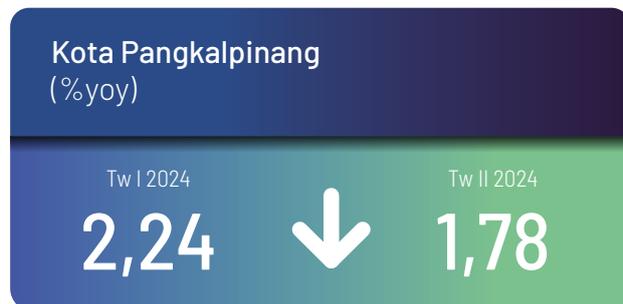


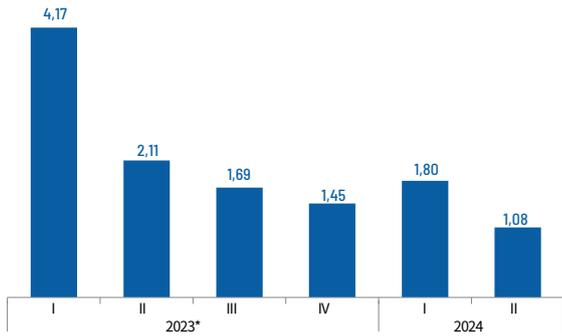
Foto : Air Terjun di Dusun Aik Gede, Membalong, Belitung

BAB 3

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan II 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi 1,08% (yoy), berada di bawah rentang sasaran 2,5±1%. Nilai ini lebih rendah apabila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,80% (yoy). Turunnya laju inflasi triwulan II 2024 dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi beberapa komoditas utama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring normalisasi permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan jumlah pasokan yang relatif lebih terjaga. Sementara itu, dari sisi permintaan, daya beli masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terindikasi mengalami penurunan akibat melambatnya kinerja sektor utama logam dasar timah. Secara spasial, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,78% (yoy), Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0,05% (yoy), Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,27% (yoy), serta Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,75% (yoy).





Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah
*Rebase menggunakan SBH 2022

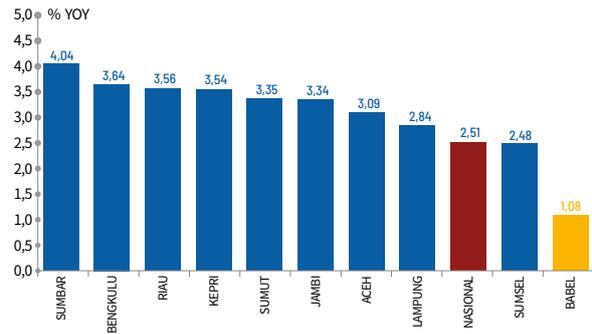
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1 INFLASI UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 semakin terjaga. Hal tersebut seiring dengan realisasi inflasi pada periode berjalan sebesar 1,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,80% (yoy). Realisasi inflasi ini sekaligus menjadikan Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah nasional. Dari sisi perkembangan harga, rendahnya capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Ramadhan/Idul Fitri dan kondisi pasokan yang relatif lebih terjaga.

Di tengah terjaganya pasokan, dari sisi permintaan, penurunan laju inflasi diindikasikan akibat melemahnya daya beli masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seiring dengan melambatnya sektor utama logam dasar timah. Hal ini tecermin pada beberapa indikator makro wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), serta Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pada triwulan II 2024, PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 2,98% (yoy) atau melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan I sebesar 4,37% (yoy). Dari sisi survei, IKE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 sebesar 112,83, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 122,33. Penurunan lebih lanjut juga tecermin pada DPK Rumah Tangga pada



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

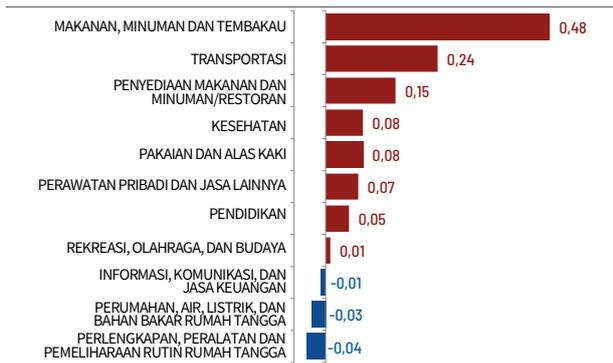
Grafik 3.2 Inflasi Kawasan Sumatera Triwulan II 2024

triwulan II 2024 yang mengalami kontraksi 5,92% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan I 2024 sebesar 3,03% (yoy). Meskipun demikian, nilai IKE >100 menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih berada pada level optimis.

Secara tahun berjalan, atau sejak awal tahun 2024, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 sebesar 0,46% (ytd). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi tahun berjalan triwulan II 2023 sebesar 1,84% (ytd). Sementara itu secara spasial tahunan, keempat kota IHK tercatat mengalami inflasi pada triwulan laporan. Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,78% (yoy). Kota Tanjungpandan mengalami inflasi tahunan 0,05% (yoy). Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi tahunan 0,27% (yoy). Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi tahunan 1,75% (yoy).

Sebagian besar kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi pada triwulan II 2024.

Inflasi terjadi di hampir seluruh kelompok kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi 0,48%; kelompok transportasi dengan andil terhadap inflasi tahunan 0,24%; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil terhadap inflasi tahunan 0,15%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang menahan laju inflasi tertinggi adalah kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil terhadap



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Andil Inflasi Tahunan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)

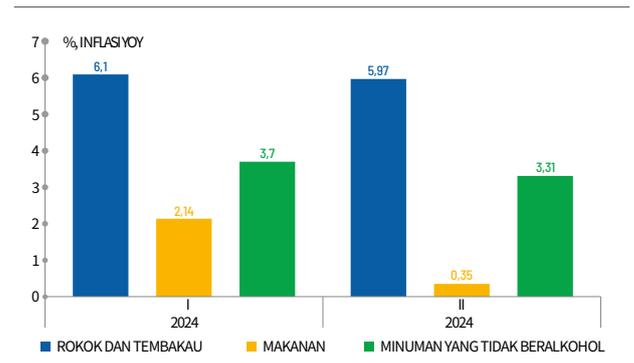
inflasi -0,04%; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil terhadap inflasi -0,03%; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil terhadap inflasi -0,01%.

3.2 INFLASI KELOMPOK PENGELUARAN

Secara umum, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin terjaga didorong oleh inflasi beberapa kelompok pengeluaran utama yang tercatat mereda. Kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil terhadap inflasi tahunan terbesar 0,48% (yoy), tercatat mengalami penurunan tingkat inflasi dibandingkan inflasi triwulan I 2024. Lebih lanjut, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 0,15% (yoy) juga mencatatkan inflasi yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, inflasi tahunan yang semakin mereda tersebut tertahan oleh kelompok transportasi yang tercatat mengalami peningkatan inflasi dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,24%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,04% (Grafik 3.3).

3.2.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,32 (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 3,96% (yoy). Capaian inflasi yang lebih rendah tersebut didorong oleh inflasi seluruh subkelompok yang terpantau mereda dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok rokok dan tembakau sebesar 5,97% (yoy), diikuti subsektor minuman yang tidak



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Subkelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

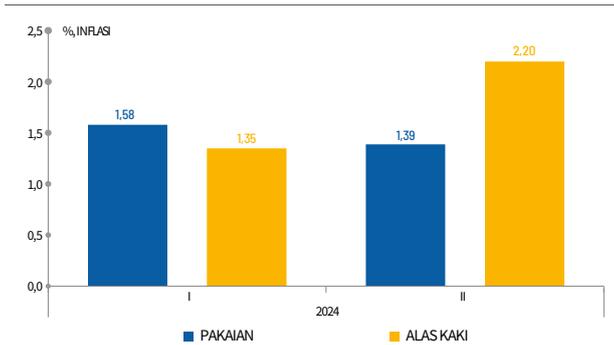
beralkohol 3,31% (yoy), serta subsektor makanan sebesar 0,35% (yoy) (Grafik 3.4).

Berdasarkan jenis komoditas, beras menjadi komoditas penyumbang andil terbesar, yaitu 0,78% terhadap inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024. Laju inflasi beras dipengaruhi oleh kenaikan harga beras yang mulai terjadi pada Februari 2024. Kenaikan tersebut disebabkan oleh mundurnya masa tanam dan panen padi akibat fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Sejalan dengan berkurangnya stok nasional akibat pergeseran masa panen, Pemerintah menetapkan relaksasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sejak 10 Maret, diantaranya HET beras premium wilayah Bangka Belitung menjadi Rp15.400/kg dan HET beras medium wilayah Bangka Belitung menjadi Rp13.100/kg. Relaksasi HET tersebut diperpanjang hingga kemudian ditetapkan menjadi HET beras medium dan premium secara permanen sejak 5 Juni 2024.

Selain beras, komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan II 2024 adalah sigaret kretek mesin (SKM) sebesar 0,24%. Kenaikan tersebut didorong oleh berlanjutnya transmisi kenaikan cukai, yakni pemberlakuan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk rokok rata-rata sebesar 10%, hasil tembakau berupa Rokok Elektrik (REL) sebesar 15%, serta Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebesar 6% mulai 1 Januari 2024¹.

Berdasarkan pantauan pada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga komoditas hortikultura

¹ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

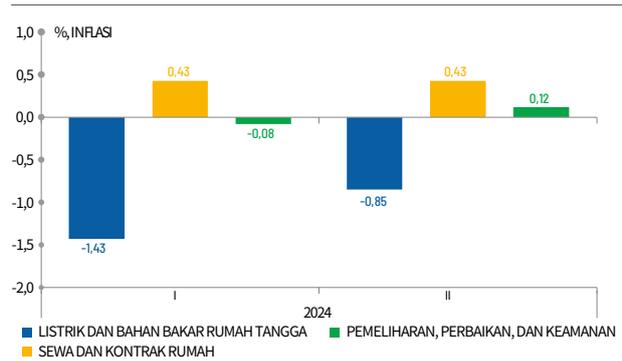
Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Subkelompok Pakaian dan Alas Kaki Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

cabai merah mengalami kenaikan. Pada triwulan II 2024, cabai merah menjadi komoditas hortikultura penyumbang inflasi tahunan terbesar yang mengalami kenaikan selama periode laporan. Lebih lanjut, harga cabai rawit juga menunjukkan kenaikan pada triwulan II 2024. Kenaikan kedua komoditas cabai tersebut didorong oleh penurunan pasokan di daerah sentra seiring dengan sedang berlangsungnya periode tanam.

Sementara itu, inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat lebih rendah pada triwulan berjalan, turut didorong oleh sebagian besar komoditas aneka ikan segar/laut yang mengalami deflasi. Aneka ikan segar/laut seperti ikan kerisi, ikan tongkol, ikan kembung, dan ikan selar mengalami penurunan harga seiring dengan jumlah hasil tangkapan yang mencukupi permintaan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.2.2 Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami inflasi 1,56% (yoy), relatif stabil dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,53% (yoy). Secara andil, kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,08% atau stabil dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi kelompok ini didorong oleh subkelompok alas kaki yang mengalami inflasi sebesar 2,20% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,34% (yoy), dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,02% (Grafik 3.5). Beberapa komoditas tercatat memberikan pengaruh terhadap realisasi inflasi subkelompok alas kaki tersebut, salah satunya sepatu pria dan sepatu anak. Sepatu pria dan sepatu anak pada triwulan II 2024 tercatat inflasi masing-masing sebesar 3,39% (yoy) dan 3,02% (yoy), meningkat dari periode sebelumnya



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar RT Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

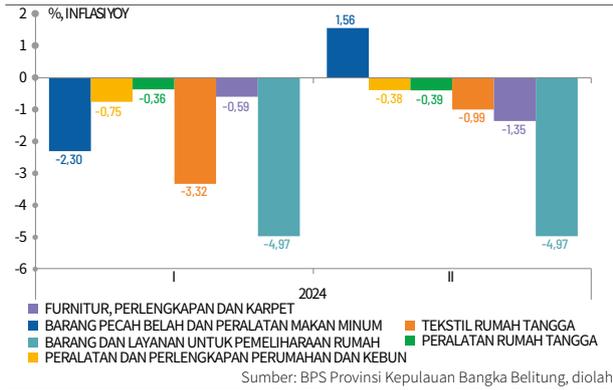
masing-masing sebesar 1,99% (yoy) dan 0,42% (yoy). Perayaan HBKN Idul Fitri serta persiapan pelajar kembali masuk sekolah semester ganjil menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap sepatu pria dan sepatu anak di triwulan II 2024. Di sisi lain, inflasi kelompok pakaian dan alas kaki lebih lanjut tertahan oleh inflasi subkelompok pakaian yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2024, subkelompok pakaian tercatat inflasi sebesar 1,40% (yoy), lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 1,58% (yoy).

3.2.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga tercatat masih mengalami deflasi 0,25% (yoy) meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami deflasi 0,55% (yoy). Realisasi tersebut didorong oleh deflasi subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,85% (yoy), yang juga lebih rendah dari deflasi periode sebelumnya sebesar 1,42% (yoy). Deflasi subkelompok ini disebabkan oleh komoditas bahan bakar rumah tangga yang juga tercatat mereda dari 4,39% (yoy) menjadi 2,64% (yoy). Di sisi lain, subkelompok sewa dan kontrak rumah serta subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,43% (yoy) dan 0,12% (yoy) (Grafik 3.6).

3.2.4 Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tetap mengalami deflasi 0,68% (yoy) meskipun lebih rendah



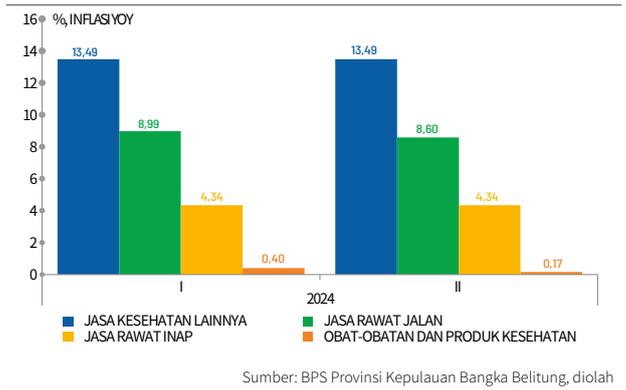
Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin RT Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya sebesar 1,04% (yoy). Secara tahunan, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil deflasi 0,04% terhadap realisasi triwulan II tahun 2024 atau lebih rendah dibandingkan andil deflasi triwulan sebelumnya yang tercatat 0,06%.

Hampir semua subkelompok pengeluaran mengalami deflasi (Grafik 3.7), antara lain subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum sebesar 4,97% (yoy), subkelompok peralatan rumah tangga sebesar 0,99% (yoy), subkelompok tekstil rumah tangga sebesar 0,38% (yoy), subkelompok furnitur, perlengkapan, dan karpet sebesar 1,35% (yoy), dan subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,39% (yoy). Sementara itu, subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun tercatat mengalami inflasi 1,56% (yoy).

3.2.5 Kelompok Kesehatan

Pada triwulan II 2024, kelompok kesehatan tercatat mengalami inflasi 3,63% (yoy), menurun dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 3,85% (yoy). Secara andil, kelompok kesehatan menyumbang andil inflasi secara tahunan sebesar 0,08% atau stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terjadi pada seluruh subkelompok, antara lain subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan 0,17% (yoy), subkelompok jasa rawat jalan 8,60% (yoy), subkelompok jasa rawat inap 4,34% (yoy) dan subkelompok jasa kesehatan lainnya 13,49% (yoy) (Grafik 3.8).

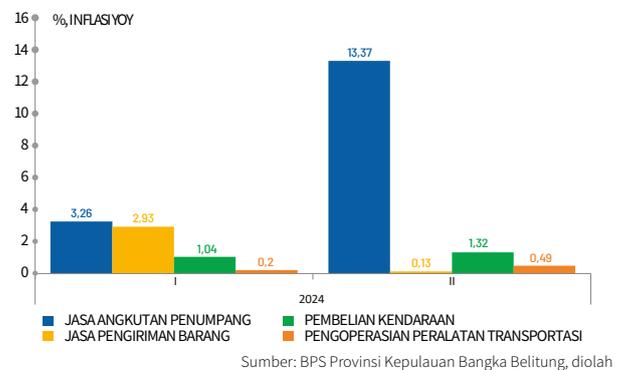


Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Subkelompok Kesehatan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

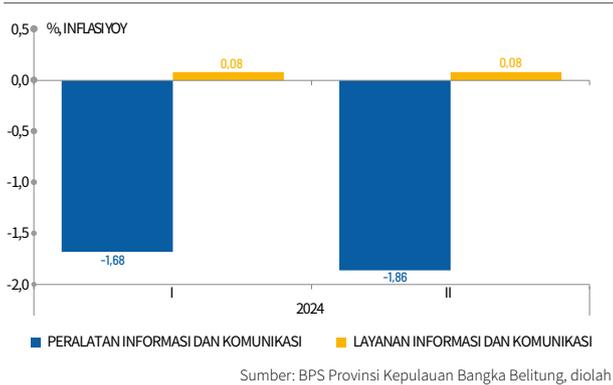
3.2.6 Kelompok Transportasi

Pada triwulan II 2024, kelompok transportasi mengalami inflasi 1,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2024 yang tercatat inflasi sebesar 0,69% (yoy). Secara andil, kelompok transportasi menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,24%, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 0,08%. Seluruh subkelompok mengalami inflasi, antara lain subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 13,37% (yoy), subkelompok jasa pengiriman barang 0,13% (yoy), subkelompok pembelian kendaraan 1,32% (yoy), dan subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi 0,49% (yoy) (Grafik 3.9).

Angkutan udara menjadi komoditas penyumbang inflasi tahunan terbesar pada triwulan II 2024. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap angkutan udara dalam rangka HBKN Idul Fitri, Idul Adha, cuti bersama (*long weekends*), dan musim pergantian tahun ajaran baru. Berdasarkan data pergerakan penumpang, total pergerakan penumpang pesawat di



Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Subkelompok Transportasi Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Subkelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

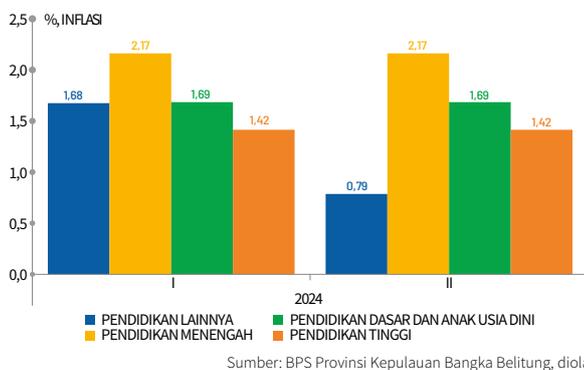
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 sebesar 486.145 orang, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 421.690 orang.

3.2.7 Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

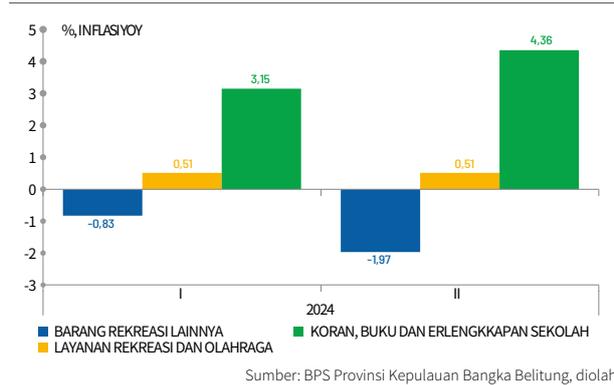
Pada triwulan II 2024, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,20% (yoy), lebih dalam dibandingkan deflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,17% (yoy). Kelompok ini memberikan andil deflasi tahunan sebesar 0,01% pada triwulan laporan. Penurunan indeks harga pada kelompok ini utamanya didorong oleh deflasi subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,86% (yoy). Sementara itu, subkelompok layanan informasi dan komunikasi mengalami inflasi 0,08% (yoy) (Grafik 3.10).

3.2.8 Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya pada triwulan II mengalami inflasi 0,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,99% (yoy). Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya memberikan andil 0,01% terhadap inflasi tahunan



Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Subkelompok Pendidikan Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Subkelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

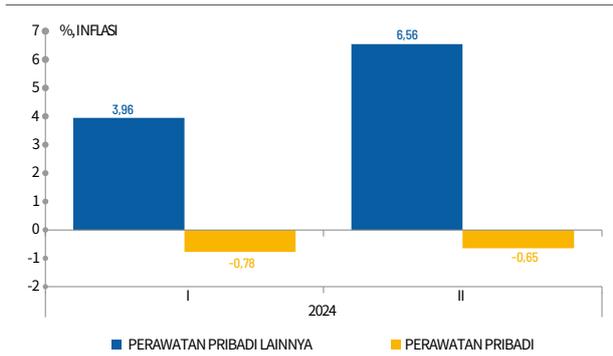
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inflasi kelompok ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga subkelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah yang tercatat mengalami inflasi 4,36% (yoy) dan subkelompok layanan rekreasi dan olahraga sebesar 0,51% (yoy). Peningkatan harga subkelompok tersebut didorong oleh naiknya permintaan masyarakat dalam rangka memasuki tahun ajaran baru. Laju inflasi kelompok ini tertahan oleh subkelompok barang rekreasi lainnya yang mengalami deflasi sebesar 1,97% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.11).

3.2.9 Kelompok Pendidikan

Kelompok pendidikan pada triwulan II 2024 mengalami inflasi 1,52% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,76% (yoy). Kelompok pendidikan memberikan andil 0,05% terhadap inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh subkelompok tercatat mengalami inflasi, antara lain subkelompok pendidikan dasar dan anak usia dini sebesar 1,69% (yoy), subkelompok pendidikan menengah 2,17% (yoy), subkelompok pendidikan tinggi inflasi 1,42% (yoy), dan subkelompok pendidikan lainnya sebesar 0,79% (yoy).

3.2.10 Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Pada triwulan II 2024, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 1,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,87% (yoy). Secara tahunan, kelompok ini menyumbang andil inflasi sebesar 0,15% (yoy) terhadap inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II, lebih rendah dibandingkan



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Subkelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Periode Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

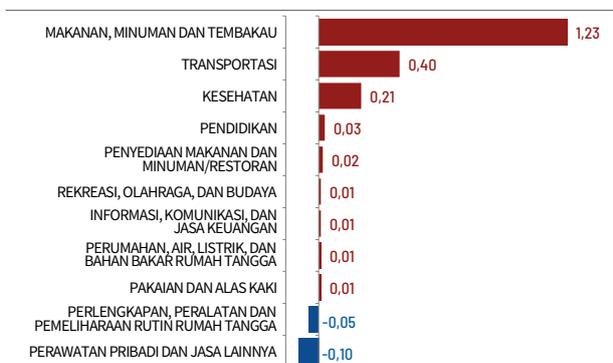
periode triwulan I 2024 yang memberikan andil sebesar 0,17%. Adapun komoditas yang memberikan andil inflasi tahunan terbesar adalah nasi dengan lauk sebesar 0,03%.

3.2.11 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan II 2024 mengalami inflasi 1,17% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,42% (yoy). Pada triwulan berjalan, kelompok ini memberikan andil 0,07% terhadap inflasi tahunan, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,03%. Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok perawatan pribadi lainnya sebesar 6,56% (yoy). Sementara itu, subkelompok jasa lainnya tercatat stabil sedangkan subkelompok perawatan pribadi mengalami deflasi 0,65% (yoy) (Grafik 3.13).

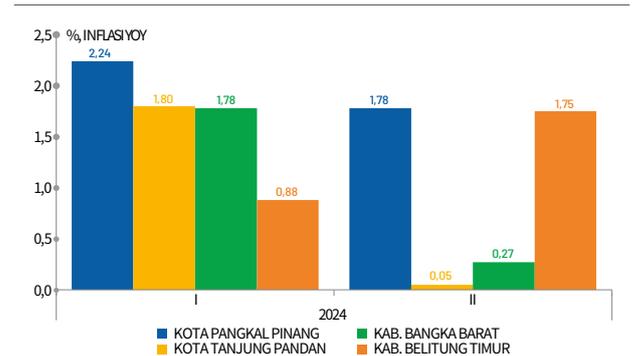
3.3 INFLASI SPASIAL

Sehubungan dengan penyesuaian Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2022 oleh Badan Pusat Statistik, saat ini terdapat 4 Kabupaten/Kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di wilayah Provinsi Kepulauan



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kota Pangkalpinang



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota IHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II 2024

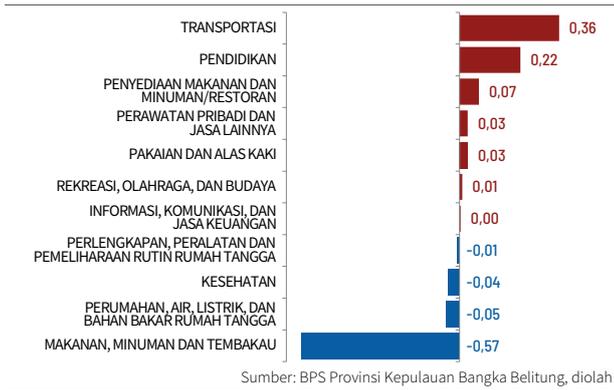
Bangka Belitung. Kabupaten/Kota IHK sebelumnya ada adalah Kota Pangkalpinang dan Kota Tanjungpandan, sedangkan tambahan baru adalah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur. Pada triwulan II 2024, seluruh Kabupaten/Kota IHK tercatat mengalami inflasi secara tahunan. Kota Pangkalpinang mengalami inflasi 1,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 2,24% (yoy). Kota Tanjungpandan mengalami inflasi 0,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,80% (yoy). Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,78% (yoy). Lebih lanjut, Kabupaten Belitung Timur mengalami inflasi 1,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 0,88% (yoy).

3.3.1 Inflasi Kota Pangkalpinang

Kota Pangkalpinang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya 2,24% (yoy). Kondisi ini didorong oleh kenaikan indeks harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran kecuali subkelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan subkelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Subkelompok penyumbang inflasi tahunan terbesar pada triwulan II 2024 di Kota Pangkalpinang adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil 1,23%, serta tercatat mengalami inflasi sebesar 3,95% (yoy). Penyumbang andil inflasi terbesar selanjutnya adalah kelompok transportasi, yaitu sebesar 0,40% dengan tingkat inflasi 2,94% (yoy).

3.3.2 Inflasi Kota Tanjungpandan

Pada triwulan II 2024, Kota Tanjungpandan tercatat mengalami inflasi 0,05% (yoy), lebih rendah

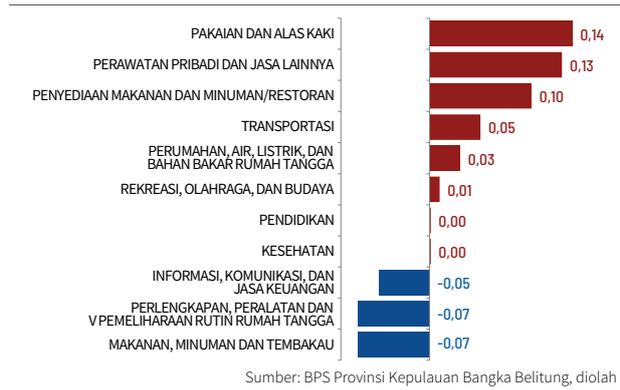


Grafik 3.16 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kota Tanjungpandan

dibandingkan triwulan sebelumnya 1,80% (yoy). Inflasi Kota Tanjungpandan didorong oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, kecuali kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok transportasi menjadi kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar, yaitu 0,36% terhadap inflasi tahunan Kota Tanjungpandan, serta mengalami inflasi 2,97% (yoy).

3.3.3 Inflasi Kabupaten Bangka Barat

Pada triwulan II 2024, Kabupaten Bangka Barat mengalami inflasi 0,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 1,78% (yoy). Laju inflasi Kabupaten Bangka Barat didorong oleh inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran, kecuali kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok makanan, minuman dan tembakau; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah pakaian



Grafik 3.17 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kabupaten Bangka Barat

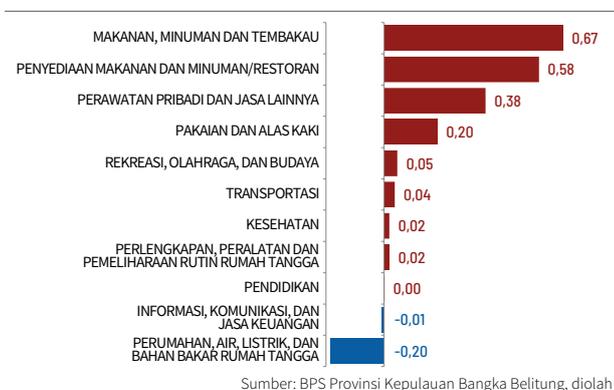
dan alas kaki dengan andil tahunan 0,14% dengan tingkat inflasi 3,15% (yoy).

3.3.4 Inflasi Kabupaten Belitung Timur

Pada triwulan II 2024, Kabupaten Belitung Timur tercatat mengalami inflasi 1,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 0,88% (yoy). Laju inflasi pada Kabupaten Belitung Timur pada triwulan II didorong oleh inflasi pada sebagian besar kelompok pengeluaran, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kabupaten Belitung Timur adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,67% dengan inflasi sebesar 1,69% (yoy). Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga turut menyumbang andil cukup besar terhadap inflasi Kabupaten Belitung Timur, yakni sebesar 0,58% dengan tingkat inflasi 5,86% (yoy).

3.4 TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2024

Pada Juli 2024, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi 0,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,08% (yoy). Capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juli 2024 berada di bawah sasaran inflasi nasional tahun 2024 sebesar 2,5±1%, seiring dengan realisasi inflasi bulanan sepanjang Mei s.d. Juli 2024 yang tercatat mengalami deflasi cukup dalam. Berdasarkan kelompok pengeluaran, sebagian besar kelompok tercatat mengalami inflasi, kecuali kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan,



Grafik 3.18 Perkembangan Andil Inflasi Triwulan II 2024 Kabupaten Belitung Timur

dan pemeliharaan rutin rumah tangga; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Pada tahun 2024, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan semakin terkendali serta lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2023. Secara umum, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisiko didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, tembakau seiring dengan relaksasi dan/atau kenaikan HET sejumlah komoditas pangan seperti beras, jagung, dan gula. Berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 10% pada tahun 2024 turut berisiko mendorong inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih lanjut. Dari sisi permintaan, dengan mengacu pada konsistensi kinerja sektor ekonomi unggulan, utamanya timah yang menunjukkan peningkatan secara bulanan serta terus berlanjutnya upaya-upaya untuk mendorong sumber ekonomi baru yang memiliki daya ungkit, daya beli masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan diperkirakan membaik.

3.5 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan pengendalian inflasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Dari sisi keterjangkauan harga, TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara intensif melakukan *monitoring* harga dan stok untuk memastikan harga pangan sesuai dengan HET yang ditentukan. TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mendorong optimalisasi kegiatan Operasi Pasar/Pasar Murah/SPHP/Gerakan Pangan Murah. Sepanjang Januari s.d. Juli 2024, telah dilaksanakan 105 kali Operasi Pasar/Pasar Murah/SPHP/Gerakan Pangan Murah di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bersinergi dengan OPD terkait.

Dari sisi ketersediaan pasokan, Bank Indonesia bersama TPID Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri. Sebagai *kick-off* awal program implementasi *digital farming*, pada Juni 2024, Bank Indonesia bersama dengan

startup Aqua-Tech eFishery memberikan Bimbingan Teknis *Digital Farming* Budidaya Ikan Air Tawar di Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan bimbingan diikuti oleh peserta yang berasal dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Pinang Raya, Pembudidaya Ikan lainnya, serta Kelompok Pengolah Hasil Pemasaran (Poklahsar) di Desa Pinang Sebatang. Bimbingan teknis diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi tentang *digital farming* sehingga mendorong efisiensi dan hasil produksi, serta mengurangi waktu dan biaya produksi Pokdakan.

Untuk mengantisipasi inflasi dari sisi komoditas pangan strategis, Bank Indonesia bersama TPID Kepulauan Bangka Belitung juga melaksanakan *capacity building* pengolahan dan kemitraan pasar komoditas beras kepada klaster pangan. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sragen pada Agustus 2024 dan telah diikuti oleh OPD terkait serta 4 Gapoktan/Poktan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui kegiatan *capacity building* dan kemitraan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Gapoktan/Poktan terkait pengelolaan input pertanian, kapabilitas produksi, kualitas pengolahan produk, serta hilirisasi beras.

Lebih lanjut, dalam mendorong ketersediaan pasokan, Bank Indonesia turut bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, serta Kabupaten/Kota Bangka Belitung untuk memperluas Kerjasama Antara Daerah (KAD), baik intra maupun antar provinsi berupa *business matching* KAD. Pada Mei 2024, di Kota Bandung dilaksanakan KAD antarprovinsi dengan skema *business-to-business* (B2B) antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pelaku usaha Kabupaten Bandung. KAD ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan aneka cabai, bawang merah, dan sayuran di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya pada Maret 2024, turut difasilitasi KAD intra provinsi dengan skema B2B daging sapi beku antara Koperasi Pengendali Inflasi Daerah (KPID) Kabupaten Belitung Timur dengan Bulog Kabupaten Belitung. KAD ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Belitung Timur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Dari sisi kelancaran distribusi, Bank Indonesia bersama mitra strategis terus berkomitmen untuk mendukung prioritas distribusi pangan dari dan ke wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Pada Maret 2024, Bank Indonesia turut memfasilitasi distribusi komoditas pangan daging sapi beku yang berasal dari Kota Jakarta menuju Pulau Belitung, untuk mendorong ketersediaan stok dan kelancaran distribusi menghadapi HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Komunikasi efektif terus terjalin untuk memperkuat koordinasi antaranggota TPID Bangka Belitung. Penguatan data dan informasi harga terkini melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan harga pangan, khususnya pada 10 komoditas pangan strategis antara lain beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir. Digitalisasi data dan informasi secara kontinu dilakukan, salah satunya melalui D'Parai (*Dashboard* Pemantauan Harga dan Inflasi). Selain itu, peningkatan komitmen TPID juga terus dilakukan sebagai langkah koordinasi untuk mengantisipasi potensi risiko inflasi ke depan, antara lain melalui penyelenggaraan rapat koordinasi *High Level Meeting* (HLM) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hingga triwulan II 2024, telah dilaksanakan HLM TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, HLM Kabupaten Bangka Selatan, serta HLM Kabupaten Belitung Timur.

Dukungan komunikasi efektif turut diberikan oleh Ketua TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden terkait *Monitoring* dan Evaluasi Pengendalian Inflasi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan Surat Edaran No.

500/0119c/IV kepada seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus menggalakkan strategi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K. Pengendalian terutama menjamin ketersediaan stok pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat melalui aksi nyata di masa Ramadhan dan HBKN Idul Fitri.

Sejalan dengan strategi pengendalian inflasi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif), Bank Indonesia turut senantiasa mendorong berbagai upaya pengendalian inflasi, termasuk untuk komoditas pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sinergi dan kolaborasi bersama TPID Bangka Belitung diperkuat dengan terus melanjutkan program-program unggulan GNPIP antara lain 1) Penguatan Ketahanan Komoditas Pangan Strategis melalui Optimalisasi Perluasan Penerapan *Good Agriculture Practice* (GAP), Replikasi *Best Practice* Pengembangan Klaster Pangan, dan Hilirisasi Produk Pertanian; 2) Penguatan Kapasitas Budidaya Pangan Mandiri; 3) Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); 4) Dukungan Fasilitasi Distribusi Pangan; 5) Dukungan Optimalisasi Operasi Pasar/ Pasar Murah/SPHP/Gerakan Pangan Murah; 6) Penguatan Digitalisasi dan Data Pangan; serta 7) Penguatan Koordinasi dan Komunikasi melalui Penguatan Koordinasi Kelembagaan, Penguatan *Capacity Building*, serta Pengendalian Ekspektasi.



BOKS 2

Capacity Building dan Evaluasi Tengah Tahun Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024



Sumber: TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B2.1 Capacity Building dan Evaluasi Tengah Tahun TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung, Juni 2024

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 pada 14 Juni 2024, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan *Capacity Building* dan Evaluasi Tengah Tahun TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan *Capacity Building* dan Evaluasi Tengah Tahun dilaksanakan pada 30 Juni s.d. 4 Juli 2024 serta dihadiri oleh anggota TPID Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Evaluasi Tengah Tahun 2024 yang dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri oleh Kepala Dinas Provinsi, Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Perekonomian tingkat Kabupaten/Kota, serta tim teknis TPID tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan selanjutnya menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan TPID Provinsi DKI Jakarta yang merupakan peraih TPID *Award* Kategori Provinsi Terbaik 2023 wilayah Jawa dan Bali. Pada kesempatan tersebut, disampaikan mengenai Pelaporan TPID, strategi pengendalian inflasi, evaluasi kinerja TPID, serta *success story* pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta. Konsistensi dan keselarasan kebijakan, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sinergi antar-*stakeholders*, anggaran dan program kerja, serta pengembangan sistem IT menjadi lima strategi utama TPID untuk mengendalikan inflasi.

Selanjutnya, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung melakukan studi banding ke TPID Kabupaten Banyuwangi yang merupakan peraih TPID Kategori Kabupaten/Kota Terbaik 2023 wilayah



Sumber: TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B2.2 Studi Banding TPID se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke TPID Kabupaten Banyuwangi, Juni 2024

Jawa dan Bali. Dalam kesempatan ini, turut dilakukan peninjauan potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kabupaten Banyuwangi melalui kunjungan kepada Gapoktan Turi Putih selaku penghasil komoditas beras dan cabai rawit.

Melalui pelaksanaan kegiatan *Capacity Building* dan Evaluasi Tengah Tahun ini, TPID se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas teknis, mendorong kemandirian pangan, serta mencapai dan memelihara kestabilan inflasi wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, TPID se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut dapat menambah dan memperkaya pengetahuan *key success* program-program unggulan TPID Provinsi DKI Jakarta dan TPID Kabupaten Banyuwangi yang telah berhasil mendapatkan *championship* TPID Awards.

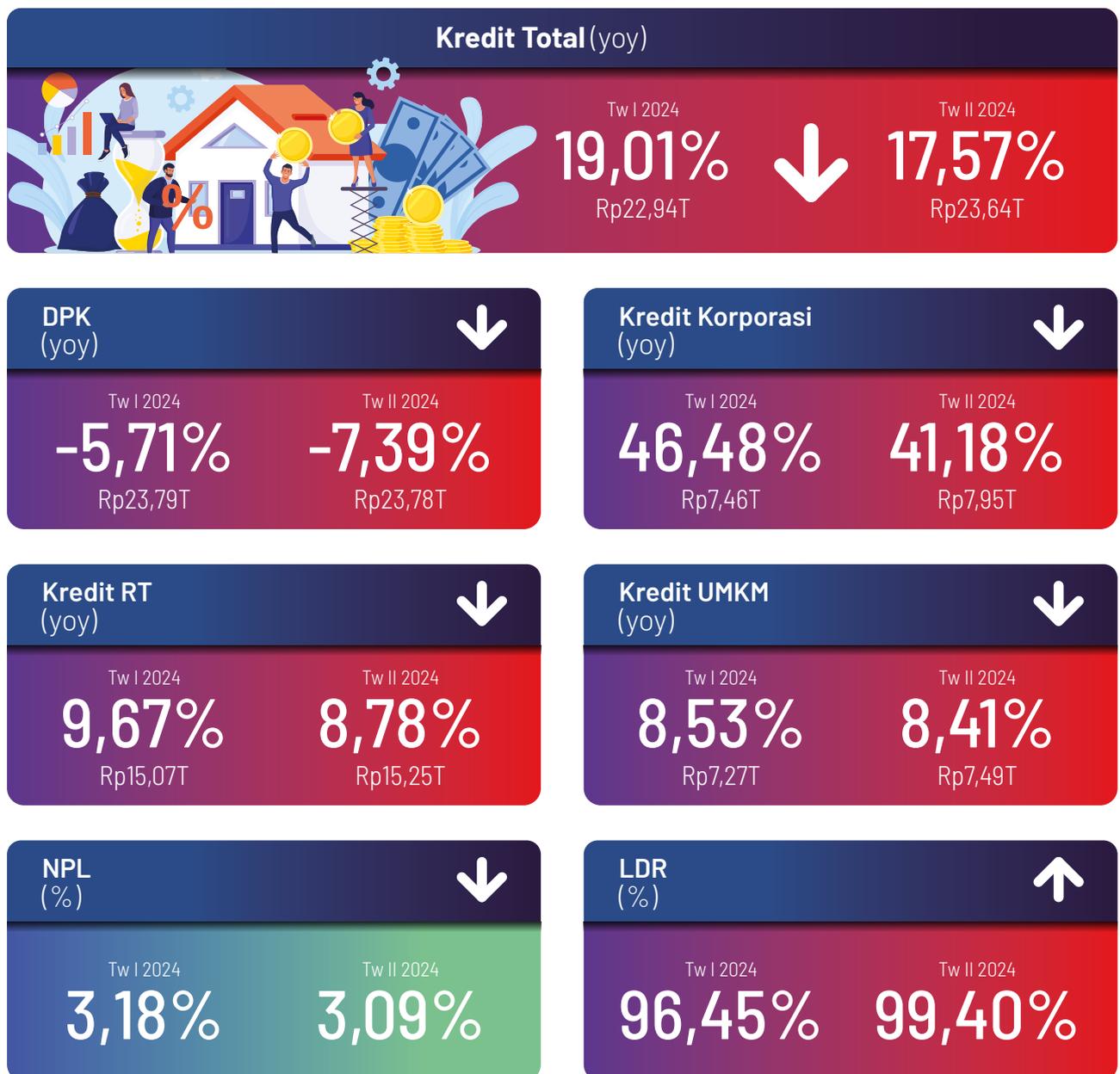


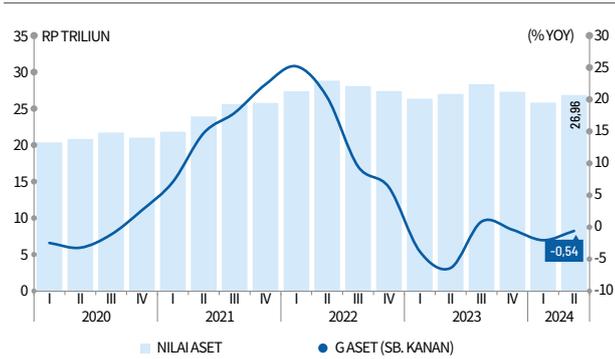
Foto : Muntok, Bangka Barat.

BAB 4

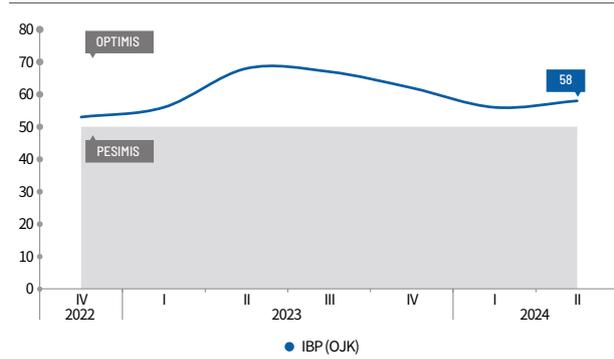
STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode triwulan II 2024 terpantau tetap berdaya tahan. Hal tersebut seiring dengan kualitas kredit yang semakin baik ditengah kinerja penyaluran kredit yang masih tetap tumbuh tinggi. Namun demikian, ditengah perbaikan kinerja penyaluran kredit tersebut, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terpantau masih belum optimal sehingga berdampak pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang semakin meningkat.





Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



Grafik 4.2 Indeks Orientasi Bisnis Perbankan

4.1 KINERJA PERBANKAN

4.1.1 Kondisi Umum

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap resilien di tengah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stabil. Resiliensi sektor keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut seiring dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) triwulan II 2024 yang berada dalam tren menurun dan terkendali di bawah *threshold*. Lebih lanjut, kondisi tersebut turut didukung oleh kinerja intermediasi perbankan yang juga tercatat tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan penyaluran kredit pada triwulan II 2024 ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi, di tengah kredit modal kerja dan konsumsi yang tumbuh lebih moderat.

Total aset perbankan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tercatat membaik pada triwulan II 2024.

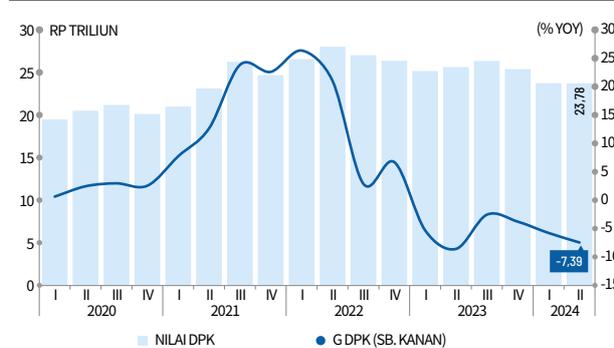
Aset Bank pada periode perjalanan tercatat sebesar Rp26,96 triliun atau berkontraksi sebesar 0,54% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi lebih dalam sebesar 1,99% (yoy) (Grafik 4.1). Penguatan aset perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sejalan dengan peningkatan optimisme perbankan yang tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IBP pada triwulan II 2024 sebesar 58 atau berada dalam level optimis dan lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 56 (Grafik 4.2). Gambaran tersebut merupakan wujud optimisme ekspektasi perbankan akan meningkatnya fungsi intermediasi yang diiringi dengan penguatan pengelolaan risiko.

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

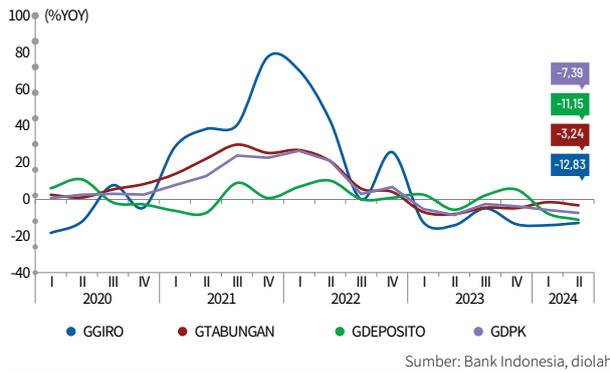


DPK triwulan II 2024 tercatat sebesar Rp23,79 Triliun, berkontraksi sebesar 7,39% (yoy) atau lebih dalam dari kontraksi periode sebelumnya sebesar 5,71% (yoy) (Grafik 4.3).

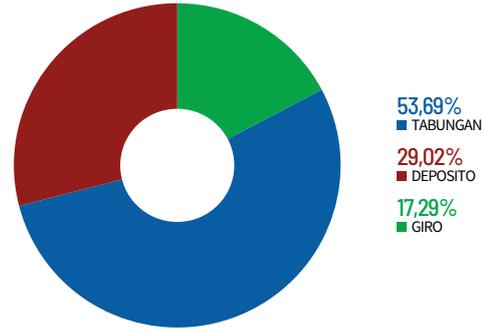
Raihannya tersebut disumbang oleh kontraksi yang terjadi pada seluruh komponen DPK yakni Tabungan, Deposito dan Giro. Kinerja Tabungan pada periode berjalan tercatat sebesar Rp12,77 triliun atau berkontraksi sebesar 3,24% (yoy) lebih dalam dibandingkan triwulan I 2024 yang berkontraksi sebesar 1,54% (yoy). Sementara itu, Deposito tercatat sebesar Rp6,90 Triliun atau berkontraksi sebesar 11,15% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 7,61% (yoy). Lebih lanjut, kinerja Giro mencatatkan kontraksi sebesar 12,83% (yoy), lebih baik dari kontraksi periode sebelumnya yang tercatat lebih dalam sebesar 14,09% (yoy) (Grafik 4.4).



Grafik 4.3 Perkembangan Penghimpunan DPK

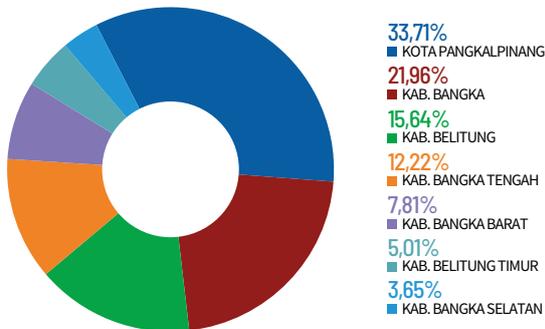


Grafik 4.4 Perkembangan DPK Berdasarkan Komponen

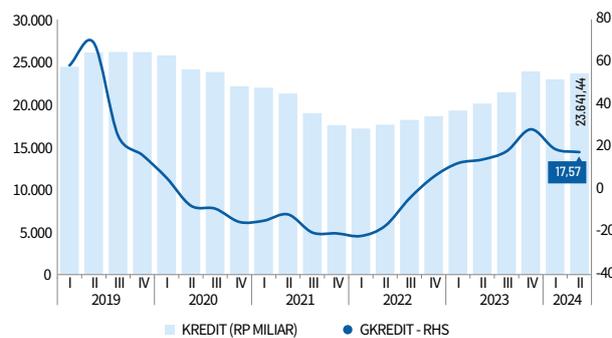


Grafik 4.5 Pangsa DPK Perbankan

Tabungan masih mendominasi penghimpunan DPK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp12,77 triliun atau pangsanya mencapai 53,69% dari total DPK, diikuti oleh Deposito dan Giro yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 29,02% dan 17,29% (Grafik 4.5). Secara spasial, DPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung utamanya bersumber dari Kota Pangkalpinang sebesar Rp8,07 triliun atau pangsanya sebesar 33,71% dari total DPK. Kinerja penghimpunan DPK terbesar berikutnya terdapat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dengan pangsa masing-masing mencapai 21,96% dan 15,64%. Sementara itu, DPK terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan dengan pangsa hanya sebesar 3,65% (Grafik 4.6).



Grafik 4.6 Pangsa DPK Menurut Kabupaten/Kota

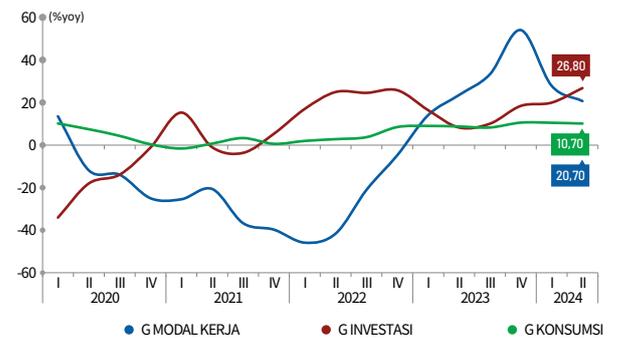


Grafik 4.7 Perkembangan Kredit Perbankan

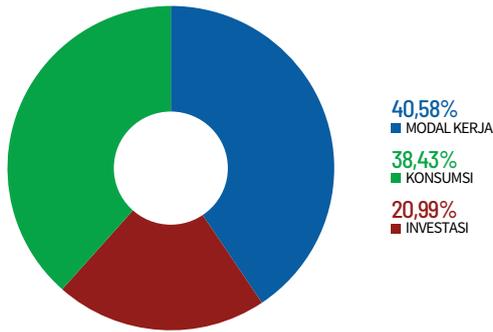
4.1.3 Perkembangan Kredit



Kinerja intermediasi perbankan yang baik, tecermin dari penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tetap tumbuh tinggi. Pada triwulan II 2024, kredit perbankan telah tersalurkan sebesar Rp23,64 triliun, tumbuh sebesar 17,54% (yoy) meskipun tercatat melambat dari periode sebelumnya sebesar 19,01% (yoy) (Grafik 4.7). Pertumbuhan kinerja penyaluran kredit tersebut, didukung oleh seluruh jenis kredit diantaranya modal kerja, investasi dan konsumsi yang tumbuh *double-digit*. Pertumbuhan tertinggi diraih oleh kredit investasi yang tercatat sebesar Rp4,96 triliun atau tumbuh sebesar 26,80% (yoy). Pertumbuhan kredit investasi tersebut bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,96% (yoy). Lebih lanjut, kredit modal kerja dan konsumsi juga turut berkontribusi dalam pertumbuhan kinerja kredit keseluruhan, seiring dengan catatan pertumbuhan masing-masing sebesar 20,70% (yoy) dan 10,17% (yoy) (Grafik 4.8).



Grafik 4.8 Pertumbuhan Jenis Kredit Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

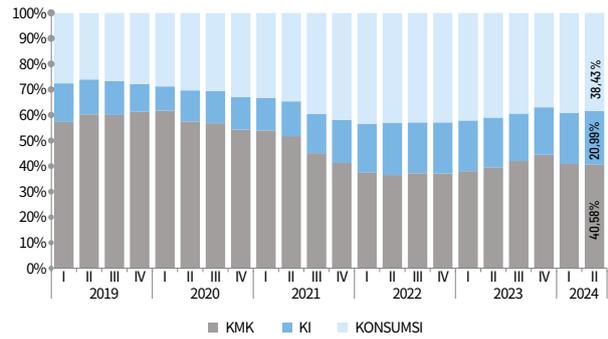
Grafik 4.9 Pangsa Kredit Perbankan

Berdasarkan jenis kreditnya, kredit modal kerja mendominasi keseluruhan penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada triwulan II 2024, kredit modal kerja telah disalurkan sebesar Rp9,60 triliun atau pangsa sebesar 40,58% dari total kredit, diikuti oleh kredit konsumsi dan investasi yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 38,43% dan 20,99% (Grafik 4.9). Di sisi lain, tren yang baik ditunjukkan oleh kinerja kredit investasi. Pertumbuhan kredit investasi pada triwulan II 2024, turut menyebabkan adanya peningkatan pangsa kredit investasi menjadi 20,99% dari total kredit (Grafik 4.10). Pangsa penyaluran kredit yang semakin besar pada sektor produktif tersebut, menjadi indikasi yang baik dalam rangka memberikan *multiplier effect* ke berbagai sektor lainnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.1.4 Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas



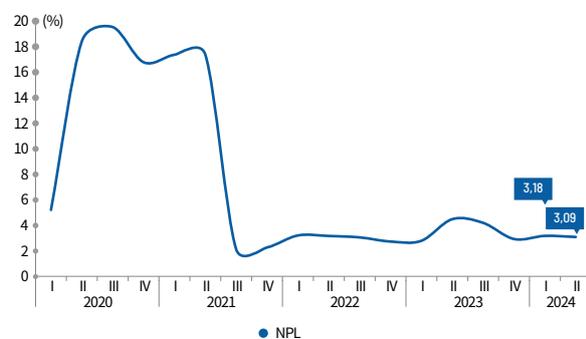
Penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 semakin berkualitas, seiring dengan risiko kredit yang semakin terjaga. Hal tersebut seiring dengan *Non-Performing Loan* (NPL) pada periode berjalan tercatat sebesar 3,09% (Grafik 4.11), lebih rendah dari periode sebelumnya 3,18% dan di bawah batas *threshold* sebesar 5%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

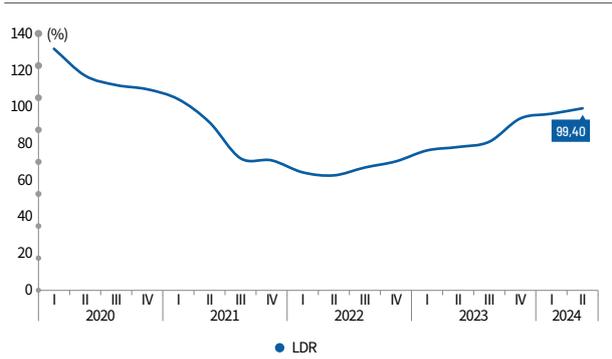
Grafik 4.10 Perkembangan Pangsa Jenis Kredit Perbankan


Tingkat intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap tinggi namun diiringi dengan peningkatan risiko likuiditas perbankan. Pada triwulan II 2024, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 99,40%, meningkat dari periode sebelumnya sebesar 96,45% (Grafik 4.12). Peningkatan LDR tersebut didorong oleh fenomena penurunan kinerja penghimpunan DPK di tengah pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa hampir seluruh DPK yang terhimpun telah tersalurkan berbentuk kredit ke masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penguatan risiko likuiditas ke depan perlu menjadi perhatian perbankan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Non-Performing Loan (NPL)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Loan to Deposit (LDR)

4.2 PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan sektoral, pembiayaan perbankan utamanya disalurkan kepada Lapangan Usaha (LU) Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyaluran kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi kepada LU Perdagangan Besar Eceran; diikuti oleh LU Pertambangan Penggalian dan LU Pertanian Perburuan Kehutanan. Kredit pada LU Perdagangan

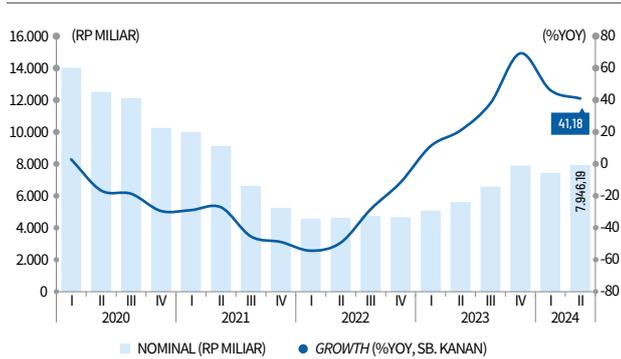
Besar Eceran menjadi penyaluran tertinggi, dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp4,83 triliun atau 20,43% dari total kredit. Lebih lanjut, kredit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga cukup besar tersalurkan pada LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan, dengan pangsa masing-masing mencapai 13,55% dan 10,81%.

Penyaluran kredit ke sektor utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih tercatat tumbuh tinggi, turut menopang kinerja pertumbuhan kredit pada triwulan II 2024. Dari ketiga LU dengan penyaluran kredit tertinggi tersebut, keseluruhannya mencatatkan pertumbuhan *double-digit*. Kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 2024 tercatat tumbuh sebesar 32,12% (yoy), diikuti kredit LU Pertambangan dan Penggalian yang juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 47,58% (yoy). Lebih lanjut, kredit LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan juga tercatat tumbuh sebesar 13,78% (yoy).

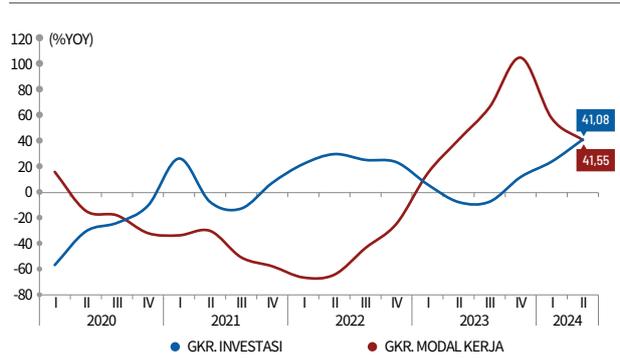
Tabel 4.1 Penyaluran Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN USAHA	SATUAN	2023				2024		GROWTH (%YOY)
			I	II	III	IV	I	II	
1	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	Rp Milliar	2.165	2.247	2.309	2.378	2.502	2.557	13,78%
2	PERIKANAN	Rp Milliar	403	424	455	458	453	451	6,54%
3	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	Rp Milliar	2.072	2.171	2.510	3.462	3.139	3.204	47,58%
4	INDUSTRI PENGOLAHAN	Rp Milliar	1.326	1.338	1.367	1.188	1.082	1.149	-14,15%
5	LISTRIK, GAS DAN AIR	Rp Milliar	199	194	187	177	170	150	-22,59%
6	KONSTRUKSI	Rp Milliar	292	349	413	323	299	323	-7,33%
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	Rp Milliar	3.239	3.656	4.219	4.879	4.670	4.831	32,12%
8	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	Rp Milliar	258	259	261	311	310	358	38,65%
9	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	Rp Milliar	167	163	173	167	163	162	-0,62%
10	PERANTARA KEUANGAN	Rp Milliar	16	15	18	522	21	20	36,20%
11	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	Rp Milliar	458	449	447	474	494	670	49,14%
12	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	Rp Milliar	0	0	0	0	0	0	322,31%
13	JASA PENDIDIKAN	Rp Milliar	21	20	21	23	21	23	16,16%
14	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	Rp Milliar	157	163	159	150	147	152	-6,65%
15	JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN PERORANGAN LAINNYA	Rp Milliar	363	393	432	522	465	471	19,89%
16	JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA	Rp Milliar	20	22	25	27	32	35	58,29%
17	BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	Rp Milliar	0	0	0	0	0	0	0,00%
18	KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA	Rp Milliar	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA	Rp Milliar	8.120	8.246	8.444	8.824	8.975	9.084	10,17%
TOTAL		0,16%	19.278	20.109	21.440	23.885	22.943	23.641	17,57%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.13 Pertumbuhan Total Kredit Korporasi



Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Jenis Kredit

4.2.1 Kredit Korporasi

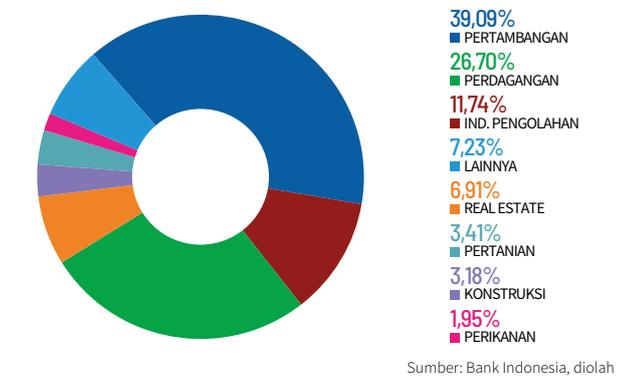


Kredit Korporasi pada triwulan II 2024 tercatat tumbuh tinggi. Kredit korporasi pada periode berjalan telah tersalurkan sebesar Rp7,95 triliun, atau tumbuh sebesar 41,18% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 46,48% (yoy) (Grafik 4.13). Berdasarkan besaran pangsa, penyaluran kredit korporasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi pada kredit modal kerja dengan pangsa mencapai 69,40% dari total kredit korporasi, diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 30,56%.

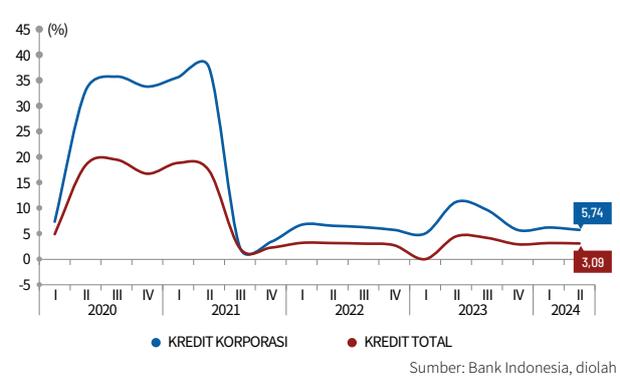
Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit korporasi jenis modal kerja. Kredit modal kerja korporasi pada triwulan II 2024 tercatat tumbuh sebesar 41,08% (yoy), meskipun juga tercatat melambat dibanding sebelumnya sebesar 58,06% (yoy).

Selain itu, kredit investasi korporasi tercatat tumbuh sebesar 41,55% (yoy), bahkan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 24,30% (yoy) (Grafik 4.14).

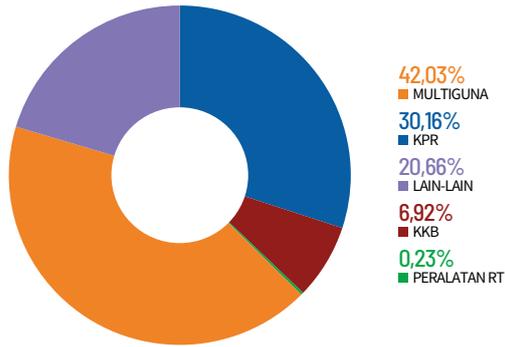
Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan kredit korporasi utamanya terjadi pada LU Pertambangan, LU Perdagangan dan LU Industri Pengolahan. LU Pertambangan dengan pangsa terbesar yakni 39,09% (Grafik 4.15), tumbuh sebesar 47,54% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 52,80% (yoy). Lebih lanjut, penyaluran kredit korporasi pada LU Perdagangan dengan pangsa mencapai 26,70%, tercatat tumbuh signifikan sebesar 103,80% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit korporasi ke LU Industri Pengolahan menjadi penyaluran terbesar berikutnya. Namun demikian, sejalan dengan ketidakpastian kinerja industri pengolahan pasca proses hukum tata niaga timah, turut menekan pertumbuhan penyaluran kredit menjadi berkontraksi sebesar 17,76% (yoy), meskipun tercatat membaik dari triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi sedalam 23,00% (yoy).



Grafik 4.15 Pertumbuhan Total Kredit Korporasi



Grafik 4.16 Pertumbuhan Kredit Korporasi Menurut Jenis Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

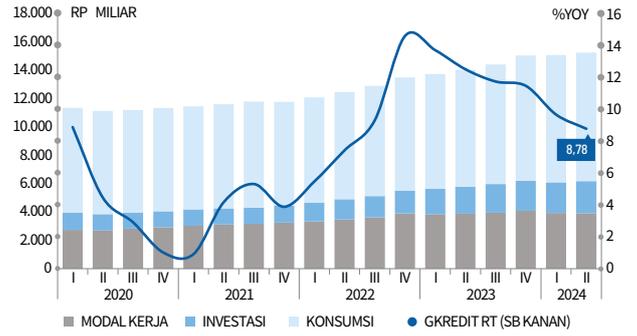
Grafik 4.17 Pangsa Kredit Konsumsi Rumah Tangga

4.2.2 Kredit Rumah Tangga di Perbankan



Kredit ke sektor rumah tangga menjadi penyumbang terbesar kredit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pangsa sebesar 64,52% terhadap total kredit perbankan. Pada triwulan II 2024, realisasi kredit rumah tangga mencapai Rp15,25 triliun atau tumbuh 8,78% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,67% (yoy) (Grafik 4.18). Secara umum, kredit rumah tangga terdiri dari kredit produktif (kredit modal kerja dan kredit investasi) dan kredit konsumsi.

Kredit rumah tangga didominasi kredit konsumsi dengan pangsa mencapai 59,53% atau senilai Rp9,08 triliun. Pada triwulan II 2024, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 10,18 (yoy) sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 10,60% (yoy). Penggunaan kredit konsumsi didominasi oleh kredit multiguna dan kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) (Grafik 4.17). Kredit pemilikan rumah tinggal (KPR) sebagian besar digunakan untuk pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 dengan nilai realisasi sebesar Rp2,46 triliun atau sebesar 27,04% dari total kredit rumah tangga. Sementara itu, kredit multiguna didominasi oleh kredit multiguna untuk keperluan lainnya sebesar Rp3,46 triliun atau pangsa sebesar 38,08% dari total kredit rumah tangga.



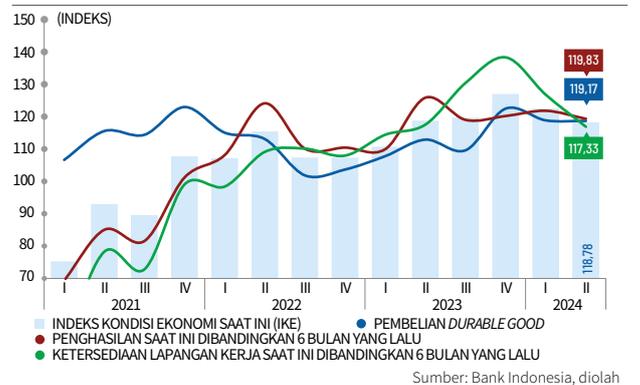
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Realisasi kredit produktif (kredit rumah tangga untuk modal kerja dan investasi) mencapai Rp6,17 triliun atau sebesar 40,47% dari total kredit yang digunakan oleh rumah tangga. Pada triwulan II 2024, kredit produktif rumah tangga juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,79% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 8,33% (yoy).

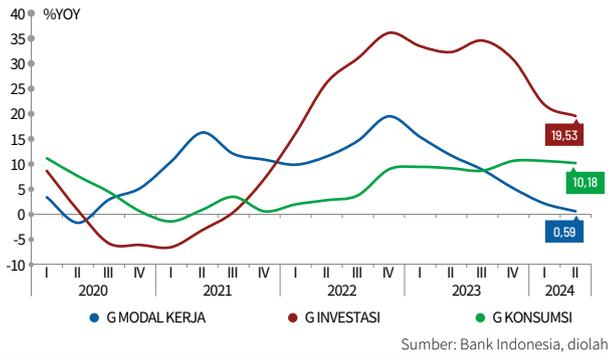
Lebih lanjut, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia, keyakinan konsumen pada triwulan II 2024 tetap berada pada level optimis (lebih dari 100) sebesar 122,67, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 123,00 (Grafik 4.19). Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat masih tetap optimis akan ada kenaikan pendapatan ke depan termasuk yang dialokasikan untuk pembayaran angsuran kredit kepada perbankan. Hasil survei tersebut juga menunjukkan masyarakat melihat bahwa pemulihan ekonomi akan terus berlanjut meskipun saat ini mengalami sedikit perlambatan.

Kualitas kredit rumah tangga tetap terjaga, tecermin pada rasio NPL yang relatif stabil berada di bawah 5% pada triwulan II 2024 (Grafik 4.21).

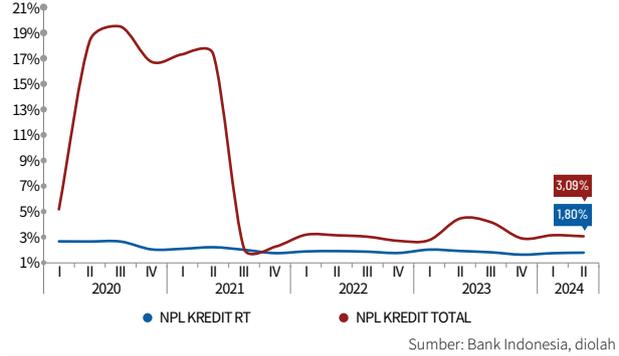


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Saat ini



Grafik 4.20 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit



Grafik 4.21 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Persentase NPL kredit rumah tangga 1,80%, mengalami sedikit peningkatan dari triwulan sebelumnya 1,76%. Peningkatan tersebut terutama terjadi pada rasio NPL kredit rumah tangga pada jenis investasi dan konsumsi. Namun demikian, rasio NPL kredit rumah tangga masih di bawah rasio NPL kredit total yang tercatat 3,09%. Eksposur kredit rumah tangga terhadap risiko stabilitas sistem keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terkendali dengan terjaganya NPL pada level yang rendah.

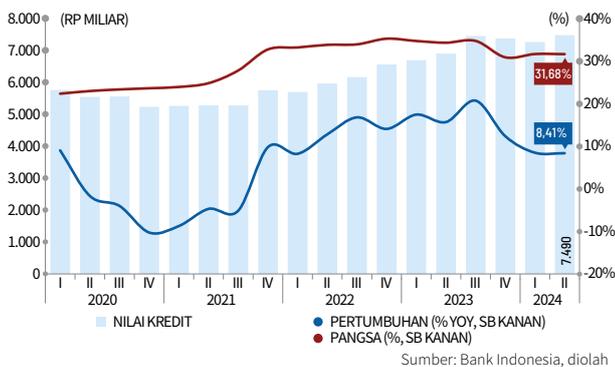
Belitung pada triwulan ini mencapai Rp7,49 triliun atau 31,68% terhadap total kredit perbankan (Grafik 4.22).

4.3 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMK

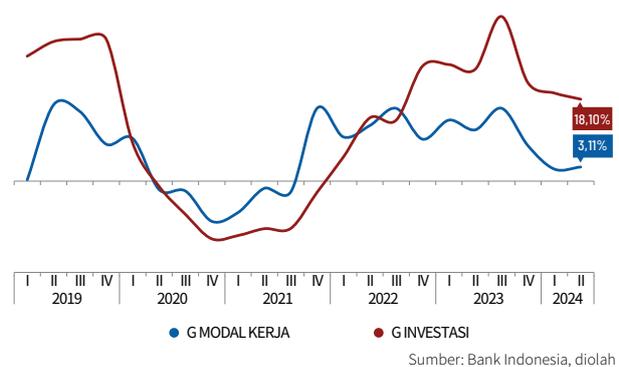


Penyaluran kredit UMKM pada triwulan II 2024 tetap tumbuh positif 8,41% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,53% (yoy). Secara nominal, penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka

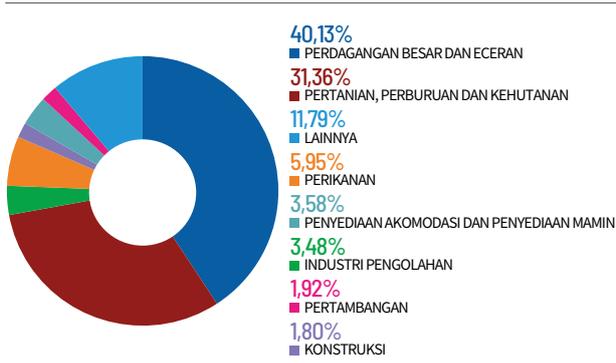
Dari sisi sektoral, kredit UMKM terutama disalurkan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran yaitu dengan pangsa 40,13%; LU Pertanian, Perburuan dan Perikanan sebesar 31,36% dan LU Perikanan 5,95% (Grafik 4.24). Realisasi kredit LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II 2024 tumbuh 5,72% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,91% (yoy). Demikian halnya dengan kredit LU Perikanan juga tumbuh 5,61% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,70% (yoy). Selain itu itu, kredit LU



Grafik 4.22 Perkembangan Kredit UMKM



Grafik 4.23 Perkembangan Kredit UMKM Menurut Jenis Kredit



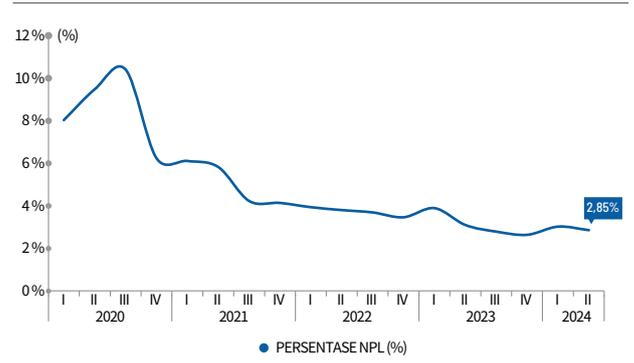
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Pangsa Kredit UMKM Secara Sektoral

Pertanian, Perburuan dan Kehutanan tumbuh 15,28% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,26% (yoy).

Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL pada triwulan II 2024 sebesar 2,85%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,02% (Grafik 4.25). Penurunan NPL kredit UMKM ini merupakan capaian kinerja yang sangat baik dalam rangka mendukung kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial (RPIM) sebesar 30%.

Bank Indonesia senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah, otoritas terkait dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OJK Regional 7, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Provinsi Bangka Belitung, dan perbankan senantiasa melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala mengenai peran pembiayaan perbankan ke sektor riil termasuk penyaluran KUR dan kredit UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dilakukan untuk mendorong peran intermediasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 NPL Kredit UMKM

perbankan untuk membiayai sektor ekonomi produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan koordinasi secara berkala ini juga dilakukan untuk mengetahui kendala atau hambatan yang selama ini dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan KUR dan kredit UMKM sehingga dapat diperoleh solusi bersama. Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan perbankan juga aktif memperluas penggunaan *digital payment* menggunakan QRIS kepada UMKM untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan meningkatkan kenyamanan serta kemudahan dalam bertransaksi.

Melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan juga berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya dan inovasi guna meningkatkan akses keuangan masyarakat di daerah. Percepatan akses keuangan daerah juga menjadi kunci dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi. Dengan adanya TPAKD, peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah dapat dipercepat sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

A large monument in Belitung, Indonesia, featuring a black meteorite on top of a square structure supported by four columns. The name 'Satam Square' is written in large red letters across the top, with 'Belitung' written below it. The monument is surrounded by a fountain with multiple water jets. In the background, there is a multi-story building and a blue sky with white clouds.

Satam Square

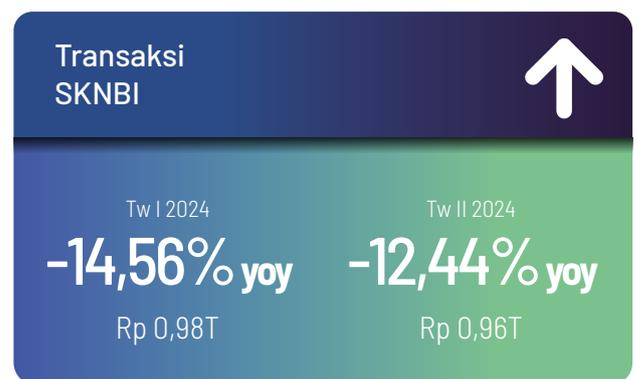
Belitung

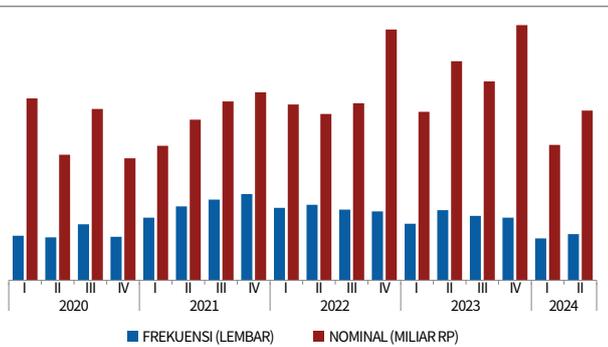
Foto : Monumen Satam Square, Kota Tanjungpandan

BAB 5

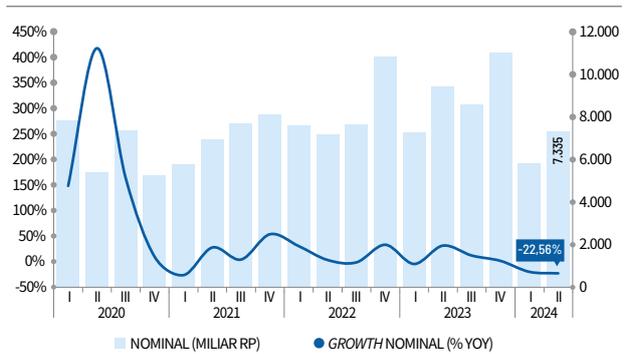
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan II 2024, transaksi nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tercatat tumbuh. Pertumbuhan transaksi nontunai tercatat pada transaksi QRIS, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Terjadi penurunan transaksi RTGS dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, transaksi tunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net inflow*, imbas aktivitas produksi dan ekspor timah yang belum normal. Transaksi tunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net inflow*. Kondisi *net inflow* ini sejalan dengan aktivitas produksi dan ekspor timah masih belum normal dikarenakan masih terdapat perusahaan yang masih menunggu persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi timah oleh Kementerian ESDM.





Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi RTGS


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2 Pertumbuhan Nominal Transaksi BI-RTGS

5.1 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

5.1.1 Perkembangan Transaksi BI-RTGS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara nominal, nilai transaksi RTGS pada triwulan II 2024 mencapai Rp7,34 triliun atau terkontraksi sebesar 22,56% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 19,61% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) di Perbankan. Pada triwulan II 2024, total DPK terkontraksi sebesar 7,99% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,60% (yoy).

Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh transaksi dari Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian

terbesar, diikuti oleh Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah.

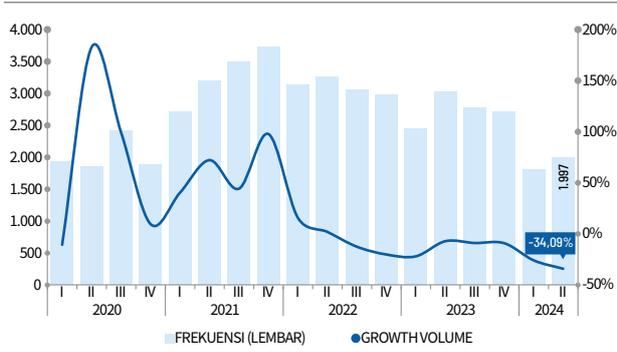
5.1.2 Perkembangan Pembayaran Transaksi SKNBI

Selama triwulan II 2024, nilai nominal transaksi kliring mencapai Rp959,5 miliar atau terkontraksi 12,44% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,56% (yoy). Sedangkan perputaran kliring dari sisi warkat mencapai 35.054 lembar atau terkontraksi 5,06% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,96% (yoy). Menurunnya nominal transaksi kliring dipengaruhi oleh perputaran ekonomi yang belum normal, salah satunya dipengaruhi oleh penurunan aktivitas produksi timah. Perputaran kliring harian pada triwulan II 2024 mencapai Rp89,45 miliar dengan jumlah warkat per hari sebanyak 2.022 lembar.

Tabel 5.1 Perputaran Kliring dan Cek/Bilyet Giro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KOMPONEN BELANJA	2021				2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Perputaran Kliring														
a. Nominal (Rp Juta)	1347996,61	1583065,53	1738613,65	2220013,99	1643178,88	1604550,53	1329023,73	1518780,14	1144808,56	1095734,15	1350534,85	1617759	978108	959479
b. Warkat (lembar)	46.529	51.163	50.520,00	56.553,00	47.297	47059	77654	45201	35.962	36.924	39.815	43.720	32.020	35.054
c. Nominal (%(yoy))	-30,94%	-12,79%	-12,48%	166%	219%	14%	-23,6%	-31,6%	-30,33%	-31,71%	1,62%	6,52%	-14,56%	-12,44%
d. Warkat (%(yoy))	-4,23%	6,85%	-3,91%	0,68%	1,65%	-8,02%	143,710%	-20,07%	-23,97%	-21,54%	-8,99%	-3,28%	-10,96%	-5,06%
Perputaran Per Hari														
a. Nominal (Rp Juta)	22.098,31	24.354,85	27.597,04	100.909,73	26.937,36	29.173,65	20.136,72	110.729,98	87.394,21	99.775,43	100.495,60	115.923,10	82.690	89.452
b. Warkat (lembar)	763	787	802	2.571	775	856	11.766	2.290	1.739	2.141	1.924,64	2.233	1.667	2.022
Kliring Debit Pengembalian														
a. Nominal (Rp Juta)	4.757	2.681	5.774	4.766	2.996	4.938	5.869	5.490	6.144	2.708	5.381	7.960	11.808	4.781
b. Warkat (lembar)	171	80	101	63	32	68	82	99	105	87	96	121	139	104
Jumlah Hari	61	65	63	22	61	55	66	60	62	53	62	61	58	52
Kliring Debit Pengembalian														
a. Nominal (%)	0,35%	0,17%	0,33%	0,21%	0,18%	0,31%	0,44%	0,36%	0,54%	0,25%	0,40%	0,49%	1,21%	0,50%
b. Warkat (%)	0,37%	0,16%	0,20%	0,11%	0,07%	0,14%	0,01%	0,22%	0,29%	0,24%	0,24%	0,27%	0,43%	0,30%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



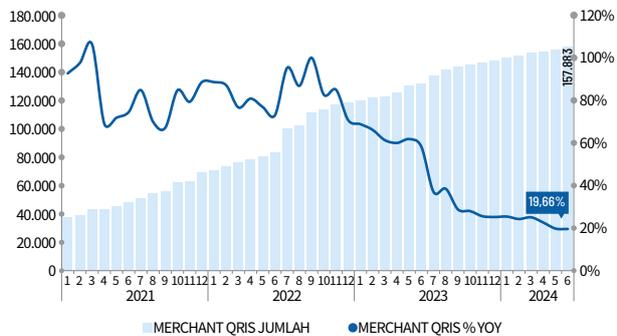
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Pertumbuhan Frekuensi Transaksi BI-RTGS

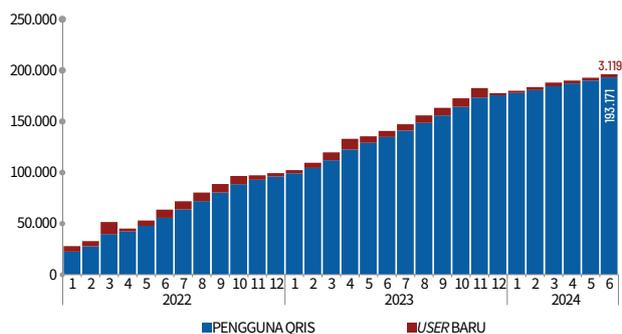
Sementara itu, kliring debit pengembalian pada triwulan II 2024 mencapai Rp4,78 miliar dengan warkat sebanyak 104 lembar atau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya dengan warkat sebanyak 139 lembar. Rasio kliring debit pengembalian pada triwulan II 2024 lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 0,50% dari segi nominal dan 0,30% dari segi warkat.

5.1.3 Perkembangan Transaksi Digital Melalui Kanal QRIS

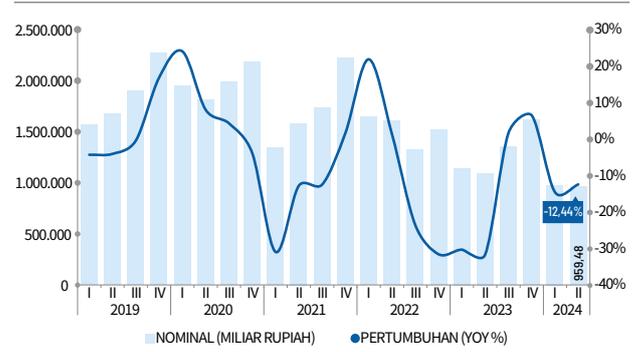
Implementasi QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meluas. Hingga Juni 2024, jumlah merchant QRIS di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 157.883 merchant atau tumbuh sebesar 19,66% (yoy). Secara spasial, merchant QRIS terbanyak tercatat di kota



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sumber: Bank Indonesia, diolah

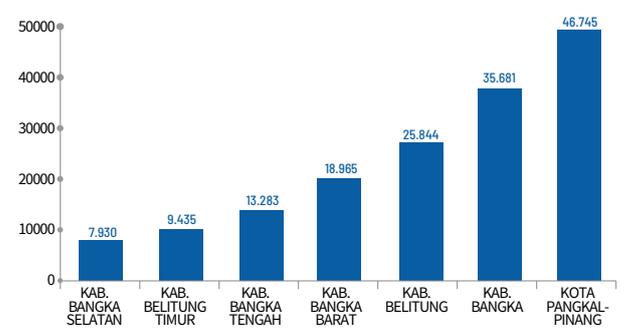
Grafik 5.7 Perkembangan User Baru QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sumber: Bank Indonesia, diolah

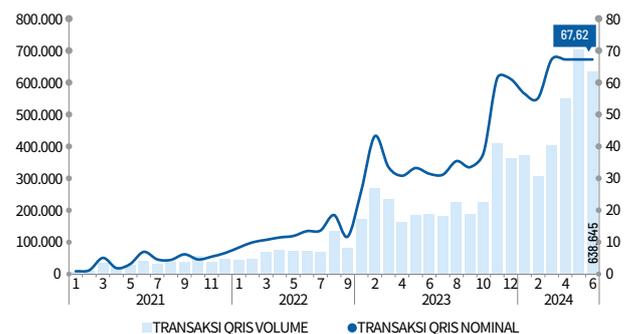
Grafik 5.4 Perkembangan Perputaran Kliring

Pangkalpinang yaitu sebanyak 46.745 merchant. Adapun 59,27% dari merchant QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pelaku UMKM kategori Usaha Mikro. Hal ini menunjukkan inklusivitas transaksi digital sistem pembayaran semakin meningkat pada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Juni 2024 telah mencapai 193.171 user (Grafik 5.7). Transaksi QRIS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan II 2024 juga meningkat dengan nominal transaksi sebesar Rp202,86 miliar dan volume transaksi mencapai 1.902.274 transaksi (Grafik 5.8).

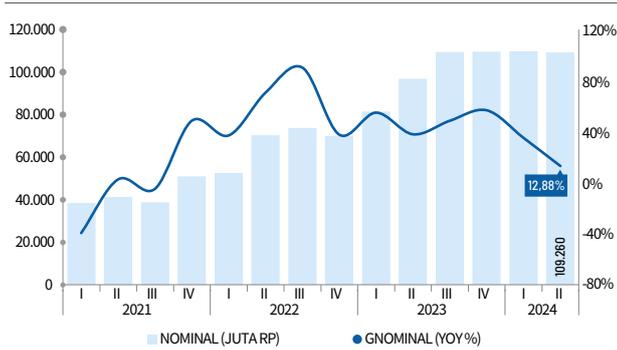


Sumber: Bank Indonesia, diolah

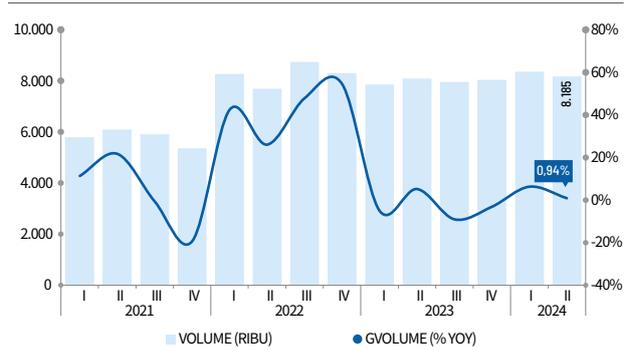
Grafik 5.6 Persebaran Jumlah Merchant QRIS per wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi QRIS wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9 Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Rp Juta)


Sumber: Bank Indonesia, diolah

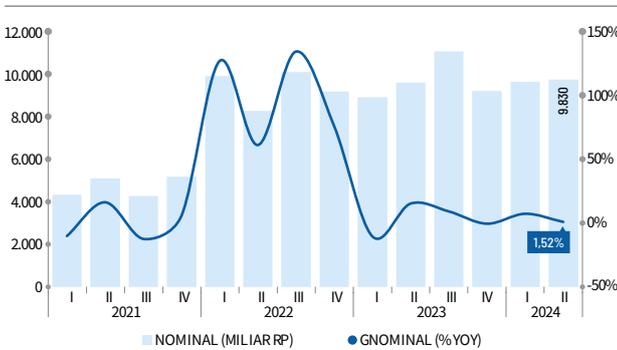
Grafik 5.12 Jumlah Transaksi Kartu Debit (Volume)

5.1.4 Perkembangan Pembayaran dengan APMK dan Uang Elektronik

Transaksi APMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan laporan, khususnya kartu kredit dan kartu debit tercatat tetap kuat mesti relatif melambat. Nilai nominal transaksi dengan kartu kredit pada triwulan II 2024 mencapai Rp109,26 miliar dan tumbuh sebesar 12,88% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp109,77 miliar atau tumbuh sebesar 34,96% (yoy) (Grafik 5.9). Hal ini sejalan dengan volume transaksi kartu kredit yang turut melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 5.11). Transaksi kartu kredit pada triwulan II 2024 didominasi untuk kegiatan transaksi belanja dengan transaksi terbesar yang berasal dari Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya, jumlah nominal transaksi kartu ATM/debit pada triwulan II 2024 mencapai Rp9,83 triliun atau tumbuh sebesar 1,52% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,95% (yoy) (Grafik 5.10). Volume transaksi kartu debit pada triwulan II 2024 mencapai 8,19 juta transaksi atau tumbuh sebesar 0,94% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy) (Grafik 5.12).



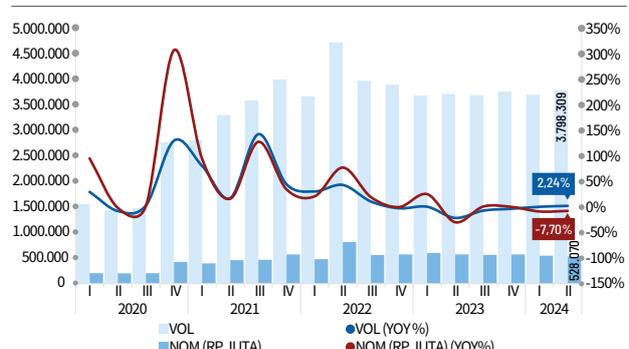
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.10 Jumlah Transaksi Kartu Debit (Rp Miliar)

Jumlah nominal transaksi uang elektronik pada triwulan II 2024 mencapai Rp528,07 miliar atau terkontraksi 7,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,82% (yoy). Sementara itu, volume transaksi uang elektronik mencapai 3,8 juta transaksi atau tumbuh sebesar 2,24% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 3,7 juta transaksi atau tumbuh sebesar 0,43% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.11 Jumlah Transaksi Kartu Kredit (Volume)


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Jumlah Transaksi Uang Elektronik

Tabel 5.2 Inflow – Outflow Uang Kartal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

INFLOW/ OUTFLOW	2020				2021				2022				2023				2024	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Inflow (Rp miliar)	887,26	963,9	461,39	249,54	557,54	1.805,89	1.367,82	1.892,3994	1.271,84	1.370,79	1.082,18	396,39	1494,61	713,99	671,55	358,08	1627,50	1.183,57
Outflow (Rp miliar)	-580,75	-981,21	-746,59	-1.555,33	-666,97	-538,75	-241,86	-1.167,64	-1.273,20	-1.761,87	-483,37	-1.722,27	-517,78	-1.575,71	-794,07	-1.915,22	-772,83	-1.165,15
Netflow (Rp miliar)	306,51	-17,31	-285,19	-1.305,79	-1.301,79	109,43	1.267,14	1.125,96	724,76	-559,21	598,81	-1.325,88	976,83	-861,72	-122,51	-1.557,14	854,67	18,42
%gInflow (yoy)	7,66%	-16,94%	-42,27%	-47,64%	-37,16%	87,35%	196,45%	658,36%	90,69%	-24,09%	-20,88%	-79,05%	17,52%	-47,91%	-37,94%	-9,67%	8,89%	65,77%
%gOutflow (yoy)	-14,19%	-39,03%	-12,53%	46,89%	14,85%	-45,09%	-67,60%	-24,93%	128,36%	227,03%	99,86%	4750%	-59,33%	-10,57%	64,28%	11,20%	49,26%	-26,06%

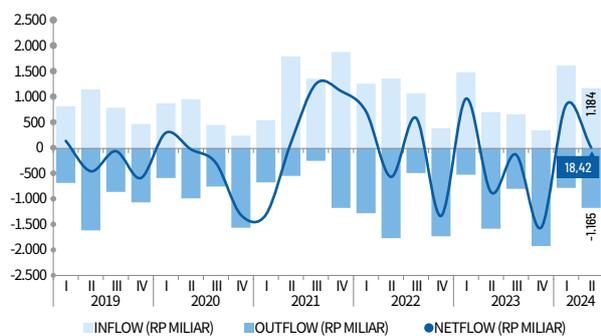
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi uang elektronik masih tumbuh pada triwulan II 2024 sebesar 3.798.309 transaksi. Hal tersebut didorong oleh kampanye penggunaan QR Code berstandar QRIS serta berbagai pelaksanaan kegiatan *Experience QRIS Rp1,-* menggunakan dompet/uang elektronik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bank Indonesia bersama dengan perbankan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), bersinergi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan mitra strategis lainnya terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang transaksi digital dimaksud kepada masyarakat.

5.2 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

5.2.1 Inflow – Outflow Uang Kartal

Salah satu tugas Bank Indonesia di daerah adalah melakukan pengelolaan uang Rupiah agar uang yang beredar dalam kondisi layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada triwulan II 2024, pengedaran uang kartal oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami *net inflow* sebesar Rp18,42 miliar. Aliran uang masuk (*inflow*) selama triwulan II 2024 mencapai Rp1,18 triliun atau meningkat sebesar 65,77%



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Perkembangan Aliran Uang Kartal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

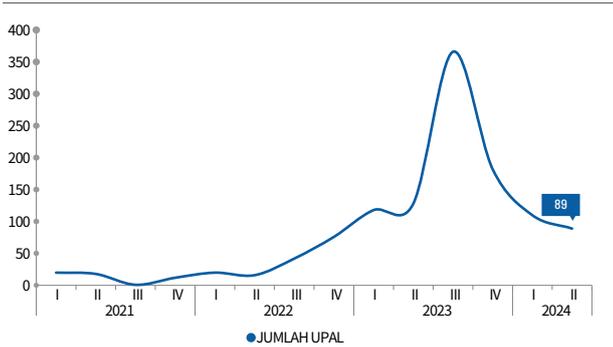
(yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, aliran uang keluar (*outflow*) tercatat mencapai Rp1,17 triliun atau terkontraksi sebesar 26,06% (yoy).

Kondisi *net inflow* (*inflow* lebih besar daripada *outflow*) pada triwulan II 2024 disebabkan oleh aktivitas produksi dan ekspor timah yang belum kembali normal dikarenakan beberapa perusahaan produsen timah masih menunggu persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Kementerian ESDM.

5.3 TEMUAN UANG YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan temuan 89 lembar uang palsu selama triwulan II 2024. Hal ini lebih rendah dari temuan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 110 lembar. Upaya pencegahan peningkatan penyebaran uang palsu senantiasa dilakukan Bank Indonesia dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang Rupiah dan Cinta Bangga Paham Rupiah di berbagai tempat dan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Masyarakat dapat melaporkan temuan uang palsu ke Bank Indonesia untuk melakukan klarifikasi terhadap ciri-ciri keaslian uang Rupiah tersebut. Bank Indonesia berperan sebagai ahli Rupiah dalam rangka meminimalisir tersebarnya uang palsu di masyarakat. Apabila masyarakat menemukan adanya indikasi sindikat yang menyebarkan uang palsu tersebut di lingkungannya, dapat segera melaporkan ke pihak kepolisian yang selanjutnya akan ditindaklanjuti bersama Bank Indonesia selaku saksi ahli uang Rupiah di ranah hukum.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.15 Penemuan Jumlah Lembar Uang Palsu (UPAL) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.4 PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan penyediaan uang layak edar dengan membuka layanan penukaran uang Rupiah tidak layak edar/lusuh oleh masyarakat. Penukaran uang yang rusak/cacat dan tidak layak dapat dilakukan melalui *website pintar.bi.go.id* dengan melakukan pendaftaran sebelum hari penukaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Pulau Belitung terhadap uang kartal baik uang kertas maupun uang logam, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyediakan layanan penarikan dan penyeteroran uang kas titipan di Kota Tanjungpandan.

5.5 UPAYA BANK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KELANCARAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

Dalam rangka meningkatkan sistem pembayaran nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai cara bertransaksi dari tunai menjadi nontunai. Beberapa tantangan dalam mendorong transaksi nontunai antara lain: (i) pemahaman masyarakat tentang transaksi nontunai dan manfaat yang dapat dirasakan jika melakukan transaksi secara nontunai; (ii) infrastruktur nontunai terutama akses jaringan internet di beberapa lokasi *remote area*; dan (iii) dukungan pemerintah, pelaku usaha, instansi dan pihak lain yang terkait untuk bertransaksi nontunai yang perlu ditingkatkan.

Untuk itu, dalam upaya menarik minat masyarakat untuk bertransaksi secara nontunai, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rutin melakukan sosialisasi edukasi tentang transaksi nontunai dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui program Elektronifikasi. Sepanjang triwulan II 2024, Bank Indonesia aktif mendorong penggunaan instrumen dan kanal pembayaran nontunai melalui berbagai kegiatan sosialisasi mengenai QRIS, layanan Sistem Pembayaran BI, serta perlindungan konsumen kepada masyarakat di berbagai segmen. Bank Indonesia turut melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pengguna baru QRIS di Bangka Belitung melalui *Experience QRIS Rp1,-* dan Sosialisasi/Edukasi. Selain itu, koordinasi dengan pemda dan lintas *stakeholder* untuk mendorong inovasi serta perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga dilakukan melalui upaya fasilitasi, koordinasi, dan *monitoring* pelaporan IETPD bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah terbentuk di setiap wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Guna mendorong ekosistem nontunai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menggalakkan berbagai kegiatan di antaranya Sosialisasi layanan sistem pembayaran Bank Indonesia ke perguruan tinggi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (Apgakum). Untuk mendorong perluasan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui peluncuran dan Penyerahan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dan penyerahan mesin EDC QRIS Dinamis dari Bank Sumsel Babel kepada OPD Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menggunakan instrumen dan kanal pembayaran nontunai guna keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.



BOKS 3

Pertahankan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Tahap Digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gelar Kegiatan *Capacity Building* dan Pendampingan Pelaporan ETPD Semester I 2024

BOKS 3

Pertahankan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Tahap Digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Gelar Kegiatan *Capacity Building* dan Pendampingan Pelaporan ETPD Semester I 2024



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar B3.1 Kegiatan *Capacity Building* dan Pendampingan Pelaporan ETPD Semester I 2024, Juni 2024

Dalam rangka mempertahankan indeks ETPD seluruh Pemda tetap berada di tahap digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kegiatan *Capacity Building* sekaligus pendampingan pelaporan ETPD periode Semester I 2024

pada tanggal 27 Juni 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan dan validitas data yang disampaikan oleh seluruh anggota TP2DD melalui SIP2DD. Di sisi lain, kegiatan ini sebagai bentuk upaya

Bank Indonesia agar Indeks ETPD seluruh Pemerintah Daerah pada Semester I 2024 tetap berada di tahap digital diikuti dengan peningkatan skor indeks ETPD.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia mengundang Kantor Pusat Bank Sumsel Babel (BSB) sebagai narasumber. Dalam materinya, beberapa hal yang disampaikan Bank Sumsel Babel antara lain (i) Pemda bersama BSB bersinergi dalam mendorong percepatan integrasi SIPD RI agar dapat digunakan secara optimal untuk mendorong digitalisasi perbendaharaan pemerintah daerah; (ii) BSB selalu berinovasi khususnya dalam menyediakan *dashboard* untuk

memudahkan pemantauan penerimaan daerah serta turut mengembangkan inovasi kanal digital yakni QRIS Dinamis.

Selanjutnya Bank Indonesia turut menyampaikan materi terkait urgensi digitalisasi Pemerintah Daerah, melalui penyampaian informasi secara detil aspek penilaian yang membentuk skor Indeks ETPD dan hal-hal yang perlu dilakukan agar skor IETPD tetap tinggi. Selain itu, Bank Indonesia mendorong agar TP2DD turut berpartisipasi pada ajang *Championship* TP2DD dan menjadi juara dalam ajang tersebut.



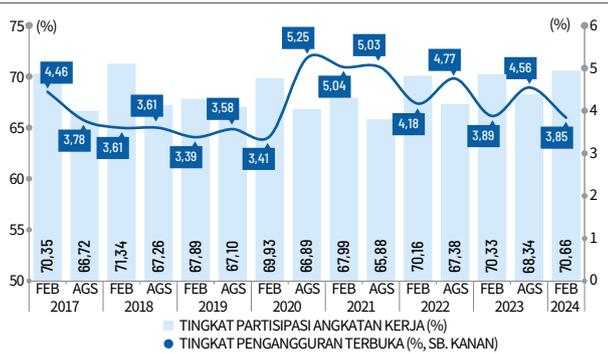
Foto : Pagoda Tri Agung, Parit Pandang, Sungai Liat

BAB 6

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Tingkat ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan. Hal ini tecermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat disertai dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2024 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Disamping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mengalami peningkatan. Namun demikian, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 mengalami peningkatan 0,03% menjadi 4,55%. Hal ini juga tecermin dari penurunan hasil Survei Konsumen pada indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan lalu dan indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan lalu dibandingkan triwulan I 2024.





Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

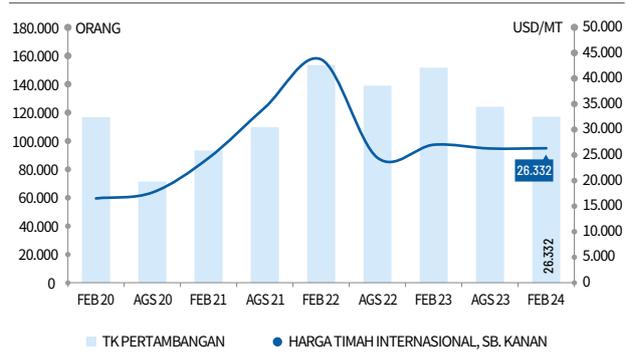
Grafik 6.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran, Feb 2017 – Feb 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6.1 KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode laporan tercatat membaik.

Hal tersebut tecermin dari perbaikan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat di tengah rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun. Rasio TPAK mengalami peningkatan dari 70,33% pada Februari 2023 menjadi 70,66% pada Februari 2024 seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Lebih lanjut, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja (pengangguran terbuka) pada Februari 2024 sebanyak 31.490 orang atau berkurang sebanyak 4.320 orang dibandingkan periode sebelumnya. Sejalan dengan itu, rasio TPT pada periode Februari 2024 tercatat sebesar 3,85%, lebih rendah dibandingkan Februari 2023 sebesar 3,89% (Grafik 6.1). Rasio TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut juga lebih rendah dari rata-rata Nasional sebesar 4,82% pada Februari 2024.

Membaiknya sejumlah indikator ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejalan dengan ekspektasi masyarakat yang positif pengaruh tren perbaikan perkembangan dunia usaha. Kondisi



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bloomberg, diolah

Grafik 6.2 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Harga Timah

tersebut tecermin dari Survei Konsumen pada triwulan I 2024, bahwa terdapat kecenderungan optimisme masyarakat terhadap peningkatan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini maupun enam bulan yang akan datang yang terlihat dari adanya peningkatan indeks dari 114,83 pada periode triwulan I 2023 menjadi 127,33 pada triwulan I 2024.

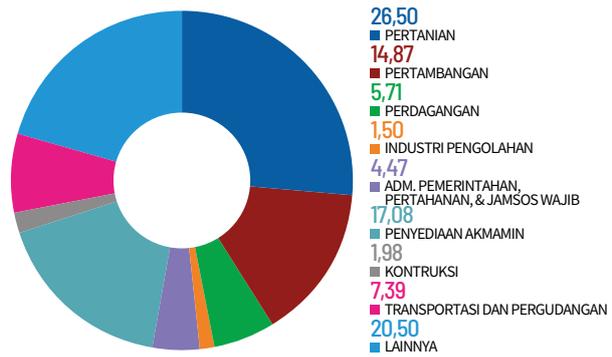
Jumlah tenaga kerja pada periode Februari 2024 mencapai 787.140 orang atau meningkat sebesar 1,70% (yoy).

Berdasarkan lapangan usahanya, mayoritas peningkatan jumlah tenaga kerja ada pada LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang cukup besar juga terjadi pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan LU Jasa Pendidikan. Jumlah tenaga kerja LU Pertanian pada periode laporan tercatat meningkat sebesar 29.564 tenaga kerja atau 16,52% (yoy); LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat sebesar 15.264 tenaga kerja atau 35,58% (yoy); serta LU Jasa Pendidikan meningkat sebesar 6.975 tenaga kerja atau 21,41% (yoy). Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut juga tecermin dari *likert scale* jumlah tenaga kerja hasil laporan *liaison*

Tabel 6.1 Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak, Feb 2020 - Feb 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEGIATAN UTAMA	FEB 2020	AGS 2020	FEB 2021	AGS 2021	FEB 2022	AGS 2022	FEB 2023	AGS 2023	FEB 2024	GROWTH FEB 2023 - 2024 (%)
Penduduk Usia Kerja	1.095.438	1.104.219	1.113.166	1.121.080	1.124.190	1.139.170	1.145.060	1.149.570	1.158.550	1,18
Angkatan Kerja	759.294	738.637	756.874	738.620	788.770	767.603	805.350	785.630	818.630	1,65
a. Bekerja	733.858	699.881	718.693	701.440	755.810	730.972	774.010	749.820	787.140	1,70
b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	25.436	38.756	38.181	37.180	32.950	36.630	31.340	35.810	31.490	0,48
Bukan Angkatan Kerja	336.144	365.582	356.292	382.460	335.420	371.570	339.710	363.950	339.930	0,06
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)	69,31	66,89	67,99	65,88	70,16	67,38	70,33	68,34	70,66	0,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,35	5,25	5,04	5,03	4,18	4,77	3,89	4,56	3,85	-1,07

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.3 Persentase Distribusi Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja Periode Februari 2024 (%)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2024 sebesar 0,00; dari triwulan sebelumnya sebesar -0,15. Berdasarkan hasil *liaison* tersebut, meningkatnya jumlah tenaga kerja pada triwulan laporan disebabkan oleh adanya peningkatan permintaan tenaga kerja dari sektor penyedia akomodasi seiring dengan adanya tren peningkatan kondisi penjualan.

Di sisi lain, jumlah tenaga kerja LU Pertambangan dan Penggalian pada Februari 2024 tercatat mengalami penurunan jumlah tenaga kerja sebanyak 34.760 orang atau menurun sebesar 22,90% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan adanya permasalahan tata niaga terkait pertambangan timah yang terjadi sejak awal tahun 2024 hingga terdapat penutupan beberapa *smelter* timah, yang berdampak pada PHK terhadap sejumlah pekerja terkait.

Distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode Februari 2024 masih didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan pangsa sebesar 26,50% atau sebanyak 208.561 orang dari total 787.140 tenaga kerja (Grafik 6.3). Sementara itu, pangsa tenaga kerja terendah menurut lapangan pekerjaan utama di Bangka Belitung pada bulan Februari 2024 adalah *LU real estate* sebesar 0,31% atau sebanyak 2.458 tenaga kerja.

Tabel 6.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Feb 2020 – Feb 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SATUAN	FEB 20	AGS 20	FEB 21	AGS 21	FEB 22	AGS 22	FEB 23	AGS 23	FEB 24	GROWTH FEB 23 - FEB 24
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Jumlah	201.822	227.461	205.402	187.284	173.268	183.100	178.997	188.090	208.561	16,52%
	%	26,89	32,50	28,58	26,70	22,92	25,05	23,13	25,08	26,50	
Pertambangan dan Penggalian	Jumlah	116.853	71.318	93.286	109.635	153.579	138.970	151.780	124.030	117.020	-22,90%
	%	15,57	10,19	12,98	15,63	20,32	19,01	19,61	16,54	14,87	
Industri Pengolahan	Jumlah	60.757	57.320	68.060	53.380	55.322	50.190	59.318	53.820	44.924	-24,27%
	%	8,10	8,19	9,47	7,61	7,32	6,87	7,66	7,18	5,71	
Pengadaan Listrik, Gas dan Air	Jumlah	5.300	3.009	2.228	2.736	4.914	2.260	11.276	7.020	11.841	5,01%
	%	0,71	0,43	0,31	0,39	0,65	0,31	1,45	0,93	1,50	
Konstruksi	Jumlah	33.134	32.474	25.011	31.775	27.123	33.380	34.492	36.680	35.194	2,04%
	%	4,41	4,64	3,48	4,53	3,59	4,57	4,46	4,89	4,47	
Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah	135.132	130.178	130.227	132.712	120.088	128.710	131.268	125.490	134.450	2,42%
	%	18,00	18,61	18,12	18,92	15,89	17,61	16,96	16,74	17,08	
Transportasi dan Pergudangan	Jumlah	14.923	19.107	15.524	17.466	19.605	15.140	15.184	16.850	15.576	2,58%
	%	1,99	2,73	2,16	2,49	2,59	2,07	1,96	2,25	1,98	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Jumlah	37.623	34.224	34.282	35.703	40.944	36.730	42.901	47.810	58.165	35,58%
	%	5,01	4,89	4,77	5,09	5,42	5,03	5,54	6,38	7,39	
Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate	Jumlah	10.225	9.588	11.355	11.854	17.345	13.170	13.549	12.620	23.265	71,71%
	%	1,36	1,37	1,58	1,69	2,29	1,81	1,74	1,69	2,95	
Jasa Perusahaan	Jumlah	7.473	5.879	7.187	5.892	6.828	7.930	8.555	7.770	8.611	0,65%
	%	1,00	0,84	1,00	0,84	0,90	1,09	1,11	1,04	1,09	
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Jumlah	47.503	39.473	47.074	39.210	47.857	40.360	48.697	46.430	54.584	12,09%
	%	6,33	5,64	6,55	5,59	6,33	5,52	6,29	6,19	6,94	
Jasa Pendidikan	Jumlah	36.559	29.815	35.863	34.791	40.387	37.190	32.580	40.980	39.555	21,41%
	%	4,87	4,26	4,99	4,96	5,34	5,09	4,21	5,46	5,03	
Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial	Jumlah	12.832	11.898	10.780	12.906	15.484	16.270	18.397	14.370	9.387	-48,98%
	%	1,72	1,70	1,50	1,84	2,05	2,23	2,38	1,92	1,19	
Jasa Lainnya	Jumlah	30.402	28.135	32.413	26.094	33.070	27.570	27.017	27.860	26.007	-3,74%
	%	4,05	4,02	4,51	3,72	4,38	3,77	3,49	3,72	3,30	
Total	Jumlah	750.538	699.881	718.693	701.440	755.814	730.970	774.011	749.820	787.140	1,70%
	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel 6.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Feb 2020 – Feb 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	SATUAN	FEB 20	AGS 20	FEB 2021	AGS 2021	FEB 2022	AGS 2022	FEB 2023	AGS 2023	FEB 2024	GROWTH FEB 23 - FEB 24 (%)
Formal	Jml	390.247	329.434	354.100	344.220	373.676	368.190	388.454	366.890	378.149	-2,65
	%	52,00	47,07	49,27	49,07	49,44	50,37	50,18	48,93	48,04	-4,26
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	Jml	42.174	31.145	39.816	34.810	37.195	43.140	48.478	37.100	45.627	-5,88
	%	5,62	4,45	5,54	4,96	4,92	5,90	6,26	4,95	5,80	-7,35
Buruh Karyawan	Jml	348.073	298.289	314.284	309.410	336.481	325.050	339.976	32.979	332.522	-2,19
	%	46,38	42,62	43,73	44,11	44,52	44,47	43,92	43,98	42,24	-3,83
Informal	Total	360.291	370.447	364.593	357.230	382.138	362.790	385.557	382.930	408.991	6,08
	%	48,00	52,93	50,73	50,93	50,56	49,63	49,82	51,07	51,96	4,30
Berusaha sendiri	Jml	168.677	167.761	155.885	174.840	197.443	206.870	219.092	218.630	220.280	0,54
	%	22,47	23,97	21,69	24,93	26,12	28,30	28,31	29,16	27,99	-1,13
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Jml	79.799	82.656	82.865	69.460	84.597	63.210	59.450	60.290	60.411	-5,88
	%	10,63	11,81	11,53	9,90	11,19	8,65	7,68	8,04	7,67	-0,13
Pekerja bebas	Jml	30.907	45.912	45.709	45.140	40.824	33.200	34.401	38.990	42.090	22,35
	%	4,12	6,56	6,36	6,44	5,40	4,54	4,45	5,20	5,35	20,22
Pekerja tak dibayar	Jml	80.908	74.117	80.134	67.790	59.274	59.520	72.614	65.010	86.210	18,72
	%	10,78	10,59	11,15	9,66	7,84	8,14	9,38	8,67	10,95	16,74
Jumlah total	Jml	750.538	699.881	718.693	701.440	755.814	730.972	774.011	749.820	787.140	1,70

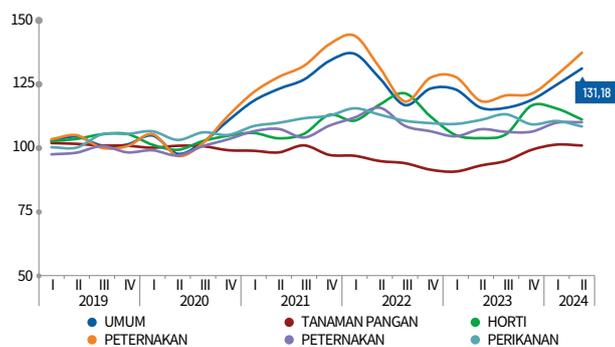
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Tabel 6.4 Perbandingan NTP Berdasarkan Subsektor Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUB SEKTOR	2020				2021				2022				2023				2024		GROWTH(%)	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	YOY	QTQ
Umum	104,92	97,75	102,31	110,79	118,46	123,18	126,846	134,116	136,93	127,31	116,82	123,28	122,95	115,77	115,79	118,83	124,80	131,18	13,31	5,11
Tanaman Pangan	100,11	100,87	100,70	99,14	98,92	98,29	101,02	97,30	96,95	94,90	94,05	91,52	90,79	93,17	94,98	99,25	101,33	100,97	8,38	-0,36
Hortikultura	101,31	99,32	102,75	104,83	105,91	103,82	105,58	113,01	110,74	117,07	121,42	112,43	105,12	103,91	105,45	116,60	115,47	111,18	7,00	-3,72
Perkebunan Rakyat	105,44	96,91	101,94	112,66	121,82	127,86	132,23	140,64	144,02	131,41	118,26	127,54	127,86	118,42	118,04	121,27	128,61	137,35	15,99	6,80
Peternakan	99,13	97,12	100,75	103,44	106,55	107,45	104,13	108,76	111,92	115,78	108,66	106,60	104,60	107,36	106,32	106,41	109,90	110,12	2,58	0,20
Perikanan	106,53	103,16	106,12	105,11	108,56	109,87	111,64	112,67	115,55	113,04	110,65	109,75	109,42	111,00	113,19	109,30	110,57	108,44	-2,31	-1,93

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Distribusi tenaga kerja menurut status pekerjaan utama di Bangka Belitung pada periode Februari 2024 terdiri dari sektor formal dan informal dengan pangsa yang lebih didominasi oleh tenaga kerja informal. Jumlah tenaga kerja formal mencapai 378.149 orang atau mencapai 48,04% dari total pekerja. Sementara itu, jumlah tenaga kerja informal mencapai 408.991 orang atau mencapai 51,96% dari total pekerja (Tabel 6.3). Peningkatan jumlah tenaga informal ini utamanya dengan status pekerja bebas yang meningkat 22,35% (yoy), mencapai 42.090 orang pada Februari 2024.

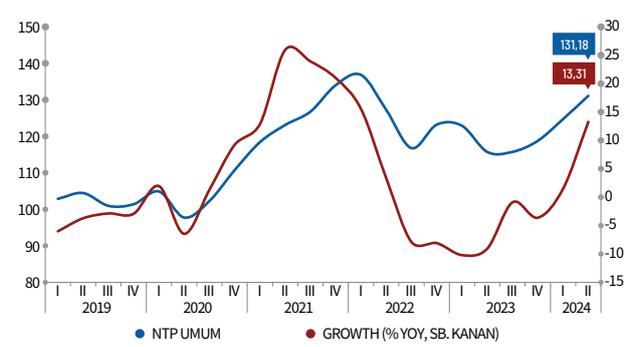


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani

6.2 KONDISI KESEJAHTERAAN PETANI

Kondisi kesejahteraan petani pada triwulan II 2024¹ mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya. Hal tersebut tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat dari 124,80 pada triwulan I 2024 menjadi 131,18 pada triwulan II 2024. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan pada 2 (tiga) subsektor yakni perkebunan rakyat dan peternakan. NTP subsektor perkebunan rakyat mengalami peningkatan dari 128,61



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.5 Nilai Tukar Petani dan Growth

¹ Merupakan angka rata-rata bulan April - Juni 2024

Tabel 6.5 Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Triwulan II 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KELOMPOK	2020				2021				2022				2023				2024		GROWTH (%QOQ)
	I	II	III	IV	I	II													
Konsumsi RT	102,98	104,28	103,34	105,30	105,66	106,04	105,96	107,74	109,41	112,51	113,66	113,64	115,38	116,34	117,08	118,03	119,23	120,31	0,91
- Makanan, Minuman dan Tembakau	102,88	105,03	103,22	106,53	106,95	107,34	106,87	109,46	111,83	115,85	116,81	115,18	117,98	119,40	120,47	122,07	123,83	125,54	1,38
- Pakaian dan Alas Kaki	106,78	107,47	108,16	108,07	108,30	110,33	111,46	112,68	113,09	114,09	114,81	115,13	115,72	116,39	117,10	117,30	117,66	118,03	0,31
- Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	100,82	100,23	100,25	100,20	100,66	100,90	101,07	101,43	102,37	103,80	104,61	105,37	105,56	105,69	105,88	105,71	105,64	105,61	-0,03
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan RT	104,05	104,59	104,80	105,04	105,48	105,74	106,21	106,92	108,37	109,50	110,78	111,51	112,58	112,92	113,12	113,75	114,34	114,60	0,23
- Kesehatan	104,13	104,88	105,19	105,81	106,25	106,13	106,28	106,37	106,78	107,84	108,64	109,22	109,75	110,06	110,29	110,54	110,68	110,75	0,06
- Transportasi	104,05	104,12	104,37	104,68	104,82	104,86	105,45	106,62	107,21	110,41	113,95	120,79	120,33	120,45	120,50	120,59	120,96	121,08	0,10
- Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,18	100,05	100,05	100,06	100,19	100,26	100,53	100,57	100,49	100,51	100,55	100,56	100,62	100,65	100,83	100,84	100,86	100,80	-0,06
- Rekreasi, Olahraga dan Budaya	105,15	105,41	106,13	106,23	106,28	106,18	106,93	107,09	108,23	109,09	110,45	110,75	111,38	111,55	112,47	112,27	112,29	112,30	0,01
- Pendidikan	101,39	101,39	101,39	101,42	101,42	101,42	102,21	102,61	102,61	102,61	102,88	103,02	103,02	103,02	103,06	103,25	103,34	103,36	0,02
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	100,39	100,44	100,45	100,45	100,71	100,80	100,86	101,12	101,65	103,19	104,13	105,18	105,43	105,99	106,41	106,66	107,54	107,68	0,13
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	105,29	105,95	106,77	106,76	106,82	106,98	107,28	107,44	108,54	109,51	110,64	111,65	113,02	113,83	114,44	114,62	114,98	115,88	0,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

pada triwulan I 2024 menjadi sebesar 137,35 pada triwulan II 2024. Lebih lanjut, NTP subsektor peternakan juga mengalami peningkatan dari 109,90 pada triwulan I 2024 menjadi 110,12 pada triwulan II 2024. Di sisi lain, NTP pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, dan perikanan mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. NTP subsektor tanaman pangan mengalami penurunan dari 101,33 pada triwulan I 2024 menjadi 100,97 pada triwulan II 2024. Sementara itu, NTP subsektor hortikultura mengalami penurunan dari 115,47 pada triwulan I 2024 menjadi 111,18 pada triwulan II 2024. Lebih lanjut, NTP subsektor perikanan juga mengalami penurunan dari 110,57 pada triwulan I 2024 menjadi 108,44 pada triwulan II 2024.

Secara agregat nilai NTP pada triwulan II 2024 berada pada nilai di atas 100. Kondisi tersebut mengindikasikan kelompok petani tersebut masih memiliki tingkat kemampuan/daya beli yang baik karena indeks yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayar petani. Secara subsektor, nilai NTP seluruh subsektor berada pada nilai diatas 100 pada triwulan II 2024.

6.3 INDEKS KONSUMSI RUMAH TANGGA PERDESAAN

Pada triwulan II tahun 2024, indeks konsumsi rumah tangga perdesaan mengalami inflasi sebesar 120,30.

Sebagian besar kelompok konsumsi rumah tangga

mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi tercatat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,38%. Sementara itu, terdapat dua kelompok pengeluaran RT yang mengalami deflasi. Pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar RT mengalami deflasi sebesar 0,03% dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,06%.

6.4 INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN SURVEI KONSUMEN

Survei Konsumen (SK) di Kota Pangkalpinang yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat setidaknya ada 2 (dua) pengukuran yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat. Survei yang dilakukan secara bulanan tersebut melibatkan 200 responden setiap bulannya dari berbagai kalangan pendidikan dan profesi pekerjaan.

6.4.1 Indikator Penghasilan

Berdasarkan hasil survei konsumen yang dilaksanakan Bank Indonesia, pada triwulan II 2024 masyarakat menilai kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, perkiraan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan 6 bulan yang akan datang turut mengalami penurunan dibandingkan periode triwulan II 2023.

Tabel 6.6 Pendapat Konsumen Terhadap Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dan Enam Bulan YAD (2019 – 2024)

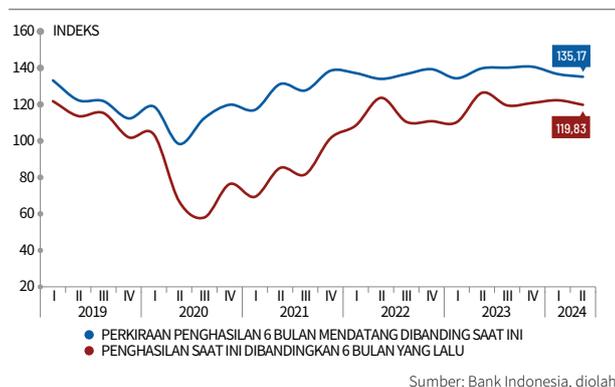
KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BULAN YANG LALU							PERKIRAAN KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 6 BULAN MENDATANG DIBANDING SAAT INI					
PERIODE	PENDAPAT RUMAH TANGGA (%)				INDEKS SALDO BERSIH	PERIODE	PENDAPAT RUMAH TANGGA (%)				INDEKS SALDO BERSIH	
	LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH			LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH		
2019	I	26,83	45,00	28,17	100	98,67	I	32,67	53,33	14,00	100	118,67
	II	25,00	45,50	29,50	100	95,50	II	28,67	58,33	13,00	100	115,67
	III	35,67	38,67	25,67	100	110,00	III	30,50	58,50	11,00	100	119,50
	IV	22,33	40,00	37,67	100	84,67	IV	14,00	74,00	12,00	100	102,00
2020	I	31,67	38,00	30,33	100	101,33	I	23,33	63,83	12,83	100	110,50
	II	15,33	19,33	65,33	100	50,00	II	29,00	38,17	32,83	100	96,17
	III	11,00	19,17	69,83	100	41,17	III	41,67	44,17	14,17	100	127,50
	IV	12,50	22,00	65,50	100	47,00	IV	33,33	53,17	13,50	100	119,83
2021	I	11,50	26,67	61,83	100	49,67	I	31,33	47,67	21,00	100	110,33
	II	27,00	24,33	48,67	100	78,33	II	44,83	42,17	13,00	100	131,83
	III	22,83	27,17	50,00	100	72,83	III	36,50	45,00	18,33	100	118,00
	IV	36,33	26,67	37,00	100	99,33	IV	53,67	39,67	6,67	100	147,00
2022	I	32,67	33,33	34,00	100	98,67	I	44,83	41,83	13,33	100	131,50
	II	37,67	33,50	28,83	100	108,83	II	42,83	48,33	8,83	100	134,00
	III	32,00	46,50	21,50	100	110,50	III	39,33	55,67	5,00	100	134,33
	IV	34,83	38,67	26,50	100	108,33	IV	40,83	52,67	6,50	100	134,33
2023	I	36,67	41,50	21,83	100	114,83	I	37,67	57,67	4,67	100	133,00
	II	38,33	41,33	20,33	100	118,00	II	45,83	47,67	6,33	100	139,33
	III	45,17	40,67	14,17	100	131,00	III	47,67	48,17	4,17	100	143,50
	IV	48,50	42,00	9,50	100	139,00	IV	49,33	47,67	3,00	100	146,33
2024	I	40,17	47,00	12,83	100	127,33	I	45,33	50,17	4,50	100	140,83
	II	35,83	45,67	18,50	100	117,33	II	40,00	55,50	4,50	100	135,50

Sumber: Bank Indonesia, diolah

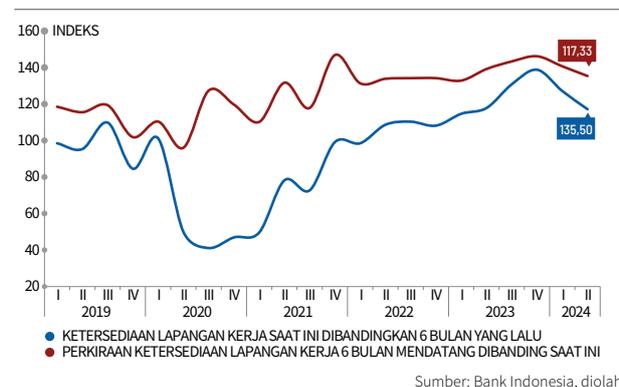
Hasil survei konsumen di Kota Pangkalpinang pada triwulan II 2024 mencatat 35,83% responden berpendapat ketersediaan lapangan kerja pada periode laporan lebih banyak dibandingkan enam bulan yang lalu. Selanjutnya, sebanyak 45,67% responden menyatakan kondisi ketersediaan lapangan kerja saat ini relatif sama dengan enam bulan yang lalu. Sementara itu, 18,50% responden berpendapat ketersediaan lapangan kerja pada periode laporan lebih sedikit dibandingkan enam bulan yang lalu. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks saldo bersih ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu mencapai 117,33 menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 118,00. Kondisi

tersebut mengindikasikan terdapat penurunan tingkat optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu.

Pada triwulan II 2024, jumlah responden yang memperkirakan bahwa ketersediaan lapangan kerja akan lebih banyak dalam enam bulan mendatang sebesar 40,00%. Selain itu, 4,50% responden berpendapat lebih sedikit. Sementara sisanya atau sebesar 55,50% responden memperkirakan kondisi saat ini relatif sama dengan enam bulan mendatang. Sejalan dengan kondisi tersebut, indeks saldo bersih perkiraan ketersediaan lapangan kerja enam bulan mendatang dibandingkan saat ini mencapai 135,50 lebih rendah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.6 Indeks Penghasilan


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.7 Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Tabel 6.7 Pendapat Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini dan Penghasilan Enam Bulan YAD (2019 – 2024)

PENGHASILAN SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BULAN YANG LALU							PERKIRAAN PENGHASILAN 6 BULAN MENDATANG DIBANDING SAAT INI					
PERIODE	PENDAPAT RUMAH TANGGA				INDEKS SALDO BERSIH	PERIODE	PENDAPAT RUMAH TANGGA				INDEKS SALDO BERSIH	
	LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH			LEBIH BANYAK	SAMA	LEBIH SEDIKIT	JUMLAH		
2019	I	34,17	53,50	12,33	100	121,83	I	37,00	59,17	3,83	100	133,17
	II	26,33	61,00	12,67	100	113,67	II	23,83	74,67	1,50	100	122,33
	III	28,33	58,67	13,00	100	115,33	III	24,17	73,50	2,33	100	121,83
	IV	18,50	65,00	16,50	100	102,00	IV	13,33	85,67	1,00	100	112,33
2020	I	25,00	53,50	21,50	100	103,50	I	23,67	71,50	4,83	100	118,83
	II	15,00	36,83	48,17	100	66,83	II	21,83	54,67	23,50	100	98,33
	III	10,67	36,67	52,67	100	58,00	III	21,83	58,17	9,33	100	112,50
	IV	14,83	46,50	38,50	100	76,33	IV	29,17	61,50	9,33	100	119,83
2021	I	14,67	40,00	45,33	100	69,33	I	29,50	58,00	12,50	100	117,00
	II	22,67	39,83	37,50	100	85,17	II	38,50	54,17	7,33	100	131,17
	III	18,50	44,67	36,83	100	81,67	III	33,33	61,00	5,67	100	127,67
	IV	27,00	47,50	25,50	100	101,50	IV	41,00	56,50	2,50	100	138,50
2022	I	33,00	42,50	24,50	100	108,50	I	42,83	51,50	5,67	100	137,17
	II	39,17	45,33	15,50	100	123,67	II	37,83	58,33	3,83	100	134,00
	III	29,33	51,83	18,83	100	110,50	III	38,67	59,33	2,00	100	136,67
	IV	30,00	50,83	19,17	100	110,83	IV	42,83	53,67	3,50	100	139,33
2023	I	29,33	51,67	19,00	100	110,33	I	37,33	59,67	3,00	100	134,33
	II	39,13	48,17	12,70	100	126,43	II	41,80	56,20	2,00	100	139,80
	III	37,17	45,17	17,67	100	119,50	III	44,67	50,83	4,50	100	140,17
	IV	35,07	50,57	14,20	100	120,87	IV	45,17	50,33	4,50	100	140,67
2024	I	35,00	52,33	12,67	100	122,33	I	39,33	58,00	2,67	100	136,67
	II	35,67	48,50	15,83	100	119,83	II	38,00	59,17	2,83	100	135,17

Sumber: Bank Indonesia, diolah

dibandingkan triwulan II 2023 sebesar 139,33. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat optimisme masyarakat terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan 6 bulan mendatang juga mengalami penurunan.

6.4.2 Indikator Penghasilan

Indeks penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan lalu sebesar 119,83, lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 126,43. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penurunan tingkat optimisme masyarakat terhadap penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan lalu. Berdasarkan hasil survei pada triwulan II 2024, sebanyak 35,67% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka saat ini lebih baik dibandingkan dengan kondisi enam bulan sebelumnya. Sementara, sebanyak 15,83% responden menyatakan penghasilan mereka lebih sedikit. Sisanya, sebanyak 48,50% responden berpendapat penghasilan saat ini relatif sama dibandingkan enam bulan yang lalu. Pada Tabel 6.7 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah responden yang berpendapat bahwa penghasilan saat ini dibandingkan enam bulan yang lalu lebih sedikit.

Indeks perkiraan penghasilan enam bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 135,17.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat optimis (indeks di atas 100) penghasilan ke depan akan meningkat dibandingkan saat ini, meskipun tingkat optimisme tersebut mengalami sedikit penurunan. Berdasarkan hasil survei, jumlah responden yang berpendapat bahwa penghasilan 6 bulan ke depan akan lebih baik sebesar 38,00% pada triwulan II 2024. Sebagian besar responden yakni sebanyak 59,17% berpendapat bahwa penghasilan enam bulan yang akan datang akan sama dengan saat ini. Sementara responden yang berpendapat bahwa penghasilan enam bulan yang akan datang akan menurun sebesar 2,83%.

6.5 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia² di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89% selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 74,09 pada tahun 2023, atau tumbuh sebesar 0,80% dibandingkan

² Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*), yang merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan seperti dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUB SEKTOR	PERIODE/TAHUN												GROWTH (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bangka	67,99	69,34	69,79	70,03	70,43	71,09	71,8	72,39	72,4	72,46	72,95	74,34	1,91%
Belitung	67,87	69,27	69,56	70,29	70,81	70,93	71,7	72,46	72,51	72,57	73,38	74,49	1,51%
Bangka Barat	64,92	65,85	66,43	67,23	67,6	67,94	68,68	69,05	69,08	69,6	70,12	71,13	1,44%
Bangka Tengah	66,88	67,67	68,09	68,66	68,76	68,99	69,52	70,33	70,45	70,89	71,4	72,36	1,34%
Bangka Selatan	61,17	62,96	63,54	63,89	64,57	65,02	65,98	66,54	66,9	67,06	67,95	69,67	2,53%
Belitung Timur	66,59	67,71	68,1	68,83	69,3	69,57	70,22	70,84	70,92	71,42	72,29	73,31	1,41%
Pangkalpinang	75,69	76,14	76,28	76,61	76,73	76,86	77,43	77,97	78,22	78,57	79,24	80,45	1,53%
Provinsi	67,21	67,92	68,27	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	73,50	74,09	2,56%

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

tahun 2022 yang sebesar 73,50. Peningkatan IPM pada 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,90 tahun, meningkat 0,22 tahun atau lebih lama 2 bulan 19 hari dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

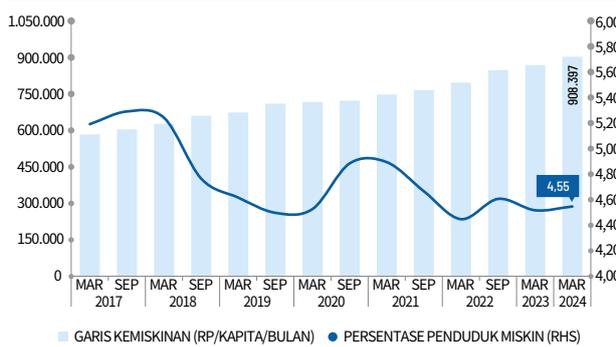
Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,18 tahun menjadi 12,31 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 tahun, dari 8,11 tahun menjadi 8,25 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 231 ribu rupiah (1,73 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas indikator-indikator dan meningkatnya standar hidup layak sebagai salah satu dimensi dasar yang menjadi indikator dan tolok ukur pertumbuhan IPM suatu daerah.

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV 2023 sebesar 74,09 masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional sebesar 74,39 pada 2023. Akan tetapi, nilai IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih lebih tinggi dari Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 73,73 dan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih

lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, dan Jawa Timur dengan IPM masing-masing sebesar 74,24, 74,30 dan 74,65.

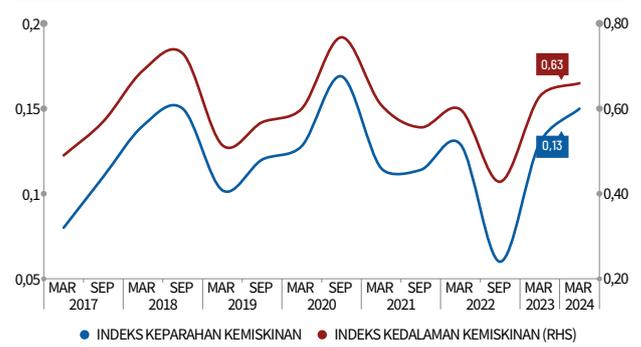
6.5.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2023 dapat terlihat dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Daerah dengan IPM tertinggi adalah Kota Pangkalpinang dengan IPM sebesar 80,45 pada tahun 2023, tumbuh sebesar 1,53% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun ini, status pembangunan manusia di Kota Pangkalpinang meningkat dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. Selanjutnya, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah dengan IPM kategori “tinggi”. Kabupaten Belitung dengan indeks sebesar 74,49 tumbuh sebesar 1,51% dibandingkan tahun 2022. Kemudian, Kabupaten Bangka dengan indeks sebesar 74,34 tumbuh sebesar 1,91% dibandingkan tahun 2022 dan Kabupaten Belitung Timur dengan indeks sebesar 73,31 tumbuh sebesar 1,41% dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, Kabupaten Bangka Tengah dengan indeks sebesar 72,36 tumbuh sebesar 1,34% dibandingkan tahun 2022. Kabupaten Bangka Barat dengan indeks sebesar 71,13 tumbuh sebesar 1,44% dibanding tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Bangka Selatan masih berkategori IPM “sedang” dengan indeks sebesar 69,67 tumbuh sebesar 2,53% dibandingkan tahun 2022.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.10 Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan

6.6 TINGKAT KEMISKINAN

Secara nasional, Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah pada Maret 2024. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ialah melalui tingkat kemiskinan.³ Persentase penduduk miskin⁴ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Maret 2024 sebesar 4,55%, mengalami peningkatan 0,03% (yoy) dibandingkan periode Maret 2023 sebesar 4,52%. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Maret 2024 sebesar 69,95 ribu orang, meningkat 1,26 ribu orang dibandingkan periode Maret 2023 sebesar 68,69 ribu orang. Kondisi ini sejalan dengan tren penurunan pendapatan masyarakat serta dengan



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah

Grafik 6.11 Perkembangan Gini Ratio

³ Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita. Berdasarkan pendekatan ini, dapat dihitung jumlah penduduk yang hidup di bawah GK (Garis Kemiskinan) yang dinyatakan sebagai penduduk miskin.

⁴ Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan yang terdiri dari dua komponen yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dengan peranan GKM dalam menentukan besaran GK lebih besar dibanding peranan GKBM (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

ditutupnya beberapa smelter akibat adanya masalah tata naga timah.

Garis kemiskinan per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp908.397,-/kapita/bulan pada Maret 2024. Garis kemiskinan tersebut merupakan yang kedua tertinggi secara nasional dibandingkan provinsi lainnya, sementara rata-rata garis kemiskinan nasional hanya sebesar Rp582.932,-. Sejalan dengan itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tercatat memiliki *gini ratio* terendah se-Indonesia yaitu sebesar 0,244 pada Maret 2024. Hal tersebut mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup rendah. Garis kemiskinan naik 3,91% dari Rp874.204,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2023 menjadi Rp908.397,- per kapita per bulan pada bulan Maret 2024. Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari sebesar 0,63 pada Maret 2023 menjadi sebesar 0,66 pada Maret 2024. Sementara itu, nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,13 pada Maret 2023, meningkat menjadi 0,15 pada Maret 2024.

Jika dilihat dari wilayahnya, nilai indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Hal tersebut disebabkan lebih tingginya harga bahan pokok di perdesaan dibandingkan perkotaan

terutama disebabkan oleh biaya distribusi harga bahan pokok dari perkotaan (distributor besar) menuju perdesaan (pasar tradisional, warung).

Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan sebesar 0,93, sementara di daerah perkotaan sebesar 0,46 pada Maret 2024. Hal ini lebih tinggi dari indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 0,82 di wilayah pedesaan dan 0,49 di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin daerah perdesaan lebih menjauhi/lebih dalam jika diukur dari garis kemiskinan dibandingkan daerah perkotaan. Demikian juga dengan nilai indeks keparahan kemiskinan yang lebih tinggi di daerah perdesaan sebesar 0,20, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 0,11 pada Maret 2024.

Komoditas makanan memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Maret 2024 baik di perkotaan maupun di perdesaan. Komoditas makanan menyumbang 72,11% pada garis kemiskinan di perkotaan, sementara itu di perdesaan komoditas makanan menyumbang 74,24% pada garis kemiskinan. Beras dan rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan pada jenis komoditas makanan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di sisi lain, komoditas bukan makanan menyumbang 27,89% terhadap garis kemiskinan di perkotaan, sementara di perdesaan komoditas bukan makanan menyumbang 25,67% terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Maret 2024. Perumahan menjadi penyumbang terbesar komoditas bukan makanan terhadap garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tabel 6.9 Komoditas Penyumbang Terbesar terhadap Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maret 2024

JENIS KOMODITI	PERKOTAAN	JENIS KOMODITI	PERDESAAN
Makanan	72,11	Makanan	74,24
Beras	18,74	Beras	19,83
Rokok Kretek Filter	11,17	Rokok Kretek Filter	14,96
Daging ayam ras	5,45	Daging ayam ras	4,74
Telur ayam ras	3,40	Telur ayam ras	3,08
Kue Basah	3,15	Kue Basah	2,92
Mie instan	2,99	Mie instan	2,83
Cabe rawit	2,45	Cabe rawit	2,70
Cabe merah	2,27	Cabe merah	2,43
Tongkol/tuna/cakalang	2,15	Tongkol/tuna/cakalang	1,92
Bawang Merah	2,03	Bawang Merah	1,90
Kembung	2,01	Kembung	1,73
Kopi bubuk & kopi instan (\sachet)	1,67	Kopi bubuk & kopi instan (\sachet)	1,72
Lainnya	14,63	Lainnya	13,50
Bukan Makanan:	27,89	Bukan Makanan:	25,67
Perumahan	9,05	Perumahan	9,84
Bensin	4,76	Bensin	4,04
Listrik	3,73	Listrik	2,76
Pendidikan	2,17	Pendidikan	1,08
Perlengkapan mandi	1,24	Perlengkapan mandi	1,07
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,83	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,74
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,73	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,72
Lainnya	5,38	Lainnya	5,52

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah





Foto : Tugu Nol Kilometer, Kota Pangkalpinang.

BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Sementara dari komponen pengeluaran, penurunan kinerja net ekspor dan investasi menahan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali.



Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia tahun

2024 diproyeksikan tumbuh 3,2%¹ (yoy). Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) periode Juli 2024, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 sebesar 3,3% (yoy) (Tabel 7.1). Angka pertumbuhan tersebut stabil jika dibandingkan proyeksi bulan April 2024 yang juga sebesar 3,2% (yoy). Meskipun demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi global tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan historis selama 20 tahun terakhir yang mencerminkan kebijakan moneter yang ketat.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan didorong prospek perekonomian negara maju yang tetap kuat.

Pertumbuhan negara maju mengalami sedikit peningkatan ditopang oleh pemulihan di Amerika Serikat dan kawasan Eropa seiring membaiknya permintaan domestik, penguatan ekspor utamanya di kawasan Eropa yang lebih tinggi pada semester I 2024, serta dukungan fiskal dan moneter yang akomodatif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang melambat dibandingkan tahun 2023, namun revisi atas dibandingkan proyeksi IMF pada bulan April 2024, terutama didorong oleh Tiongkok dan India. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok direvisi keatas seiring dengan pulihnya konsumsi swasta dan menguatnya ekspor pada triwulan I 2024. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di India juga direvisi lebih tinggi dampak berlanjutnya permintaan domestik.

Dari sisi perkembangan harga, rata-rata inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap.

Pada *World Economic Outlook* (WEO) IMF Juli 2024, inflasi global pada tahun 2024 diperkirakan turun menjadi 5,9% (yoy) dari sebelumnya 6,7% (yoy) pada tahun 2023. Sementara itu, pada *World Economic Outlook* (WEO) Juli 2024, IMF mengidentifikasi bahwa momentum penurunan inflasi global melambat seiring dengan berbagai dinamika sektoral. Inflasi harga jasa saat ini terus menunjukkan peningkatan, diikuti harga komoditas yang turut menunjukkan kenaikan. Namun demikian, normalisasi pasar tenaga kerja global serta tren penurunan harga energi diperkirakan akan menahan risiko kenaikan inflasi global lebih lanjut, sehingga akan kembali dalam rentang

Tabel 7.1 Outlook Perekonomian Global

NEGARA	2023	2024*	2025*
Dunia	3,3	3,2	3,3
Advanced Economies	1,7	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,5	2,6	1,9
Inggris	0,1	0,7	1,5
Jepang	1,9	0,7	1,0
Kawasan Eropa	0,5	0,9	1,5
Emerging Market and Developing Economies	4,4	4,3	4,3
Tiongkok	5,2	5,0	4,5
India	8,2	7,0	6,5
Volume Perdagangan Dunia	0,8	3,1	3,4

Sumber: *World Economic Outlook* (WEO) IMF Juli 2024; *)proyeksi, %yoy

sasaran pada akhir tahun 2025. Inflasi diperkirakan akan tetap lebih tinggi di negara-negara berkembang daripada negara maju. Lebih lanjut, seiring dengan tren penurunan harga energi, laju inflasi sudah mendekati tingkat pra-pandemi di sebagian negara berkembang.

Kinerja perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2024. Pada triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,05% (yoy) terutama didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, terutama sisi konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor barang meningkat didorong kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertambangan, terutama logam dan bijih logam, serta besi baja, ke negara mitra dagang utama, seperti India dan Tiongkok. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan triwulan IV 2024 diprakirakan akan tetap baik, dengan rencana peningkatan stimulus fiskal dari 2,3% menjadi 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian serta kinerja ekspor yang meningkat seiring kenaikan permintaan dari mitra dagang utama. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diprakirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergitas antara stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan.

¹ *World Economic Outlook* (WEO) IMF Juli 2024

Inflasi domestik diperkirakan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Berdasarkan perkembangan terkini, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juni 2024 tercatat 2,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Mei 2024 sebesar 2,84% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi *administered prices* (AP). Dari sisi *volatile food* (VF), inflasi turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia akibat meningkatnya pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta dampak positif dari eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Ke depan, inflasi IHK diperkirakan tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter *pro-stability* dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan Pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5±1%.

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2024

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 0,9 – 1,7% (yoy), meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 4,38% (yoy). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan terutama disebabkan oleh penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Perdagangan. Seiring dengan tingginya kontribusi komoditas timah terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhambatnya persetujuan RKAB timah milik smelter swasta dan penghentian operasional sejumlah smelter timah secara temporer pada semester I 2024 menahan pertumbuhan ketiga LU utama tersebut lebih lanjut. Sementara itu dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh penurunan kinerja net ekspor dan investasi. Meskipun demikian, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

diperkirakan tetap tumbuh positif pada tahun 2024 yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah seiring pelaksanaan Pilkada serentak. Lebih lanjut, kinerja sektor pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi seiring melemahnya fenomena El Nino di tahun 2024.

Berdasarkan perkembangan indikator terkini, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2024 mengindikasikan terjadinya perlambatan ekonomi pada tahun 2024. Dari sisi pelaku ekonomi, keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan menurun tecermin dari IKK. Pada triwulan II 2024, IKK masih berada di level optimis dengan indeks di atas 100 yaitu sebesar 124,44 namun lebih rendah dibandingkan IKK pada triwulan sebelumnya sebesar 129,14. IKK tersebut mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih optimis namun lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya. Menurunnya keyakinan konsumen pada triwulan II 2024 disebabkan oleh melambatnya seluruh indikator pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yaitu perkiraan kegiatan usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan kedepan dibandingkan saat ini. Selain itu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) juga mengalami penurunan pada indikator penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian *durable goods* dibandingkan 6 bulan yang lalu.

Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU Pertambangan diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan aktivitas pertambangan yang masih belum normal. Kondisi ini dipengaruhi oleh RKAB timah milik smelter swasta yang masih belum sepenuhnya disetujui hingga semester I 2024. Pemerintah juga terus berupaya menegakkan tata kelola dan niaga timah, termasuk kegiatan penambangan bijih timah secara legal. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan salah satu solusi untuk menjaga pertumbuhan dari sektor pertambangan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luasan 8.606 Ha atau 123 blok berdasarkan Kementerian ESDM No. 46.K/MB.01/MEM.B/2023. Namun demikian hingga pertengahan tahun 2024, WPR tersebut belum dapat digunakan karena IPR masih menunggu juknis

yang diterbitkan Kementerian ESDM. Penurunan kinerja LU Pertambangan juga terindikasi dari *shifting* tenaga kerja dari sektor pertambangan ke sektor lain yang lebih potensial. Sepanjang Februari 2023 – Februari 2024, penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan berkurang 34,76% (yoy).

Sejalan dengan terdeselerasinya LU Pertambangan, LU Industri Pengolahan juga diperkirakan melambat seiring terhambatnya pengolahan timah di milik smelter swasta. Selain itu, penghentian operasional sejumlah smelter timah secara temporer menyebabkan penurunan kapasitas produksi logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, seiring dengan upaya penegakan hukum terkait tata kelola dan tata niaga timah, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga melakukan pemblokiran rekening pihak-pihak yang terlibat dalam proses perbaikan tata kelola dan tata niaga timah dengan salah satu pihak tersebut merupakan pemilik pabrik kelapa sawit. Pemblokiran rekening tersebut berdampak pada terganggunya operasional dan *cashflow* perusahaan sehingga menyebabkan penutupan pabrik kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi tersebut juga menjadi salah satu penyebab penurunan kinerja LU Industri Pengolahan pada tahun 2024. Meskipun demikian, permintaan global terhadap komoditas timah diperkirakan tetap tinggi seiring meningkatnya permintaan terhadap peralatan berteknologi tinggi, produk *renewable energy*, mobil listrik, dan semi konduktor.

Selanjutnya, LU Perdagangan diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penghentian sementara operasional smelter timah dan penutupan pabrik kelapa sawit berdampak pada dirumahnya sejumlah pegawai smelter, pekerja tambang, pekerja Kapal Isap Produksi (KIP), dan pekerja pabrik kelapa sawit yang dirumahkan. Sejalan dengan hal tersebut, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga masih mengalami kontraksi secara tahunan pada semester I 2024 sebesar 7,99% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan pendapatan masyarakat lebih terbatas sehingga mulai menggunakan tabungannya untuk kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut, penurunan kinerja LU Perdagangan juga tecermin dari penurunan pembelian kendaraan baru. Pada triwulan II 2024, pembelian kendaraan baru terkontraksi 20,67%

(yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan I 2024 yang tercatat sebesar 10,82% (yoy).

Dalam rangka mengurangi dampak perlambatan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis terus mendorong diversifikasi ekonomi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru, antara lain dengan menyelenggarakan berbagai *event* besar serta memperkuat peran UMKM sebagai penyangga perekonomian. Pada tahun 2024, Kabupaten Belitung Timur kembali terpilih menjadi lokasi rangkaian kegiatan Kharisma *Event* Nusantara (KEN) 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam tajuk Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR) Belitung Timur. JPJR merupakan *event* pariwisata yang bertajuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan yang menggambarkan posisi penting Belitung Timur sebagai simpul jalur rempah Nusantara maupun dunia. Selain itu, Pemerintah juga terus meningkatkan geliat mobilitas masyarakat dengan menambah rute dan frekuensi dari/ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2024 untuk mendorong tumbuhnya perekonomian lebih lanjut.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Net Ekspor diperkirakan tertahan sejalan dengan termoderasinya kinerja ekspor, khususnya logam timah. Penurunan kinerja netekspor tersebut sejalan dengan tertahannya LU Pertambangan dan LU Industri Pengolahan. Di samping itu, investasi diperkirakan melambat sejalan dengan perilaku *wait and see* pada masa transisi pemerintahan di tengah tahun politik. Pelaku usaha dan investor cenderung menunggu kebijakan di era pemerintahan selanjutnya. Meskipun demikian, perlambatan ekonomi lebih lanjut tertahan seiring menguat konsumsi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Berbagai program pemerintah juga terus dilaksanakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur fisik bangunan dan jalan, maupun penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Konsumsi masyarakat juga diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan kenaikan UMP Kepulauan Bangka Belitung 4,04%, kenaikan gaji ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8%, dan kenaikan gaji Pensiunan sebesar 12% pada tahun 2024.

7.2 PROSPEK INFLASI TAHUN 2024

Dengan mengacu kepada berbagai perkembangan indikator perekonomian terkini, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali, namun berpotensi berada di rentang bawah sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Perkiraan capaian inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagai dampak terbatasnya daya beli masyarakat seiring dengan melambatnya kinerja sektor unggulan yaitu logam dasar timah.

Tekanan inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 diperkirakan bersumber dari peningkatan kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Untuk mengantisipasi risiko tekanan inflasi tersebut, kerjasama TPID dan Satgas Pangan harus terus diperkuat melalui strategi 4K ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Adapun beberapa risiko inflasi lainnya yang perlu diantisipasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Risiko inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, utamanya berasal dari komoditas beras. Risiko ini seiring dengan tren kenaikan harga beras yang terjadi sejak bulan Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia, yang dipicu oleh mundurnya masa tanam dan panen padi akibat fenomena El Nino yang terjadi sejak tahun 2023. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan relaksasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sejak 10 Maret. Relaksasi HET tersebut diperpanjang hingga kemudian ditetapkan menjadi HET beras medium dan premium secara permanen sejak bulan Juni 2024 melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024. HET untuk beras medium di Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp13.100/kg (sebelumnya Rp11.500/kg), sementara itu beras premium menjadi Rp14.400/kg (sebelumnya Rp15.400/kg). Risiko inflasi komoditas pangan lainnya turut bersumber dari komoditas bawang putih dan gula pasir seiring dengan terbatasnya stok secara nasional.

Selain komoditas pangan, risiko inflasi bersumber dari rokok dan bahan bakar minyak (bensin). Laju inflasi rokok didorong oleh berlanjutnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok rata-rata sebesar 10%, hasil tembakau berupa Rokok Elektrik (REL) sebesar 15%, serta Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) sebesar 6% pada tahun 2024². Lebih lanjut, laju inflasi bahan bakar minyak (bensin) berisiko meningkat seiring dengan naiknya harga BBM jenis non-subsidi pada Agustus 2024, yang meliputi produk BBM Pertamina Turbo, Dexcelite, dan Pertamina Dex.

Sementara itu, risiko inflasi komoditas pangan berpotensi tertahan oleh penurunan harga sebagian besar ikan-ikan segar/laut. Hingga bulan Juli 2024, harga sebagian besar ikan-ikan segar/laut terpantau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis ikan yang sering menyumbang inflasi seperti ikan kembung, ikan tongkol, ikan kerisi, ikan selar, ikan singkur, dan ikan bulat tercatat secara konsisten memberi andil terhadap deflasi tahunan. Namun demikian, seiring dengan perkiraan curah hujan menengah – tinggi serta fenomena La Nina yang diperkirakan terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir triwulan III sampai dengan triwulan IV, berisiko mendorong kenaikan harga sebagian besar harga ikan-ikan segar/laut akibat kondisi cuaca dan gelombang yang kurang kondusif bagi nelayan untuk pergi melaut.

2. Kelompok Transportasi

Risiko kenaikan harga tiket angkutan udara seiring dengan meningkatnya permintaan dampak geliat pariwisata yang semakin meningkat, terutama di tengah pagelaran berbagai *event*, baik yang berskala regional maupun nasional. Seiring dengan terbatasnya jumlah penerbangan dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan berbagai *event* yang bersifat kebudayaan, olahraga, maupun pariwisata, serta termasuk MICE Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berisiko mendorong kenaikan harga tiket angkutan udara.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamina Turbo, Pertamina Green

² Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris

95, Dextrite dan juga Pertamina Dex per Agustus 2024 berisiko meningkatkan laju inflasi kelompok *administered prices*, khususnya bensin.

3. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran

Sejalan dengan potensi peningkatan komoditas pangan strategis yang masuk kelompok makanan minuman tembakau, menyebabkan berbagai komoditas pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang merupakan sektor hilir berpotensi turut mengalami peningkatan tekanan inflasi. Lebih lanjut, potensi meningkatnya mobilitas dari dan ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan *event* kebudayaan, olahraga, pariwisata, maupun MICE Kementerian/Lembaga, sektor pariwisata diperkirakan juga turut meningkat sehingga mendorong peningkatan permintaan jasa pelayanan makanan dan minuman/restoran.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan seluruh TPID Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil melalui pelaksanaan program unggulan GNPIP dengan memperhatikan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

7.3 REKOMENDASI KEBIJAKAN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memperkuat stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan fiskal dan moneter

- a) **Optimalisasi dan percepatan realisasi APBD dan stimulus fiskal** secara tepat waktu dan tepat sasaran untuk mendorong daya beli masyarakat dan geliat aktivitas ekonomi dengan fokus utama pada program yang memberikan *return* dan dampak *multiplier effect* yang optimal. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak bagi sektor-

sektor penggerak pertumbuhan ekonomi, antara lain industri ekonomi kreatif/UMKM, pariwisata, dan pertanian perikanan yang berkelanjutan.

b) Mendorong fungsi intermediasi perbankan

mencakup perluasan akses kredit/pembiayaan terutama kepada UMKM dan memfasilitasi *business matching* pembiayaan. Lebih lanjut, penguatan penghimpunan DPK juga perlu menjadi fokus utama perbankan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka menjaga risiko likuiditas di tengah percepatan peningkatan kualitas kredit.

2. Diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi produktif

yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menjadi sumber ekonomi berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

a) Mendorong industrialisasi dan hilirisasi komoditas strategis unggulan

sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berkelanjutan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada komoditas mineral potensial, termasuk timah. Selain meningkatkan daya saing ekspor, hilirisasi juga memberikan *multiplier effect* yang luas dalam perekonomian. Selain itu, hilirisasi SDA juga perlu dilakukan secara menyeluruh, meliputi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan.

b) Optimalisasi peluang ekspor non-timah potensial

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara historis lebih dari 80% ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh timah, sehingga penurunan ekspor timah akan memberi dampak signifikan terhadap kinerja ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Optimalisasi komoditas ekspor strategis non-timah seperti CPO, karet, lada putih, dan produk perikanan (udang vaname dan cumi-cumi) yang potensial diperlukan dalam jangka

panjang. Penguatan ekspor juga ditujukan untuk produk UMKM potensial seperti produk olahan ikan (getas, keritcu) dan kerajinan (batik cual, tenun, dan kerajinan kriya).

c) Mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,

khususnya di Pulau Belitung, melalui penyelenggaraan *event* pariwisata dan sarana prasarana yang memadai. Penguatan promosi *event* dilakukan secara masif dan tepat sasaran untuk menarik minat wisatawan datang ke destinasi wisata unggulan seperti Geopark Belitung sebagai Global Geopark UNESCO. Upaya mengembangkan pariwisata juga dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai, seperti penambahan maskapai dari/ke Belitung termasuk maskapai premium, perluasan rute penerbangan dari/ke Belitung termasuk rute internasional, bandara yang representatif, serta atraksi dan lokasi wisata yang berkualitas.

d) Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

melalui penguatan akses pembiayaan dan perluasan akses pasar. UMKM memiliki peran signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penguatan akses pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi kredit usaha rakyat dan *business matching* antara pelaku usaha dengan perbankan. Perluasan akses pasar ditujukan melalui promosi dan kerjasama perdagangan, baik pasar domestik maupun ekspor.

e) Mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelompok industri yang menjadi bagian dari rantai nilai industri halal (*halal value chain/HVC*) meliputi makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, fesyen halal, media dan rekreasi islami, serta pariwisata ramah muslim. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah yang mewajibkan berbagai kategori produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal khususnya bagi UMKM paling lambat hingga Oktober 2026.

3. Mendorong iklim investasi yang kondusif

melalui kemudahan perizinan usaha (implementasi Sistem *One Single Submission* (OSS), penyederhanaan, dan harmonisasi peraturan, kebijakan insentif kepada investor potensial, serta kemudahan pembebasan lahan. Pembangunan lebih lanjut dari kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diperlukan untuk memperluas peluang investasi, baik dari sektor swasta maupun BUMN.

4. Percepatan transformasi ekonomi digital di berbagai sektor ekonomi

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas. Transformasi digital diarahkan untuk pembayaran nontunai, digitalisasi produk, dan layanan publik. Upaya percepatan pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital daerah yang inklusif, termasuk perluasan akseptasi QRIS juga perlu didorong dengan mengoptimalkan peran TP2DD, sehingga seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mempertahankan predikat “Digital” dalam indikator Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD).

b. Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong berbagai upaya pengendalian inflasi, baik di pusat maupun daerah, serta memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui sinergi dan koordinasi semua pihak dengan menerapkan strategi 4K ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif yang tentunya diimplementasikan sesuai dengan peta jalan Pengendalian Inflasi Daerah (PID) tahun 2022-2024.

1. Keterjangkauan Harga

a) Memperkuat efektivitas operasi pasar murah/gerakan pangan murah/program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Operasi pasar dilaksanakan secara intensif dan *targeted* untuk mencegah terjadinya gejolak harga komoditas.

- b) Penguatan pengawasan HET terutama untuk komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir.
- c) Menindak tegas penimbunan barang, dan pembatasan pembelian bahan makanan pokok tertentu.

2. Ketersediaan Pasokan

- a) Perluasan kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan kebutuhan pangan, baik intra maupun antarprovinsi.
- b) Penguatan program kemandirian pangan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga secara berangsur dapat mengurangi defisit pangan. Penguatan produksi lokal didorong melalui program Semangat Menanam Rakyat Bangka Belitung (Semarak Babel) yang diinisiasi Ketua TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rangka mendukung penguatan produksi lokal, Bank Indonesia juga mengembangkan dan memperluas klaster ketahanan pangan binaan/mitra melalui peningkatan sarana dan prasarana, dukungan logistik, serta pendampingan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kelompok wanita tani (KWT), gabungan kelompok tani (gapoktan) potensial, pondok pesantren, serta kelurahan tanggap inflasi.
- c) Pemanfaatan *cold storage* untuk memperpanjang masa simpan produk pangan, terutama yang rentan mengalami pembusukan, seperti komoditas hortikultura dan daging.
- d) Mendorong pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan perumda/BUMD/Bumdes/koperasi yang bergerak di sektor pangan dalam rangka peningkatan perannya dalam pengendalian inflasi di daerah, seperti sebagai *offtaker* produk pertanian, pelaksana KAD B2B, dan pelaksana operasi pasar.

3. Kelancaran Distribusi

- a) Membangun pasar induk sebagai sentra transaksi perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasar induk diharapkan menjadi pusat penyaluran kebutuhan untuk memperlancar kegiatan jual beli di pasar lainnya, baik intraprovinci maupun antarprovinsi.
- b) Memastikan kelancaran distribusi bahan pangan yang menghubungkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sumber pasokan dari daerah sentra (Pulau Jawa dan Sumatera) melalui prioritas antrian angkutan distribusi pangan di pelabuhan, terutama pada *peak season*.
- c) Prioritisasi penyebrangan muatan logistik untuk komoditas pangan di pelabuhan.
- d) Perbaikan infrastruktur pelabuhan diperlukan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah kepulauan yang mengutamakan jalur distribusi laut.

4. Komunikasi Efektif

- a) Menjaga ekspektasi masyarakat tetap positif dengan mengoptimalkan penggunaan media komunikasi serta menghimbau masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar dan bijak berbelanja.
- b) Meninjau dengan saksama dan melakukan koordinasi terkait penetapan kebijakan penyesuaian tarif-tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti tarif air minum PAM, tarif parkir, serta tarif-tarif komoditas lain yang berdampak terhadap peningkatan inflasi secara umum di daerah.
- c) Penguatan data pasokan pangan daerah untuk mendukung efektivitas pengambilan kebijakan.



Daftar Istilah

Aktiva Produktif	Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
Bank Pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Cash Inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito
Ekspor	Adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
Gross Margin	Persentase <i>value added</i> dikurangi biaya tenaga kerja dibagi output
Input	Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa bahan baku, bahan bakar, barang lainnya diluar bahan baku/penolong, jasa industri, sewa gedung dan biaya jasa non industri lainnya
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli
Industri	Suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (assembling) dari bagian suatu industri
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persisten)
Intensitas Tenaga Kerja	Suatu rasio antara biaya upah/gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja terhadap nilai tambah
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal
Jasa Industri	Kegiatan dari suatu usaha yang melayani sebagian proses industri suatu usaha industri atas dasar kontrak atau balas jasa (<i>fee</i>)
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kliring Debet	Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional

Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
Migas	Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas
Mtm	<i>Month to month</i> . Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah cash inflows dan cash outflows pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash Inflows</i> bila terjadi sebaliknya
Nilai Tambah/Value Added	Selisih nilai output dengan nilai input atau biasa disebut dengan nilai tambah menurut harga pasar
Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
Omset	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi
Output	Nilai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima, keuntungan jual beli, penambahan stok barang setengah jadi dan penerimaan-penerimaan lainnya
PDRB atas dasar harga berlaku	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian
PDRB atas dasar harga konstan	Merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya
Pekerja	Orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut
Pekerja Dibayar	Orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapatkan upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang
Pekerja Tidak Dibayar	Pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan tetapi tidak mendapatkan upah/gaji, tidak termasuk mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja yang biasa di perusahaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yaitu yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada satu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi
Perusahaan Industri	Diklasifikasikan menjadi empat lapangan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja tanpa memperhatikan penggunaan mesin maupun nilai dari aset yang dimiliki
Produktivitas	Rasio antara nilai output dengan jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya
Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit
Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, gross. Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan
Share effect	Kontribusi pangsa sektor atau subsektor terhadap total PDRB
Share of Growth	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB
Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)	Sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional
Tingkat Efisiensi	Rasio antara nilai tambah atas dasar harga pasar terhadap <i>output</i> produksi
Usaha	Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya



Halaman ini sengaja dikosongkan



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
No. Telp : 0717-422411. Fax : 0717-422311

